



PUTUSAN

Nomor 06-09-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. (HC). Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si;**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat kantor : Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat;
2. Nama : **Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/MDT/DPP/V/2014 bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., MH.; Munarman, S.H.; Ade Irfan Pulungan, S.H.; M. Hadrawi Ilham, S.H.; Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.; Angga Brata Rosihan, S.H.; Nurlan HN, S.H.; Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si.; Hj. Andi Nurul Askina, S.H. M.H.; Ahmad Bay Lubis, S.H.; Abdul Haris Ma'mun, S.H.; Agung Prabowo, S.H.; M. Fadli Nasution, S.H., M.H.; Muslimin Mahmud, S.H.; Dedi Setiawan, S.H.; Feldi Thaha, S.H.; Juliandri Yan, S.H.; DR. Wibowo, S.H., M.H.; Emma Alatas, S.H.; Ibrahim Murod, S.H.; Herdiansyah, S.H.; Muhdian Anshari, S.H.; M. Syahir, S.H., M.H.; Drs. Arman Remy, S.H., M.H.; H.



M. Natsir, S.H.; Zuman Malaka, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro Lt. II No. 60, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Persatuan Pembangunan, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1197/KPU/V/Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi, S.H. M.H. kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum kesemuanya tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait I Partai Nasional Demokrat;



Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait II (Perseorangan) H. Khairan;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait II (Perseorangan) H. Khairan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I Partai Nasional Demokrat;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Nasional Demokrat, dan Pihak Terkait II (Perseorangan) H. Khairan;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Nasional Demokrat, dan Pihak Terkait II (Perseorangan) H. Khairan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 06-09-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu



- secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
 - d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI JAWA BARAT DAPIL JABAR II DPRRI

Perolehan suara menurut termohon dan pemohon (PPP), sepanjang pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II yang dimohonkan, selanjutnya secara lengkap dituangkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014 DI DAPIL JAWA BARAT II KABUPATEN BANDUNG :

DAFIL JAWA BARAT : II KABUPATEN BANDUNG

No.	DAFIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAFIL JABAR II	69.818	90.458	20.640	P.9 – 1 P.9 - 2

Bukti P.9 – 1 adalah berupa Model DB-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten



Bandung Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Dapil Jawa Barat II.

Bukti P.9 – 2 adalah berupa Model DB-1 DPR Kabupaten Bandung Barat Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Bandung Barat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Dapil Jawa Barat II.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM DPR DI DAPIL JABAR II PADA KABUPATEN BANDUNG BARAT :

TABEL PERSANDINGAN :

DAPIL JAWA BARAT : II KABUPATEN BANDUNG BARAT

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAPIL JABAR II	-	50.930	-	P.9 - 3

Bukti P.9 – 3 adalah berupa Model DB-1 DPR Kabupaten Bandung Barat Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Bandung Barat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Dapil Jawa Barat II.

AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PPP) pada DAPIL JAWA BARAT II secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon (PPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, seperti yang dijelaskan pada Tabel dibawah ini :

Tabel:**AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA :**

NO	PARTAI POLITIK	SUARA PARPOL	BPP	KURSI	SISA KURSI	JUMLAH KURSI
1	NASDEM	102.442	234.735	-	-	-
2	PKB	164.779	234.735	-	1	1



3	PKS	188.925	234.735	-	1	1
4	PDIP	458.909	234.735	1	1	2
5	GOLKAR	431.915	234.735	1	1	2
6	GERINDRA	274.411	234.735	1	-	1
7	DEMOKRAT	309.309	234.735	1	-	1
8	PAN	135.679	234.735	-	-	-
9	PPP	141.388	234.735	-	1	1
10	HANURA	139.600	234.735	-	1	1
14	PBB	58.854	234.735	-	-	-
15	PKPI	15.475	234.735	-	-	-
	J U M L A H	2.421.686		4	6	10

PETITUM :

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat II, serta perolehan suara yang benar adalah sebanyak **141.338suara** dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut :

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.9-1 sampai dengan bukti P.9-34 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P.9 – 1 Model DB-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Dapil Jawa Barat II.



2. P.9 – 2 Model DB-1 DPR Kabupaten Bandung Barat Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Bandung Barat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Dapil Jawa Barat II.
3. P.9 – 3 Model DB-1 DPR Kabupaten Bandung Barat Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Bandung Barat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Dapil Jawa Barat II.
4. P.9 – 4 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Cileunyi Dapil Jawa Barat II.
5. P.9 – 5 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Cimenyan Dapil Jawa Barat II.
6. P.9 – 6 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Cilengkrang Dapil Jawa Barat II.
7. P.9 – 7 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Bojongsoang Dapil Jawa Barat II.
8. P.9 – 8 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Margahayu Dapil Jawa Barat II.
9. P.9 – 9 Model DA Kabupaten Bandung Berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Katapang Dapil Jawa Barat II.
10. P.9 – 10 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dayeuhkolot Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Margahayu Dapil Jawa Barat II.
11. P.9 – 11 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Banjaran Dapil Jawa Barat II.
12. P.9 – 12 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Pameungpeuk Dapil Jawa Barat II.
13. P.9 – 13 Model DA-1 DPR Kabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap



- Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Pangalengan Dapil Jawa Barat II.
14. P.9 – 14 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Arjasari Dapil Jawa Barat II.
15. P.9 – 15 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Cimaung Dapil Jawa Barat II.
16. P.9 – 16 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Cicalengka Dapil Jawa Barat II.
17. P.9 – 17 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Nagreg Dapil Jawa Barat II.
18. P.9 – 18 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Cikancung Dapil Jawa Barat II.
19. P.9 – 19 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Ciparay Dapil Jawa Barat II.
20. P.9 – 20 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Pacet Dapil Jawa Barat II.
21. P.9 – 21 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Kertasari Dapil Jawa Barat II.
22. P.9 – 22 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Bale Endah Dapil Jawa Barat II.
23. P.9 – 23 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Majalaya Dapil Jawa Barat II.
24. P.9 – 24 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Solokanjeruk Dapil Jawa Barat II.
25. P.9 – 25 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Paseh Dapil Jawa Barat II.



26. P.9 – 26 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Ibum Dapil Jawa Barat II.
27. P.9 – 27 Model DA Kabupaten Bandung Berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Soreang Dapil Jawa Barat II.
28. P.9 – 28 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Pasirjambu Dapil Jawa Barat II.
29. P.9 – 29 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Ciwidey Dapil Jawa Barat II.
30. P.9 – 30 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Rancakbali Dapil Jawa Barat II.
31. P.9 – 31 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Kutawaringin Dapil Jawa Barat II.
32. P.9 – 32 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Ciwidey Dapil Jawa Barat II.
33. P.9 – 33 Model DA-1 DPRKabupaten Bandung Berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Umum Anggota DPR Tahun 2014.
34. P.9 – 34 Surat Keterangan/Klarifikasi Goen Goen Hermawan dari Panwaslu Kabupaten Bandung.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Goen Goen Hermawan;

- Saksi sebagai Tim Sukses PPP dan simpatisan;
- Saksi menyatakan ada perbedaan DB-1 di KPU Bandung;
- Tanggal 5 Mei, saksi mendapatkan DB-1 dimana PPP memperoleh 69.818 suara sedangkan tanggal 7 Mei saksi mendapatkan kembali DB-1 dimana PPP memperoleh 90.458 suara;
- Saksi mendapatkan kedua DB-1 yang berbeda dari KPU;



2. Yuyun Supriatna;

- Saksi sebagai Ketua LP2;
- Saksi menyatakan arsip hasil tanggal 5 masih kosong sehingga saksi langsung ke KPU. Tiba di KPU saksi diberikan arsip yang isinya PPP memperoleh 90.458 suara;

3. Dasep Azhari;

- Tanggal 5, saksi mendampingi Yuyun ke KPU untuk mendapatkan DB-1 yang isinya PPP memperoleh 69.818 suara;
- Tanggal 7, saksi meminta kembali ke KPU dan KPU memberikan DB-1 yang kedua dimana PPP memperoleh 90.458 suara;
- Saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan DB-1 ke Yuyun;

[2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDAPIL JABAR XI

Bahwa Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon (KPU) dan Pemohon pada Daerah Pemilihan Jawa Barat XI yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jawa Barat XI	342.330	343.384	1.054	P-9.(J-XI).1 s.d. P-9.(J-XI).49

Keterangan Kode Alat Bukti P-9.(J-XI).1, dst:

- P** = Pemohon
9 = Nomor Urut PPP (Pemohon)
J-XI = Dapil Jawa Barat XI



1 = Nomor urutan alat bukti

A. Pokok-pokok Permohonan Pemohon Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR di Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat XI

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR;
2. Bahwa objek perkara Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah penetapan hasil Pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara manual berdasarkan formulir C1 TPS yang dimiliki oleh Pemohon dan formulir C1 TPS yang diunggah dari website KPU (www.kpu.go.id);
5. Bahwa setelah diteliti dan dicermati, pada saat dilakukan penghitungan perolehan suara Pemohon di seluruh TPS se-Kabupaten Garut, Pemohon menemukan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon akan menguraikan penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
 - a). Bahwa Pemohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik **dari seluruh TPS di 5 kecamatan** dari 42 kecamatan se-Kabupaten Garut, dimana Pemohon menemukan adanya **kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh Termohon**, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik berikut ini:

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan



Cigedug(Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)

[Bukti P-9.(J-XI).19]

Desa : Barusuda Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cigedug Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	NasDem	58	18	36	6	3	11	10	4	9	3	3	5	13	5	4	5	193
2	PKB	32	164	37	17	31	27	21	16	4	3	11	36	14	86	62	12	573
3	PKS	20	9	19	11	10	14	14	5	6	64	21	9	11	7	23	37	280
4	PDI P	17	7	18	17	12	18	25	14	28	31	15	45	19	5	5	18	294
5	GOLKAR	27	49	46	62	40	49	32	80	129	89	55	61	60	11	6	44	840
6	GERINDRA	13	13	23	25	12	31	12	5	6	24	17	18	17	2	20	10	248
7	DEMOKRAT	4	24	11	19	10	15	15	12	18	5	23	19	25	10	12	25	247
8	PAN	100	47	12	45	30	62	105	118	41	12	61	4	18	32	58	19	764
9	PPP	49	19	75	22	56	53	98	5	20	29	59	41	71	24	27	28	676
10	HANURA	11	18	44	23	9	7	6	8	8	6	3	2	12	5	9	5	176
14	PBB	1	4	2	3	-	2	-	-	-	-	-	1	4	5	2	12	38
15	PKPI	5	2	-	1	1	1	2	-	-	1	-	2	-	1	-	-	16
SUARA SAH		337	374	323	251	214	290	340	267	269	267	269	246	265	190	238	205	4.345

Desa : Cigedug Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : Cigedug Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	NasDem	3	51	9	9	8	5	10	8	12	2	3	4	5	15	2	-	1	13	160
2	PKB	121	7	74	57	37	106	58	98	30	30	19	12	31	47	29	4	6	32	798
3	PKS	5	14	8	26	4	4	50	20	8	8	8	7	11	10	12	16	16	12	239
4	PDI P	3	19	44	2	2	4	13	14	7	1	1	4	4	9	22	30	39	7	225
5	GOLKAR	2	28	31	7	5	10	27	29	80	61	20	44	75	67	24	80	127	68	785
6	GERINDRA	4	53	34	8	2	7	17	23	28	12	9	10	14	28	21	5	16	38	329
7	DEMOKRAT	17	58	18	11	30	6	24	15	13	20	28	30	18	37	7	10	3	18	363
8	PAN	104	36	11	33	10	1	23	22	55	36	36	11	9	8	11	15	21	17	459
9	PPP	6	12	11	83	43	60	71	27	21	94	57	45	49	31	54	78	43	44	829
10	HANURA	26	24	10	32	57	35	26	43	45	19	15	36	15	16	13	30	12	21	475
14	PBB	1	5	3	2	2	3	1	-	2	1	3	2	5	-	4	-	2	1	37
15	PKPI	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	10
SUARA SAH		292	308	253	270	202	242	320	299	301	285	199	206	236	268	199	269	287	273	4.709

Desa : Cintanagara Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : Cigedug Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NasDem	3	5	6	3	4	13	14	3	13	15	8	16	4	1	108
2	PKB	13	19	19	14	11	3	13	5	13	8	8	13	34	9	182
3	PKS	11	44	4	87	6	6	4	8	7	7	24	27	12	23	270
4	PDI P	13	6	10	3	3	2	4	2	12	7	3	10	18	12	105
5	GOLKAR	12	14	11	4	5	12	18	3	26	25	19	33	33	17	232
6	GERINDRA	3	15	12	-	2	4	20	12	14	4	1	5	16	3	111
7	DEMOKRAT	6	9	11	7	21	18	27	12	5	8	22	13	14	9	182
8	PAN	46	73	50	32	89	43	140	17	42	18	19	6	72	103	750
9	PPP	87	55	68	114	100	73	75	106	53	42	93	94	55	21	1.036
10	HANURA	12	3	38	3	4	41	12	84	29	25	43	29	10	6	339
14	PBB	1	1	32	-	1	2	4	1	3	23	4	8	4	3	87
15	PKPI	2	-	11	-	2	1	4	1	6	1	2	1	1	1	33
SUARA SAH		209	244	272	267	248	218	335	254	223	183	246	255	273	208	3.435



Desa : Sindangsari Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cigedug Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nasdem	11	14	2	7	3	1	3	5	14	4	64
2	PKB	33	14	30	59	108	61	110	52	11	34	512
3	PKS	3	7	5	5	1	-	3	18	6	11	59
4	PDI PERJUANGAN	6	6	11	4	7	15	30	8	4	8	99
5	GOLKAR	79	32	47	12	42	66	59	36	21	16	410
6	GERINDRA	3	6	3	5	3	12	5	43	12	25	117
7	DEMOKRAT	3	8	3	34	7	4	2	6	13	8	88
8	PAN	32	18	14	16	20	35	13	26	9	45	228
9	PPP	51	86	65	14	14	45	79	50	254	18	676
10	HANURA	11	42	23	64	11	10	16	24	14	7	222
14	PBB	17	22	7	6	1	1	-	-	4	2	60
15	PKPI	1	1	-	1	5	-	3	1	-	2	14
SUARA SAH		250	256	210	227	222	250	323	269	362	180	2,549

Desa : Sukahurip Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cigedug Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nasdem	7	4	6	10	5	2	8	4	11	6	2	65
2	PKB	27	109	61	18	136	55	49	63	149	82	83	832
3	PKS	26	6	14	21	26	17	31	40	13	11	7	212
4	PDI PERJUANGAN	6	3	5	4	2	5	37	6	2	12	3	85
5	GOLKAR	64	15	27	10	14	44	55	38	11	74	34	386
6	GERINDRA	8	1	4	9	9	11	13	12	53	120	10	250
7	DEMOKRAT	7	12	6	3	1	1	7	2	3	6	5	53
8	PAN	4	12	42	76	20	28	17	22	21	40	22	304
9	PPP	17	3	43	57	15	37	40	12	26	14	9	273
10	HANURA	27	2	19	2	7	2	20	25	54	3	13	174
14	PBB	1	1	-	1	1	-	4	5	-	1	2	16
15	PKPI	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	7
SUARA SAH		195	169	229	212	236	202	282	229	343	369	191	2,657

Tabel 3

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Cigedug (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)



[Bukti P-9.(J-XI).19]

Kecamatan : Cigedug
Kabupaten : Garut

Provinsi : Jawa Barat
Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI

NO	PARTAI POLITIK	BARUSUDA	CIGEDUG	CINTANEGARA	SINDANGSARI	SUKAHURIP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nasdem	193	160	108	64	65	590
2	PKB	573	798	182	512	832	2.897
3	PKS	280	239	270	59	212	1.060
4	PDI PERJUANGAN	294	225	105	99	85	808
5	GOLKAR	840	785	232	410	386	2.653
6	GERINDRA	248	329	111	117	250	1.055
7	DEMOKRAT	247	363	182	88	53	933
8	PAN	764	459	750	228	304	2.505
9	PPP	676	829	1.036	676	273	3.490
10	HANURA	176	475	339	222	174	1.386
14	PBB	38	37	87	60	16	238
15	PKPI	16	10	33	14	7	80
SUARA SAH		4.345	4.709	3.435	2.549	2.657	17.695

Tabel 4

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Pameungpeuk (Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)

[Bukti P-9.(J-XI).20]

Desa : Bojong

Kabupaten : Garut

Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI

Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nasdem	6	0	9	6	11	8	5	3	48
2	PKB	67	70	15	49	41	28	25	12	307
3	PKS	12	2	9	7	19	6	8	16	79
4	PDI PERJUANGAN	1	8	1	5	8	3	4	13	43
5	GOLKAR	29	24	23	12	21	11	30	1	151
6	GERINDRA	4	7	22	19	19	17	17	0	105
7	DEMOKRAT	4	4	1	16	8	2	9	1	45
8	PAN	39	30	33	33	106	86	60	1	388
9	PPP	23	13	13	18	4	1	1	1	74
10	HANURA	3	3	1	1	3	2	2	0	15
14	PBB	0	1	3	1	0	1	1	1	8
15	PKPI	2	1	0	1	0	1	1	1	7
SUARA SAH		190	163	130	168	240	166	163	50	1.270



Desa : Bojong Kidul Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Nasdem	6	3	5	9	16	4	3	18			64
2	PKB	13	31	39	13	19	43	16	1			175
3	PKS	5	32	11	4	8	0	16	12			88
4	PDI PERJUANGAN	12	12	7	8	1	0	4	1			45
5	GOLKAR	36	23	33	55	62	14	1	30			254
6	GERINDRA	10	8	9	13	6	5	3	1			55
7	DEMOKRAT	32	39	16	48	29	17	8	5			194
8	PAN	22	20	38	63	40	37	47	37			304
9	PPP	3	7	5	2	3	5	4	8			37
10	HANURA	3	3	2	6	4	0	10	2			30
14	PBB	1	2	1	3	0	0	0	1			8
15	PKPI	7	4	2	2	0	1	2	0			18
	SUARA SAH	150	184	168	226	188	126	114	116			1,272

Desa : Jatimulya Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nasdem	9	29	24	4	7	12	2	6	10	1	5	8	117
2	PKB	4	24	6	9	3	26	30	12	3	16	12	45	190
3	PKS	13	6	1	15	25	6	18	12	10	13	14	4	137
4	PDI PERJUANGAN	50	25	24	28	49	11	9	38	20	27	27	15	323
5	GOLKAR	12	40	57	19	0	45	33	52	67	67	27	14	433
6	GERINDRA	9	10	12	30	0	15	21	41	17	28	35	14	232
7	DEMOKRAT	13	9	30	45	0	8	14	13	11	10	34	13	200
8	PAN	69	159	53	69	46	59	37	27	65	54	42	62	742
9	PPP	7	12	1	6	4	4	2	6	0	5	9	1	57
10	HANURA	3	9	1	6	2	5	2	6	0	1	6	3	44
14	PBB	1	7	4	5	0	13	3	3	0	0	16	19	71
15	PKPI	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	6
	SUARA SAH	191	330	213	237	136	204	173	217	203	222	228	198	2,552

Desa : Mancagahar Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat

No	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nasdem	3	8	4	2	4	5	5	3	3	9	4	3	53
2	PKB	13	17	35	32	31	37	27	43	20	24	25	6	310
3	PKS	30	5	7	4	7	8	8	13	5	14	5	3	109
4	PDI PERJUANGAN	39	42	55	41	12	20	25	27	24	58	44	26	413
5	GOLKAR	40	61	55	36	38	23	30	30	37	43	13	17	423
6	GERINDRA	17	14	16	10	20	22	37	23	29	13	16	8	225
7	DEMOKRAT	6	18	6	15	46	37	26	26	8	39	18	10	255
8	PAN	50	44	58	69	52	78	70	43	45	46	36	21	612
9	PPP	3	16	5	4	3	3	3	2	6	4	2	3	54
10	HANURA	6	10	4	1	5	1	4	6	1	2	0	0	40
14	PBB	0	7	3	2	5	0	8	0	0	4	0	0	29
15	PKPI	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4	0	0	7
	SUARA SAH	207	242	248	216	224	234	245	216	178	260	163	97	2,530



Desa : Mandalakasih Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NasDem	4	6	7	20	25	10	5	5	2	5	10	10	4	5	3	121
2	PKB	3	8	40	11	18	16	20	9	0	30	24	16	11	18	29	253
3	PKS	34	24	10	40	5	15	12	18	6	6	2	4	5	27	16	224
4	PDI PERJUANGAN	6	5	17	9	5	30	2	3	2	8	11	4	5	19	14	140
5	GOLKAR	36	29	26	34	83	53	14	5	8	25	29	26	33	61	16	478
6	GERINDRA	16	11	13	12	8	20	14	3	5	1	2	22	17	7	1	152
7	DEMOKRAT	10	22	16	17	15	28	16	8	37	21	10	22	33	26	11	292
8	PAN	85	60	28	63	31	28	50	76	293	66	82	33	21	110	45	1071
9	PPP	1	7	8	11	21	25	6	1	1	4	3	12	11	12	1	124
10	HANURA	7	11	7	5	3	3	2	0	1	0	0	6	6	3	4	58
14	PBB	5	13	3	2	7	18	7	5	8	0	2	3	0	27	0	100
15	PKPI	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
	SUARA SAH	208	196	175	225	221	246	149	133	363	166	176	158	146	315	140	3.017

Desa : Paas Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NasDem	3	6	9	0	7	11	6	13	5	12	5	3	6	86
2	PKB	20	24	20	0	29	20	26	27	80	50	89	61	28	474
3	PKS	24	24	26	21	5	13	26	10	4	9	4	9	7	182
4	PDI PERJUANGAN	45	46	20	15	18	22	15	36	2	16	12	5	34	286
5	GOLKAR	46	71	63	40	29	56	36	64	53	61	30	15	26	590
6	GERINDRA	6	6	12	4	19	10	13	8	11	16	6	4	8	123
7	DEMOKRAT	27	18	24	13	4	8	9	14	7	26	14	8	3	175
8	PAN	99	102	77	78	39	95	110	52	24	69	20	29	12	806
9	PPP	8	6	12	4	6	13	7	8	1	4	12	4	7	92
10	HANURA	3	0	7	2	9	28	42	8	5	16	1	9	15	145
14	PBB	7	3	2	2	2	5	4	2	4	2	0	1	2	36
15	PKPI	0	0	2	1	0	2	0	1	1	1	0	0	1	9
	SUARA SAH	288	306	274	180	167	283	294	243	197	282	193	148	149	3.004

Desa : Pameungpeuk Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	NasDem	7	7	5	6	10	60	32	8	12	23	10	13	3	12	2	13	223
2	PKB	37	4	3	19	25	4	53	21	8	17	45	7	60	86	11	27	427
3	PKS	58	4	2	16	5	9	5	20	56	29	13	14	12	19	8	9	279
4	PDI PERJUANGAN	29	1	16	12	19	12	12	22	5	14	11	5	7	27	6	9	207
5	GOLKAR	54	33	17	34	89	32	87	95	67	64	79	37	19	86	60	8	861
6	GERINDRA	16	22	8	28	29	17	14	19	11	60	6	7	28	16	11	20	312
7	DEMOKRAT	33	12	16	17	60	6	11	17	18	18	14	12	25	11	13	18	301
8	PAN	47	55	33	50	83	79	76	20	30	78	60	96	41	41	22	41	852
9	PPP	10	46	13	13	10	3	6	13	2	10	7	7	7	15	18	1	181
10	HANURA	4	6	8	3	6	5	3	4	5	4	3	4	9	2	0	15	81
14	PBB	4	14	4	0	7	1	4	2	2	0	3	5	4	8	0	4	62
15	PKPI	5	28	2	7	1	1	2	0	0	4	2	2	1	0	0	0	55
	SUARA SAH	304	232	127	205	344	229	305	241	216	321	253	209	216	323	151	165	3.841



Desa : Sirnabakti Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NasDem	2	11	32	18	5	8	3	24	0	5	3	4	3	118
2	PKB	2	59	78	116	6	66	20	0	9	92	37	33	12	530
3	PKS	11	9	4	2	10	1	2	6	0	9	6	11	27	98
4	PDI PERJUANGAN	12	36	7	4	9	14	11	7	6	11	2	10	9	138
5	GOLKAR	13	37	32	57	41	16	83	32	29	59	34	34	15	482
6	GERINDRA	1	20	7	3	12	1	8	7	1	5	4	15	10	94
7	DEMOKRAT	0	14	7	17	28	4	43	10	5	8	13	11	2	162
8	PAN	108	70	5	22	37	40	34	101	20	11	55	74	146	723
9	PPP	0	5	8	5	7	6	11	5	1	6	1	1	8	64
10	HANURA	1	6	2	2	12	1	8	2	0	2	1	2	3	42
14	PBB	0	4	1	1	2	9	15	0	0	2	2	3	3	42
15	PKPI	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
SUARA SAH		153	271	183	247	170	166	238	194	71	211	158	198	238	2.498

Tabel 5

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Pameungpeuk (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)

[Bukti P-9.(J-XI).20]

Kecamatan : Pameungpeuk Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI

NO	PARTAI POLITIK	BOJONG	BOJONG KIDUL	JATIMUL YA	MANCAG AHAR	MANDALA KASIH	PAAS	PAMENUN GPEUK	SIRNA BAKTI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NasDem	48	64	117	53	121	86	223	118	830
2	PKB	307	175	190	310	253	474	427	530	2.666
3	PKS	79	88	137	109	224	182	279	98	1.196
4	PDI PERJUANGAN	43	45	323	413	140	286	207	138	1.595
5	GOLKAR	151	254	433	423	478	590	861	482	3.672
6	GERINDRA	105	55	232	225	152	123	312	94	1.298
7	DEMOKRAT	45	194	200	255	292	175	301	162	1.624
8	PAN	388	304	742	612	1.071	806	852	723	5.498
9	PPP	74	37	57	54	124	92	181	64	683
10	HANURA	15	30	44	40	58	145	81	42	455
14	PBB	8	8	71	29	100	36	62	42	356
15	PKPI	7	18	6	7	4	9	55	5	111
SUARA SAH		1.270	1.272	2.552	2.530	3.017	3.004	3.841	2.498	19.984

Tabel 6

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan



Cisewu(Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)

[Bukti P-9.(J-XI).21]

Desa : Cikarang Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NasDem	4	4	32	10	16	10	5	4	10	32	127
2	PKB	8	7	8	50	27	10	20	15	11	8	164
3	PKS	10	3	9	9	7	28	17	8	3	9	103
4	PDI PERJUANGAN	22	24	25	12	7	24	23	16	36	25	214
5	GOLKAR	99	63	80	78	64	74	130	75	91	80	834
6	GERINDRA	15	10	48	25	21	22	28	17	39	48	273
7	DEMOKRAT	38	11	67	26	12	106	53	59	22	67	461
8	PAN	8	2	3	1	-	7	5	2	5	3	36
9	PPP	10	3	16	2	3	4	9	-	4	16	67
10	HANURA	13	7	11	16	53	9	15	18	14	11	167
14	PBB	3	2	2	10	5	2	5	3	4	2	38
15	PKPI	51	8	13	41	14	19	7	5	14	13	185
SUARA SAH		281	144	314	280	229	315	317	222	253	314	2.669

Desa : Cisewu Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NasDem	9	8	10	14	4	9	2	4	14	3	8	85
2	PKB	12	31	36	144	16	13	12	19	80	20	10	393
3	PKS	24	14	1	8	22	19	8	28	43	3	21	191
4	PDI PERJUANGAN	19	4	7	7	27	26	57	112	13	6	17	295
5	GOLKAR	102	111	110	114	123	236	165	125	78	160	80	1404
6	GERINDRA	47	29	20	27	11	26	16	11	5	14	40	246
7	DEMOKRAT	28	29	8	9	15	17	20	11	14	15	18	184
8	PAN	16	17	1	5	17	5	3	0	1	4	6	75
9	PPP	15	14	4	1	3	3	8	12	3	3	4	70
10	HANURA	8	14	13	3	9	7	12	8	1	10	12	97
14	PBB	17	1	1	1	2	3	0	0	2	0	2	29
15	PKPI	3	5	3	1	4	7	0	0	5	1	0	29
SUARA SAH		300	277	214	334	253	371	303	330	259	239	218	3098

Desa : Girimukti Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NasDem	15	5	12	13	45	7	7	10	114
2	PKB	12	7	6	20	13	4	13	9	84
3	PKS	4	6	6	17	3	2	0	1	39
4	PDI PERJUANGAN	10	7	7	26	11	21	28	5	115
5	GOLKAR	137	130	151	86	88	145	164	189	1.090
6	GERINDRA	32	42	40	94	9	10	22	15	264
7	DEMOKRAT	21	18	11	20	1	18	9	20	118
8	PAN	2	6	3	2	3	1	2	1	20
9	PPP	3	1	4	5	0	1	2	6	22
10	HANURA	16	1	9	3	8	10	6	16	69
14	PBB	7	0	0	2	0	4	2	1	16
15	PKPI	19	5	2	27	2	4	2	4	65
SUARA SAH		259	223	249	288	181	223	255	273	2.016



Desa : Karangsewu Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NasDem	9	7	7	25	5	53
2	PKB	27	59	13	27	10	136
3	PKS	24	6	7	10	6	53
4	PDI PERJUANGAN	24	17	31	17	19	108
5	GOLKAR	108	48	59	107	108	430
6	GERINDRA	8	12	3	14	22	59
7	DEMOKRAT	29	10	26	22	71	158
8	PAN	14	1	3	4	3	25
9	PPP	3	2	1	2	35	43
10	HANURA	29	3	3	41	23	99
14	PBB	2	1	26	-	2	31
15	PKPI	9	10	7	7	9	42
SUARA SAH		286	176	186	276	313	1.237

Desa : Mekarsewu Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NasDem	18	7	7	8	4	44
2	PKB	6	16	5	3	4	34
3	PKS	16	8	7	3	8	42
4	PDI PERJUANGAN	18	7	20	14	3	62
5	GOLKAR	180	51	83	131	102	547
6	GERINDRA	18	6	11	18	11	64
7	DEMOKRAT	23	45	10	10	8	96
8	PAN	20	26	9	10	2	67
9	PPP	2	0	8	4	0	14
10	HANURA	13	10	34	11	3	71
14	PBB	1	0	0	0	1	2
15	PKPI	2	0	6	1	1	10
SUARA SAH		315	176	194	212	146	1.053

Desa : Nyalindung Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NasDem	6	18	5	5	28	8	16	3	89
2	PKB	14	29	9	48	35	24	39	18	216
3	PKS	4	7	29	13	4	7	4	11	79
4	PDI PERJUANGAN	4	9	4	25	8	13	21	22	106
5	GOLKAR	150	186	77	80	93	69	168	70	893
6	GERINDRA	25	33	26	24	21	77	43	41	290
7	DEMOKRAT	11	9	8	14	5	11	21	8	87
8	PAN	3	7	3	3	3	4	1	1	25
9	PPP	9	12	4	2	4	2	9	3	45
10	HANURA	6	3	6	17	5	17	12	11	77
14	PBB	1	3	0	0	6	4	1	0	15
15	PKPI	1	1	1	3	3	8	2	2	21
SUARA SAH		234	317	172	234	215	244	337	190	1.943

Desa : Pamalayan Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NasDem	6	4	4	7	6	6	24	9	66
2	PKB	8	2	8	6	16	16	8	17	81
3	PKS	7	15	12	15	6	7	3	16	81
4	PDI PERJUANGAN	4	18	11	24	12	8	11	20	108
5	GOLKAR	132	143	149	49	89	143	105	105	915
6	GERINDRA	27	14	11	10	5	23	25	29	144
7	DEMOKRAT	0	6	8	13	13	9	14	34	97
8	PAN	3	6	6	48	8	6	4	8	89
9	PPP	2	2	2	12	2	3	10	10	43
10	HANURA	23	24	23	19	5	11	6	20	131
14	PBB	0	4	2	1	36	1	0	2	46
15	PKPI	0	3	3	3	1	6	7	1	24
SUARA SAH		212	241	239	207	199	239	217	271	1.825

Desa : Pangalih Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NasDem	40	18	11	8	27	18	16	138
2	PKB	23	13	22	12	4	27	6	107
3	PKS	27	14	54	35	13	23	19	185
4	PDI PERJUANGAN	16	21	17	21	14	23	13	125
5	GOLKAR	45	102	144	118	115	97	47	668
6	GERINDRA	20	19	11	10	9	9	3	81
7	DEMOKRAT	9	15	17	14	2	8	9	74
8	PAN	3	8	10	7	2	8	28	66
9	PPP	73	21	19	9	16	1	6	145
10	HANURA	10	53	37	31	92	6	29	258
14	PBB	53	2	5	3	2	1	0	66
15	PKPI	2	3	5	9	3	5	0	27
SUARA SAH		321	289	352	277	299	226	176	1.940



Desa : Sukajaya Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat XI
Pemilihan
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NasDem	14	43	16	8	12	3	5	3
2	PKB	8	43	8	50	137	57	71	13
3	PKS	3	4	19	16	13	17	27	4
4	PDI PERJUANGAN	7	13	7	64	5	13	23	20
5	GOLKAR	64	97	154	100	121	69	88	149
6	GERINDRA	11	7	71	38	16	7	7	4
7	DEMOKRAT	7	7	11	17	15	10	15	8
8	PAN	1	4	24	14	20	2	4	5
9	PPP	3	2	12	15	7	4	12	27
10	HANURA	144	46	49	54	19	26	41	53
14	PBB	1	1	2	1	2	2	3	3
15	PKPI	2	2	4	2	2	8	3	14
SUARA SAH		265	269	377	379	369	218	299	303

Tabel 7

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Cisewu (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)

[Bukti P-9.(J-XI).21]

Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI

No	PARTAI POLITIK	CIKARANG	CISEWU	GIRIMUKTI	KARANG SEWU	MEKAR SEWU	NYALINDUNG	PAMALAYAN	PANGGALIH	SUKAJAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PARTAI NASDEM	127	85	114	53	44	112	98	138	118	889
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	164	393	84	136	34	241	109	107	457	1,725
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	103	191	39	53	42	80	95	185	131	919
4	PDI PERJUANGAN	214	295	115	108	62	109	148	125	192	1,368
5	PARTAI GOLKAR	834	1,404	1,090	430	547	952	992	668	1,050	7,967
6	PARTAI GERINDRA	273	246	264	59	64	314	158	81	187	1,646
7	PARTAI DEMOKRAT	461	184	118	158	96	104	115	74	145	1,455
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	36	75	20	25	67	30	97	66	92	508
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	67	70	22	43	14	49	91	145	106	607
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	167	97	69	99	71	79	152	258	529	1,521
14	PARTAI BULAN BINTANG	38	29	16	31	2	34	52	66	16	284
15	PKPI	185	29	65	42	10	29	30	27	55	472
SUARA SAH		2,669	3,098	2,016	1,237	1,053	2,133	2,137	1,940	3,078	19,361



Tabel 8

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan BL. Limbangan (Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)

[Bukti P-9.(J-XI).22]

Desa : Cigagade Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NasDem	4	6	2		3	4	7	2	10	16	54
2	PKB	56	44	156	113	17	47	19	76	66	55	649
3	PKS	7	7	51	12	4	12	20	28	43	4	188
4	PDI PERJUANGAN	9	26	7	3	15	10	42	23	51	20	206
5	GOLKAR	17	16	24	3	19	9	13	11	20	10	142
6	GERINDRA	7	11	11	4	23	15	7	4	6	10	98
7	DEMOKRAT	19	27	86	20	143	43	106	33	13	34	524
8	PAN	10	7	2	4	6	14	9	9	4	2	67
9	PPP	15	26	27	4	10	2	2	16	15	58	175
10	HANURA	8	20	3	23	8	22	18	13	4	9	128
14	PBB	-	1	1	-	2	1	1	3	1	-	10
15	PKPI	-	-	3	-	1	-	1	-	2	1	8
SUARA SAH		152	191	373	186	251	179	245	218	235	219	2,249

Desa : Cijolang Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NasDem	4	9	2	11	4	6	16	17	13	2	-	84
2	PKB	51	71	131	147	149	30	25	8	10	59	136	817
3	PKS	78	6	11	8	12	28	12	14	4	3	9	185
4	PDI PERJUANGAN	58	23	30	24	17	10	3	15	9	35	7	231
5	GOLKAR	37	30	13	9	14	9	13	34	16	7	5	187
6	GERINDRA	25	28	9	22	6	8	26	12	9	3	4	152
7	DEMOKRAT	31	12	9	7	10	21	69	67	15	3	13	257
8	PAN	5	1	4	7	9	7	9	16	2	1	7	68
9	PPP	8	53	20	51	26	85	48	29	6	7	46	379
10	HANURA	20	29	6	11	6	39	90	76	79	2	10	368
14	PBB	2	5	1	2	1	2	3	15	3	2	-	36
15	PKPI	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	7
SUARA SAH		322	268	236	299	254	246	315	303	166	124	238	2,771

Desa : Ciwangi Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Pemilihan XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NasDem	9	8	14	38	4	7	7	5	7	9	6	9	4	127	
2	PKB	49	39	23	28	24	146	146	75	37	39	46	131	15	798	
3	PKS	15	5	12	18	2	8	8	11	1	8	4	9	3	104	
4	PDI PERJUANGAN	15	18	5	15	7	13	13	18	1	6	3	11	3	128	
5	GOLKAR	58	34	37	81	35	17	17	22	2	14	23	40	6	386	
6	GERINDRA	14	12	10	10	11	16	16	17	3	18	10	17	5	159	
7	DEMOKRAT	38	39	34	19	42	12	12	69	7	96	18	6	18	410	
8	PAN	6	7	7	5	-	3	3	4	1	1	3	6	6	52	
9	PPP	26	20	25	31	20	9	1	8	3	3	2	107	7	262	
10	HANURA	53	83	111	47	82	32	27	42	123	111	27	101	57	896	
14	PBB	1	3	4	1	-	2	1	-	3	5	4	2	-	26	
15	PKPI	6	12	-	1	1	1	1	1	1	8	-	6	9	47	
SUARA SAH		290	280	282	294	228	266	252	272	189	318	146	445	133	3.395	

Desa : Dunguswiru Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat
Pemilihan XI

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NasDem	2	22	16	12	11	8	1	5	77	
2	PKB	10	64	19	44	14	15	12	6	184	
3	PKS	5	5	88	18	20	14	3	28	181	
4	PDI PERJUANGAN	8	18	28	-	43	37	6	28	168	
5	GOLKAR	7	33	20	25	16	73	19	-	193	
6	GERINDRA	24	25	6	14	24	5	5	-	103	
7	DEMOKRAT	32	42	54	69	61	65	40	-	363	
8	PAN	102	2	7	8	9	5	4	-	137	
9	PPP	29	28	25	27	11	23	3	2	148	
10	HANURA	-	14	19	29	25	23	98	-	208	
14	PBB	-	1	6	5	4	-	1	-	17	
15	PKPI	-	5	1	-	-	-	-	-	6	
SUARA SAH		219	259	289	251	238	268	192	69	1.785	

Desa : Galihpakuwon Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat
Pemilihan XI

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NasDem	2	3	4	1	8	7	7	3	1	7	43	
2	PKB	-	15	28	25	4	18	20	26	10	30	176	
3	PKS	-	11	1	1	8	9	5	8	9	8	60	
4	PDI PERJUANGAN	-	14	10	75	116	43	31	42	35	14	380	
5	GOLKAR	-	22	111	34	21	43	26	19	34	20	330	
6	GERINDRA	-	18	8	3	9	14	12	8	14	10	96	
7	DEMOKRAT	-	7	8	31	19	60	33	27	37	10	232	
8	PAN	-	1	21	36	6	2	5	3	8	3	85	
9	PPP	17	27	3	6	28	11	18	12	10	7	139	
10	HANURA	-	21	35	16	45	43	63	113	138	93	567	
14	PBB	-	-	5	6	2	-	3	-	3	-	19	
15	PKPI	-	-	-	-	-	5	1	7	2	12	27	
SUARA SAH		19	139	234	234	266	255	224	268	301	214	2.154	

Desa : Limbangan Barat Kabupaten : Garut Daerah : Jawa Barat
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat
Pemilihan XI



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NasDem	2	1	2	1	28	3	2	2	4	7	3	55	
2	PKB	16	10	17	45	47	17	30	81	82	14	12	371	
3	PKS	5	5	11	4	2	4	6	7	3	3	6	56	
4	PDI PERJUANGAN	16	9	13	4	2	5	4	9	10	9	5	86	
5	GOLKAR	22	13	23	11	6	38	15	5	11	17	6	167	
6	GERINDRA	20	11	13	16	13	20	8	6	14	16	10	147	
7	DEMOKRAT	139	186	65	79	111	140	-	106	65	84	128	1.103	
8	PAN	15	4	7	4	1	4	-	13	15	3	3	69	
9	PPP	25	28	24	95	39	41	114	70	52	50	16	554	
10	HANURA	34	8	4	13	19	12	6	6	33	12	8	155	
14	PBB	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	7	
15	PKPI	4	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	9	
SUARA SAH		300	277	179	273	268	287	186	305	289	217	198	2.779	

Desa : Limbangan Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Tengah Pemilihan Barat XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NasDem	1	1	11	1	5	3	7	20	5	26	3	83	
2	PKB	9	69	40	28	26	41	18	23	3	13	52	322	
3	PKS	2	6	16	7	8	8	11	7	1	5	4	75	
4	PDI PERJUANGAN	5	24	24	2	9	30	10	28	5	12	20	169	
5	GOLKAR	14	25	31	10	41	16	16	34	14	4	44	249	
6	GERINDRA	5	10	29	10	11	16	24	15	12	4	16	152	
7	DEMOKRAT	14	122	82	45	42	101	45	19	12	53	58	593	
8	PAN	-	59	6	-	7	15	15	2	2	1	13	120	
9	PPP	28	16	11	6	5	15	27	12	20	2	35	177	
10	HANURA	3	18	45	119	49	53	122	100	84	34	31	658	
14	PBB	1	-	1	1	2	-	1	1	1	1	2	11	
15	PKPI	-	1	12	1	1	1	1	7	1	1	-	26	
SUARA SAH		82	351	308	230	206	299	297	268	160	156	278	2.635	

Desa : Limbangan Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Timur Pemilihan Barat XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NasDem	14	10	14	23	1	2	11	-	3	7	4	2	5	3	10	109	
2	PKB	8	17	11	13	7	34	8	6	15	7	9	26	4	36	16	217	
3	PKS	7	3	3	5	5	30	15	-	4	5	2	13	6	2	1	101	
4	PDI PERJUANGAN	17	22	29	6	24	4	14	9	9	13	12	10	5	4	19	197	
5	GOLKAR	31	13	38	51	18	6	32	20	15	53	16	34	17	5	15	364	
6	GERINDRA	17	12	17	7	-	2	20	7	9	12	18	8	8	5	15	157	
7	DEMOKRAT	49	20	19	53	46	26	19	13	21	49	86	-	25	3	24	453	
8	PAN	4	-	1	6	-	3	5	1	1	2	6	5	2	1	2	39	
9	PPP	8	8	10	39	2	10	5	5	8	4	41	34	7	7	7	195	
10	HANURA	176	67	45	121	151	117	141	92	154	90	68	73	10	140	40	1.485	
14	PBB	-	-	-	-	-	3	-	1	-	117	-	-	1	2	-	124	
15	PKPI	2	3	7	1	2	1	2	1	1	4	1	1	-	1	6	33	
SUARA SAH		333	175	194	325	256	238	272	155	240	363	263	206	90	209	155	3.474	



Desa : Neglasari Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NasDem	2	3	2	1	9	5	5	3	3	17	3	12	65	
2	PKB	37	35	90	51	48	91	5	17	17	80	104	77	652	
3	PKS	11	13	17	9	11	7	3	7	7	3	12	6	106	
4	PDI PERJUANGAN	14	38	18	11	19	16	24	7	7	18	7	4	183	
5	GOLKAR	9	31	10	27	23	20	22	26	26	12	5	4	215	
6	GERINDRA	17	12	11	19	23	20	17	21	21	11	5	1	178	
7	DEMOKRAT	36	24	6	19	43	40	94	23	23	25	8	4	345	
8	PAN	4	4	-	9	3	8	7	4	4	2	5	-	50	
9	PPP	36	5	22	27	40	40	21	64	64	51	56	56	482	
10	HANURA	54	32	36	37	23	35	29	15	15	7	13	4	300	
14	PBB	5	7	2	1	1	1	1	1	1	3	-	1	24	
15	PKPI	3	1	-	2	2	13	2	3	3	2	-	2	33	
SUARA SAH		228	205	214	213	245	296	230	191	191	231	218	171	2.633	

Desa : Pangeureunan Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	NasDem	1	3	14	16	9	14	7	11	10	5	90	
2	PKB	144	100	23	55	30	63	29	27	9	13	493	
3	PKS	15	23	2	5	4	7	-	4	4	3	67	
4	PDI PERJUANGAN	15	12	22	20	6	33	11	19	6	15	159	
5	GOLKAR	22	51	33	15	24	30	4	14	64	76	333	
6	GERINDRA	6	17	18	21	12	17	15	8	11	17	142	
7	DEMOKRAT	29	65	18	25	44	56	9	30	53	32	361	
8	PAN	7	10	1	2	3	6	3	3	2	2	39	
9	PPP	46	4	2	5	9	4	1	2	3	1	77	
10	HANURA	32	30	166	108	38	73	133	70	83	63	796	
14	PBB	2	5	4	6	-	9	2	-	3	3	34	
15	PKPI	4	3	4	-	1	4	1	-	22	1	40	
SUARA SAH		323	323	307	278	180	316	215	188	270	231	2.631	

Desa : Pasirwaru Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat



NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NasDem	1	6	13	14	3	1	5	1	3	4	6	5	62	
2	PKB	9	13	22	7	12	99	13	48	58	43	26	73	423	
3	PKS	2	4	46	5	13	2	1	5	3	39	9	18	147	
4	PDI PERJUANGAN	5	2	7	5	9	16	7	3	9	7	3	3	76	
5	GOLKAR	14	6	25	7	32	10	18	10	10	20	8	16	176	
6	GERINDRA	5	10	9	2	19	8	22	5	9	7	3	3	102	
7	DEMOKRAT	141	17	35	41	55	26	73	27	35	75	46	176	747	
8	PAN	2	1	19	1	18	1	1	3	3	1	-	7	57	
9	PPP	28	14	14	2	5	4	-	32	54	27	10	35	225	
10	HANURA	3	115	105	154	145	37	65	38	49	59	5	12	787	
14	PBB	1	2	-	1	2	-	-	2	2	1	1	5	17	
15	PKPI	-	2	2	-	1	1	-	-	2	1	-	1	10	
SUARA SAH		211	192	297	239	314	205	205	174	237	284	117	354	2.829	

Desa : Simpenkaler Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NasDem	8	9	4	3	16	3	5	4	3	6	4	65	
2	PKB	8	4	2	4	7	13	27	12	42	39	49	207	
3	PKS	4	5	1	4	4	1	9	7	6	4	1	46	
4	PDI PERJUANGAN	52	124	1	175	56	205	59	26	5	12	42	757	
5	GOLKAR	47	37	-	13	61	49	26	20	8	10	17	288	
6	GERINDRA	14	8	-	3	8	6	16	15	2	8	6	86	
7	DEMOKRAT	28	31	33	18	22	20	38	73	1	31	20	315	
8	PAN	35	5	2	3	4	5	33	80	82	13	23	285	
9	PPP	34	5	7	1	-	2	21	49	11	55	24	209	
10	HANURA	20	44	20	36	66	16	29	34	7	37	52	361	
14	PBB	8	-	1	1	5	-	3	4	6	17	9	54	
15	PKPI	2	2	-	1	1	1	2	2	-	-	-	11	
SUARA SAH		260	274	71	262	250	321	268	326	173	232	247	2.684	

Desa : Simpenkidul Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NasDem	11	8	2	10	9	9	11	8	8	13	12	101	
2	PKB	31	65	52	7	19	79	17	69	63	26	29	457	
3	PKS	13	21	12	11	33	2	4	12	11	7	12	138	
4	PDI PERJUANGAN	31	29	61	57	32	19	28	12	17	31	30	347	
5	GOLKAR	48	45	19	13	30	31	88	36	25	51	40	426	
6	GERINDRA	15	12	15	5	15	13	10	18	9	17	16	145	
7	DEMOKRAT	34	56	33	52	26	15	19	44	45	32	38	394	
8	PAN	3	11	6	7	2	-	3	4	3	7	6	52	
9	PPP	20	11	5	5	17	11	6	59	37	32	32	235	
10	HANURA	76	38	44	42	36	30	71	35	46	61	37	516	
14	PBB	7	13	2	4	1	4	2	10	4	1	8	56	
15	PKPI	5	-	-	-	3	-	-	20	1	1	3	33	
SUARA SAH		294	309	251	213	223	213	259	327	269	279	263	2.900	



Desa : Surabaya Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NasDem	3	1	14	9	7	11	2	3	50	
2	PKB	32	30	15	24	39	34	28	42	244	
3	PKS	8	14	11	2	6	2	5	28	76	
4	PDI PERJUANGAN	8	3	10	5	10	1	1	5	43	
5	GOLKAR	11	11	7	27	2	27	7	4	96	
6	GERINDRA	2	3	8	8	7	8	3	-	39	
7	DEMOKRAT	29	10	52	18	48	10	8	6	181	
8	PAN	1	-	-	-	5	2	6	3	17	
9	PPP	74	75	65	63	43	86	59	19	484	
10	HANURA	107	106	18	34	18	109	65	150	607	
14	PBB	2	-	1	8	3	1	1	14	30	
15	PKPI	3	10	3	-	3	1	2	-	22	
SUARA SAH		280	263	204	198	191	292	187	274	1,889	

Tabel 9

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan BL. Limbangan. (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut **PEMOHON**)

[Bukti P-9.(J-XI).22]

Kecamatan : BL. Limbangan Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI

NO	PARTAI POLITIK	CIGAGADE	CIOLOANG	CIWANGI	DUNGSWIRU	GALIH PAKIWON	LIMBANGAN BARAT	LIMBANGAN TENGAH	LIMBANGAN TIMUR	NEGLASARI	PANGUREUNAN	PASIR WARU	SIMPEN KALER	SIMPEN KIDUL	SURABAYA	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NasDem	54	84	127	77	43	55	83	109	65	90	62	65	101	50	1.065	
2	PKB	649	817	798	184	176	371	322	217	652	493	423	207	457	244	6.010	
3	PKS	188	185	104	181	60	56	75	101	106	67	147	46	138	76	1.530	
4	PDI PERJUANGAN	206	231	128	168	380	86	169	197	183	159	76	757	347	43	3.130	
5	GOLKAR	142	187	386	193	330	167	249	364	215	333	176	288	426	96	3.552	
6	GERINDRA	98	152	159	103	96	147	152	157	178	142	102	86	145	39	1.756	
7	DEMOKRAT	524	257	410	363	232	1.103	593	453	345	361	747	315	394	181	6.278	
8	PAN	67	68	52	137	85	69	120	39	50	39	57	285	52	17	1.137	
9	PPP	175	379	262	148	139	554	177	195	482	77	225	209	235	484	3.741	
10	HANURA	128	368	896	208	567	155	658	1.485	300	796	787	361	516	607	7.832	
14	PBB	10	36	26	17	19	7	11	124	24	34	17	54	56	30	465	
15	PKPI	8	7	47	6	27	9	26	33	33	40	10	11	33	22	312	
SUARA SAH		2.249	2.771	3.395	1.785	2.154	2.779	2.635	3.474	2.633	2.631	2.829	2.684	2.900	1.889	36.808	

**Tabel 10**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Selaawi(Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)

[Bukti P-9.(J-XI).23]

Desa : Cigawir Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : Selaawi Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NasDem	25	16	-	7	8	18	17	19	28	2	140
2	PKB	19	18	21	10	15	4	89	58	35	46	315
3	PKS	5	9	24	10	5	8	49	17	8	11	146
4	PDI PERJUANGAN	60	30	16	12	25	59	9	9	15	10	245
5	GOLKAR	36	27	8	66	73	48	23	29	46	33	389
6	GERINDRA	21	22	3	16	12	17	14	25	13	6	149
7	DEMOKRAT	51	29	61	10	14	49	31	67	41	30	383
8	PAN	5	2	1	2	1	34	12	5	7	1	70
9	PPP	8	4	50	7	7	8	19	20	37	9	169
10	HANURA	27	35	24	102	36	69	74	40	25	52	484
14	PBB	1	-	-	-	2	7	7	2	2	2	23
15	PKPI	12	2	15	7	1	4	4	2	1	13	61
SUARA SAH		270	194	223	249	199	325	348	293	258	215	2,574

Desa : Cirapuhan Kabupaten : Garut Daerah : Jawa
Pemilihan Barat XI
Kecamatan : Selaawi Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	NasDem	3	3	2	5	7	6	7	1	6	2	5	7	2	4	5	2	5	8	5	4	89
2	PKB	21	23	47	23	90	83	47	26	9	19	27	13	14	11	17	29	13	13	9	22	556
3	PKS	14	11	7	25	8	10	9	14	13	12	6	2	3	9	4	3	4	7	22	10	193
4	PDI PERJUANGAN	24	9	38	43	29	19	17	11	21	9	9	28	27	34	36	24	17	27	8	22	452
5	GOLKAR	11	4	5	13	9	22	15	18	16	20	18	28	5	19	19	6	58	10	56	30	382
6	GERINDRA	20	9	7	14	7	5	9	12	9	8	8	6	6	7	11	5	10	10	8	15	186
7	DEMOKRAT	41	97	17	26	12	36	49	87	28	29	36	16	35	23	40	19	51	29	14	44	729
8	PAN	7	8	3	23	1	1	1	1	5	2	3	0	0	2	0	0	1	2	0	7	67
9	PPP	46	43	32	52	15	23	19	26	14	23	60	20	16	20	35	70	25	29	17	32	617
10	HANURA	9	3	5	11	25	20	17	9	37	11	7	10	7	2	8	9	4	28	80	32	334
14	PBB	4	5	1	0	2	1	2	3	0	2	0	1	2	3	2	1	1	0	0	1	31
15	PKPI	0	0	4	0	0	0	1	1	1	0	1	4	5	0	9	1	6	13	0	0	46
SUARA SAH		200	215	168	235	205	226	193	209	159	137	180	135	122	134	186	169	195	176	219	219	3682



Desa : Mekarsari Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Selaawi Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NasDem	8	5	16	5	33	34	12	9	9	31	18	12	192
2	PKB	36	17	19	6	50	42	32	30	27	12	12	16	299
3	PKS	8	1	4	14	14	21	41	13	20	77	101	27	341
4	PDI PERJUANGAN	8	4	6	1	37	34	12	7	12	6	1	3	131
5	GOLKAR	15	22	9	12	16	19	12	17	22	35	4	6	189
6	GERINDRA	5	4	6	93	4	3	6	8	6	2	4	2	143
7	DEMOKRAT	9	25	20	11	11	8	8	8	23	42	-	6	171
8	PAN	3	3	7	23	2	2	2	9	6	3	1	1	62
9	PPP	64	58	34	16	29	17	10	63	47	21	21	63	443
10	HANURA	113	60	66	42	21	26	30	21	46	17	11	34	487
14	PBB	-	2	2	2	-	1	1	-	-	-	1	2	11
15	PKPI	4	17	29	2	6	5	3	8	10	3	9	2	98
SUARA SAH		273	218	218	227	223	212	169	193	228	249	183	174	2,567

Desa : Pelitaasih Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Selaawi Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NasDem	7	23	17	3	5	8	23	7	93
2	PKB	71	77	62	48	11	19	22	18	328
3	PKS	17	19	5	14	8	9	5	4	81
4	PDI PERJUANGAN	29	27	12	8	12	22	28	25	163
5	GOLKAR	29	29	32	63	49	50	31	44	327
6	GERINDRA	5	10	7	4	12	17	14	7	76
7	DEMOKRAT	32	40	36	56	70	56	45	39	374
8	PAN	2	6	2	0	11	24	11	19	75
9	PPP	12	9	23	29	12	7	11	14	117
10	HANURA	7	11	7	10	14	23	28	76	176
14	PBB	0	0	1	0	1	1	1	0	4
15	PKPI	3	6	2	2	4	1	3	0	21
SUARA SAH		214	257	206	237	209	237	222	253	1835

Desa : Putrajawa Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Selaawi Provinsi : Jawa Barat



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NasDem	4	7	7	5	3	1	8	3	5	4	1	3	0	4		55
2	PKB	24	63	25	132	120	145	74	123	114	176	50	42	53	24		1165
3	PKS	12	3	9	8	33	52	8	8	8	20	4	4	4	12		185
4	PDI PERJUANGAN	9	4	10	6	7	7	21	19	1	13	10	7	33	9		156
5	GOLKAR	22	20	18	17	17	17	37	15	12	12	23	3	46	22		281
6	GERINDRA	8	57	9	6	5	8	3	2	8	4	6	2	9	8		135
7	DEMOKRAT	78	29	43	14	24	24	30	15	12	15	42	7	43	78		454
8	PAN	6	6	200	16	3	1	26	10	21	12	45	2	9	6		363
9	PPP	21	10	2	14	9	9	20	58	15	5	46	8	5	21		243
10	HANURA	24	59	13	15	12	11	13	4	7	22	12	62	16	84		354
14	PBB	0	0	0	1	3	1	3	0	1	1	0	1	1	0		12
15	PKPI	5	4	26	5	10	6	5	5	3	16	2	2	13	5		107
SUARA SAH		213	262	362	239	246	282	248	262	207	300	241	143	232	273		3.510

Desa : Samida Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Selaawi Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NasDem	8	17	6	13	4	11	18	11	42	8		138
2	PKB	64	114	67	62	24	38	116	110	40	57		692
3	PKS	14	17	6	95	19	10	37	10	9	12		229
4	PDI PERJUANGAN	27	34	32	18	17	22	22	27	10	26		235
5	GOLKAR	87	40	114	18	10	28	15	16	14	16		358
6	GERINDRA	9	14	13	21	6	3	4	6	6	6		88
7	DEMOKRAT	21	23	16	15	73	74	21	25	7	14		289
8	PAN	7	7	1	1	1	3	2	0	0	1		23
9	PPP	44	25	17	21	24	30	16	12	26	30		245
10	HANURA	12	3	8	7	7	3	7	8	4	5		64
14	PBB	3	2	2	3	1	0	0	0	0	1		12
15	PKPI	10	4	14	1	0	3	1	2	13	1		49
SUARA SAH		306	300	296	275	186	225	259	227	171	177		2.422

Desa : Selaawi Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Selaawi Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NasDem	9	3	28	8	6	10	5	9	3	12		93
2	PKB	38	35	8	56	95	15	11	35	50	68		411
3	PKS	54	14	11	14	14	16	5	25	16	12		181
4	PDI PERJUANGAN	33	22	2	12	5	23	10	19	12	21		159
5	GOLKAR	62	70	6	39	46	33	9	22	15	16		318
6	GERINDRA	15	3	53	5	3	10	8	8	7	17		129
7	DEMOKRAT	23	29	7	15	16	13	4	34	49	27		217
8	PAN	5	14	3	5	5	3	7	7	1	4		54
9	PPP	38	7	30	28	35	29	5	66	108	108		454
10	HANURA	30	29	17	13	27	92	11	39	11	62		331
14	PBB	5	2	1	-	2	2	5	4	1	-		22
15	PKPI	4	8	2	5	6	7	10	4	3	6		55
SUARA SAH		316	236	168	200	260	253	90	272	276	353		2.424



NO	PARTAI POLITIK	CIGEDUG	PAMEUNGPEUK	CISEWU	BL. LIMBANGAN	SELAWI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Partai NasDem	590	830	889	1,065	800	4,174
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,897	2,666	1,725	6,010	3,766	17,064
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,060	1,196	919	1,530	1,356	6,061
4	PDI PERJUANGAN	808	1,595	1,368	3,130	1,541	8,442
5	PARTAI GOLKAR	2,653	3,672	7,967	3,552	2,244	20,088
6	PARTAI GERINDRA	1,055	1,298	1,646	1,756	906	6,661
7	PARTAI DEMOKRAT	933	1,624	1,455	6,278	2,617	12,907
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,505	5,498	508	1,137	714	10,362
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,490	683	607	3,741	2,288	10,809
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1,386	455	1,521	7,832	2,230	13,424
14	PARTAI BULAN BINTANG	238	356	284	465	115	1,458
15	PKPI	80	111	472	312	437	1,412
TOTAL PEROLEHAN SUARA		17,695	19,984	19,361	36,808	19,014	112,862

Tabel 13

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut. (Berdasarkan Model DA 1 DPR Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR yang Dilakukan Oleh **TERMOHON** di Tingkat Kecamatan)

[Bukti P-9.(J-XI).14 s.d 18]

Kabupaten : Garut

Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI

Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	CIGEDUG	PAMEUNGPEUK	CISEWU	BL. LIMBANGAN	SELAWI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Partai NasDem	593	844	890	1,095	784	4,206
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,921	2,759	1,714	6,152	3,959	17,505
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,067	1,172	917	1,556	1,277	5,989
4	PDI PERJUANGAN	828	1,650	1,382	3,267	1,603	8,730
5	PARTAI GOLKAR	2,596	3,816	7,988	3,719	2,286	20,405
6	PARTAI GERINDRA	954	1,331	1,631	1,768	728	6,412
7	PARTAI DEMOKRAT	931	1,694	1,454	6,571	2,655	13,305
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,596	5,616	515	1,173	684	10,584
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3,261	636	568	3,715	2,285	10,465
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1,340	455	1,583	8,085	2,279	13,742
14	PARTAI BULAN BINTANG	242	356	237	456	112	1,403
15	PKPI	79	86	461	314	427	1,367
TOTAL PEROLEHAN SUARA		17,408	20,415	19,340	37,871	19,079	114,113

Tabel 14

Perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut Antara



TERMOHON dan PEMOHON.(Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Dilakukan Oleh **TERMOHON** di Tingkat Kecamatan dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut **PEMOHON**)
[Bukti P-9.(J-XI).8 dan 14 s.d 23]

Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	CIGEDUG			PAMEUNPEUK			CISEWU			BL LIMBANGAN			SELAWI		
		T	P	SELISIH	T	P	SELISIH	T	P	SELISIH	T	P	SELISIH	T	P	SELISIH
1	Partai Nas Dem	593	590	3	844	830	14	890	889	1	1.095	1065	30	784	800	(16)
2	PKB	2.921	2897	24	2.759	2.666	93	1.714	1.725	(11)	6.152	6010	142	3.959	3766	193
3	PKS	1.067	1060	7	1.172	1.196	(24)	917	919	(2)	1.556	1530	26	1.277	1356	(79)
4	PDI PERJUANGAN	828	808	20	1.650	1.595	55	1.382	1.368	14	3.267	3130	137	1.603	1541	62
5	PARTAI GOLKAR	2.596	2653	(57)	3.816	3.672	144	7.988	7.967	21	3.719	3552	167	2.286	2244	42
6	PARTAI GERINDRA	954	1055	(101)	1.331	1.298	33	1.631	1.646	(15)	1.768	1756	12	728	906	(178)
7	PARTAI DEMOKRAT	931	933	(2)	1.694	1.624	70	1.454	1.455	(1)	6.571	6278	293	2.655	2617	38
8	PAN	2.596	2505	91	5.616	5.498	118	515	508	7	1.173	1137	36	684	714	(30)
9	PPP	3.261	3490	(229)	636	683	(47)	568	607	(39)	3.715	3741	(26)	2.285	2288	(3)
10	HANURA	1.340	1386	(46)	455	455	-	1.583	1.521	62	8.085	7832	253	2.279	2230	49
14	PBB	242	238	4	356	356	-	257	284	(47)	456	465	(9)	112	115	(3)
15	PKPI	79	80	(1)	86	111	(25)	461	472	(11)	314	312	2	427	437	(10)
	SUARA SAH	17.408	17.695	(287)	20.415	19.984	431	19.340	19.361	(21)	37.871	36.808	1.063	19.079	19.014	65

Keterangan:

T = Termohon (KPU)

P = Pemohon (PPP)

b). Bahwa selain itu, **PEMOHON** juga menemukan adanya **kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh Termohon** pada formulir Model C 1 TPS terhadap hasil penghitungan perolehan suara partai politik yang terjadi di 134 TPS, 68 Desa, Di 14 Kecamatan se-Kabupaten Garut, oleh karenanya telah dilakukan koreksi yang benar menurut **PEMOHON**, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik berikut ini:

Tabel 15

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut.(Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Di 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR yang Benar Menurut **PEMOHON**, Setelah Dilakukan Koreksi Terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Pada



Formulir Model C 1 TPS yang Terjadi Di 134 TPS, 68 Desa, Dari 14 Kecamatan Se-Kabupaten Garut

[Bukti P-9.(J-XI).36 s.d. 49]

Kabupaten : Garut

Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI

Provinsi : Jawa Barat

NO	PARTAI POLITIK	WANARAJA	LEUWIGOONG	BAYONGBONG	CISURUPAN	SUKARESMI	CIKAJANG	BANJARWANGI	PEUNDEUY
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	NasDem	1,601	738	1,778	2,329	732	2,338	1,209	1,325
2	PKB	2,337	2,166	5,132	8,621	2,497	5,247	5,876	3,146
3	PKS	1,965	1,069	4,022	5,195	2,086	2,742	1,674	560
4	PDI PERJUANGAN	2,221	3,495	4,440	2,701	906	2,991	1,655	366
5	GOLKAR	3,102	2,847	7,400	4,409	1,942	7,597	5,975	838
6	GERINDRA	939	1,807	2,831	2,803	1,213	3,180	1,097	209
7	DEMOKRAT	3,345	1,819	4,212	3,465	1,549	4,743	3,272	448
8	PAN	1,343	2,564	3,241	3,313	1,027	2,154	1,906	1,434
9	PPP	2,897	2,292	7,523	5,659	5,119	3,339	2,257	1,127
10	HANURA	1,151	1,128	1,971	3,294	490	2,504	1,305	278
14	PBB	790	225	841	1,023	134	1,286	512	409
15	PKPI	109	123	221	258	78	161	280	218
SUARA SAH		21,800	20,273	43,612	43,070	17,773	38,282	27,018	10,358

Pindahan

NO	PARTAI POLITIK	CIBALONG	BUNGBULANG	PAMULIHAN	TALEGONG	PANGATIKAN	CIHURIP	JUMLAH
		9	10	11	12	13	14	
1	NasDem	1,187	1,064	424	3,485	1,084	202	19496
2	PKB	3,992	4,223	606	1,456	2,537	2,023	49859
3	PKS	1,264	876	409	802	2,292	290	25246
4	PDI PERJUANGAN	2,232	3,019	1,140	1,268	963	1,561	28958
5	GOLKAR	4,357	8,766	1,905	5,112	2,697	1,780	58727
6	GERINDRA	1,258	1,550	911	1,050	1,009	398	20255
7	DEMOKRAT	1,650	2,038	1,021	686	1,517	697	30462
8	PAN	2,917	6,365	217	356	546	174	27557
9	PPP	1,614	773	402	335	3,813	669	37819
10	HANURA	735	1,176	1,685	714	426	424	17281
14	PBB	925	331	108	126	937	179	7826
15	PKPI	103	579	90	971	80	135	3406
SUARA SAH		22,234	30,760	8,918	16,361	17,901	8,532	326,892

Tabel 16

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut.(Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut **TERMOHON**, Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR)

[Bukti P-9.(J-XI).8 dan 24 s.d. 35]

Kabupaten : Garut

Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI

Provinsi : Jawa Barat



NO	PARTAI POLITIK	WANARAJA	LEUWIGOONG	BAYONGBONG	CISURUPAN	SUKARESMI	CIKAJANG	BANJARWANGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NasDem	1,601	739	1,778	2,476	732	2,338	1,239
2	PKB	2,337	2,206	5,133	9,742	2,529	5,247	6,033
3	PKS	1,965	1,070	4,027	5,438	2,086	2,742	1,713
4	PDIP	2,230	3,496	4,441	2,889	906	3,002	1,720
5	GOLKAR	3,202	2,877	7,432	4,507	1,945	7,597	6,228
6	GERINDRA	939	1,808	2,914	2,866	1,213	3,182	1,118
7	DEMOKRAT	3,355	1,823	4,212	3,606	1,560	4,753	3,367
8	PAN	1,343	2,617	3,299	3,455	1,033	2,154	2,150
9	PPP	2,897	2,282	7,523	5,452	5,119	3,322	2,099
10	HANURA	1,151	1,128	1,971	3,526	490	2,504	1,276
14	PBB	790	225	841	951	134	1,286	448
15	PKPI	109	123	221	148	78	161	191
SUARA SAH		21,919	20,394	43,792	45,056	17,825	38,288	27,582

7indahan

NO	PARTAI POLITIK	CIHURIP	PEUNDEUY	CIBALONG	BUNGBULANG	PAMULIHAN	TALEGONG	PANGATIKAN	JUMLAH
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.00	NasDem	219	1,328	1,187	1,064	424	3,485	1,084	19,694
2.00	PKB	2,468	3,146	4,032	4,223	611	1,456	2,534	51,697
3.00	PKS	284	560	1,265	877	410	802	2,292	25,531
4.00	PDIP	1,961	366	2,252	3,019	1,144	1,268	965	29,659
5.00	GOLKAR	1,923	838	4,371	8,768	1,968	5,124	2,704	59,484
6.00	GERINDRA	408	209	1,258	1,632	913	1,050	1,009	20,519
7.00	DEMOKRAT	723	448	1,651	2,049	1,035	686	1,517	30,785
8.00	PAN	194	1,435	2,917	6,377	269	356	546	28,145
9.00	PPP	384	1,125	1,584	773	401	335	3,813	37,109
10.00	HANURA	412	279	736	1,178	1,685	716	426	17,478
14.00	PBB	112	409	925	331	108	126	937	7,623
15.00	PKPI	96	218	103	579	90	971	80	3,168
SUARA SAH		9,184	10,361	22,281	30,870	9,058	16,375	17,907	330,892

Tabel 17

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut. (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut PEMOHON)

[Bukti P-9.(J-XI).19 s.d. 23 dan 36 s.d. 49]

NO	PARTAI POLITIK	CIGEDUG	PAMEUNGPEUK	CISEWU	BL LIMBANGAN	SELAWI	WANARAJA	LEUWIGOONG	BAYONGBONG	CISURUPAN	SUKARESMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	NasDem	590	830	889	1,065	800	1,601	738	1,778	2,329	732
2	PKB	2,897	2,666	1,725	6,010	3,766	2,337	2,166	5,132	8,621	2,497
3	PKS	1,060	1,196	919	1,530	1,356	1,965	1,069	4,022	5,195	2,086
4	PDIPERJUANGAN	808	1,595	1,368	3,130	1,541	2,221	3,495	4,440	2,701	906
5	GOLKAR	2,633	3,672	7,967	3,532	2,244	3,102	2,847	7,400	4,409	1,942
6	GERINDRA	1,055	1,298	1,646	1,756	906	939	1,807	2,831	2,803	1,213
7	DEMOKRAT	933	1,624	1,455	6,278	2,617	3,345	1,819	4,212	3,465	1,549
8	PAN	2,505	5,498	508	1,137	714	1,343	2,564	3,241	3,313	1,027
9	PPP	3,490	683	607	3,741	2,288	2,897	2,292	7,523	5,659	5,119
10	HANURA	1,386	455	1,521	7,832	2,230	1,151	1,128	1,971	3,294	490
14	PBB	238	336	284	465	115	790	225	841	1,023	134
15	PKPI	80	111	472	312	437	109	123	221	258	78
SUARA SAH		17,695	19,984	19,361	36,808	19,014	21,800	20,273	43,612	43,070	17,733

Pindahan



NO	PARTAI POLITIK	CIKAJANG	BANJARWANGI	PEUNDEUY	CIBALONG	BUNGBULANG	PAMULIHAN	TALEGONG	PANGATIKAN	CIHURIP	JUMLAH
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	NasDem	2338	1,209	1,325	1,187	1,064	424	3,485	1,084	202	23,670
2	PKB	5247	5,876	3,146	3,992	4,223	606	1,456	2,537	2,023	66,923
3	PKS	2,742	1,674	560	1,264	876	409	802	2,292	290	31,307
4	PDI PERJUANGAN	2,991	1,655	366	2,232	3,019	1,140	1,268	963	1,561	37,400
5	GOLKAR	7,597	5,975	838	4,357	8,766	1,905	5,112	2,697	1,780	78,815
6	GERINDRA	3,180	1,097	309	1,258	1,550	911	1,050	1,009	398	26,916
7	DEMOKRAT	4,743	3,272	448	1,630	2,038	1,021	686	1,517	697	43,369
8	PAN	2,154	1,906	1,434	2,917	6,365	217	356	546	174	37,919
9	PPP	3,339	2,257	1,127	1,614	773	402	335	3,813	669	48,628
10	HANURA	2,504	1,305	278	735	1,176	1,685	714	426	424	30,705
14	PBB	1,286	512	409	925	331	108	126	937	179	9,284
15	PKPI	161	280	218	103	579	90	971	80	135	4,818
	SUARA SAH	38,282	27,018	10,358	22,234	30,760	8,918	16,361	17,901	8,532	439,754

Tabel 18

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut

(Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut **TERMOHON**, Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR)

[Bukti P-9.(J-XI).8 dan 14 s.d. 18 dan 24 s.d. 35]

NO	PARTAI POLITIK	WANA	LEUWIG	BAYONGB	CIGEDUG	CISURUP	SUKARE	CIKAJA	BANJAR	CIHURIP	PEUNDEUY
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NasDem	1,601	739	1,778	593	2,476	732	2,338	1,239	219	1,328
2	PKB	2,337	2,206	5,133	2,921	9,742	2,529	5,247	6,033	2,468	3,146
3	PKS	1,965	1,070	4,027	1,067	5,438	2,086	2,742	1,713	284	560
4	PDI P	2,230	3,496	4,441	828	2,889	906	3,002	1,720	1,961	366
5	GOLKAR	3,202	2,877	7,432	2,596	4,507	1,945	7,597	6,228	1,923	838
6	GERINDRA	939	1,808	2,914	954	2,866	1,213	3,182	1,118	408	209
7	DEMOKRAT	3,355	1,823	4,212	931	3,606	1,560	4,753	3,367	723	448
8	PAN	1,343	2,617	3,299	2,596	3,455	1,033	2,154	2,150	194	1,435
9	PPP	2,897	2,282	7,523	3,261	5,452	5,119	3,322	2,099	384	1,125
10	HANURA	1,151	1,128	1,971	1,340	3,526	490	2,504	1,276	412	279
14	PBB	790	225	841	242	951	134	1,286	448	112	409
15	PKPI	109	123	221	79	148	78	161	191	96	218
	SUARA SAH	21,919	20,394	43,792	17,408	45,056	17,825	38,288	27,582	9,184	10,361

Pindahan

NO	PARTAI POLITIK	PAMEU NGPEU K	CIBALON G	BUNGBUL ANG	PAMULIHA N	CISEWU	TALEGO NG	BL LIMBAN GAN	SELAWI	PANGATIK AN	JUMLAH
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	NasDem	844	1,187	1,064	424	890	3,485	1,095	784	1,084	23,900
2	PKB	2,759	4,032	4,223	611	1,714	1,456	6,152	3,959	2,534	69,202
3	PKS	1,172	1,265	877	410	917	802	1,556	1,277	2,292	31,520
4	PDI P	1,650	2,252	3,019	1,144	1,382	1,268	3,267	1,603	965	38,389
5	GOLKAR	3,816	4,371	8,768	1,968	7,988	5,124	3,719	2,286	2,704	79,889
6	GERINDRA	1,331	1,258	1,632	913	1,631	1,050	1,768	728	1,009	26,931
7	DEMOKRAT	1,694	1,651	2,049	1,035	1,454	686	6,571	2,655	1,517	44,090
8	PAN	5,616	2,917	6,377	269	515	356	1,173	684	546	38,729
9	PPP	636	1,584	773	401	568	335	3,715	2,285	3,813	47,574
10	HANURA	455	736	1,178	1,685	1,583	716	8,085	2,279	426	31,220
14	PBB	356	925	331	108	237	126	456	112	937	9,026
15	PKPI	86	103	579	90	461	971	314	427	80	4,535
	SUARA SAH	20,415	22,281	30,870	9,058	19,340	16,375	37,871	19,079	17,907	445,005

**Tabel 19**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 42 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut menurut **PEMOHON**. (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut **PEMOHON**)
[Bukti P-9.(J-XI).19 s.d. 23 dan 36 s.d. 49]

NO	PARTAI POLITIK	CIGEDUG	PAMEUNGPEUK	CISEWU	BL LIMBANGAN	SELAWI	WANARAJA	LEUWIGONG	BAYONGBONG	CISURUPAN	SUKARESMI	CIKAJANG	BANJARWANGI	PEUNDEUY	CIBALONG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NasDem	590	830	889	1,065	800	1,601	738	1,778	2,329	732	2,338	1,209	1,325	1,187
2	PKB	2897	2,666	1,725	6,010	3,766	2,337	2,166	5,132	8,621	2,497	5,247	5,876	3,146	3,992
3	PKS	1060	1,196	919	1,530	1,356	1,965	1,069	4,022	5,195	2,086	2,742	1,674	560	1,264
4	PDI PERJUANGAN	808	1,595	1,368	3,130	1,541	2,221	3,495	4,440	2,701	906	2,991	1,655	366	2,232
5	GOLKAR	2653	3,672	7,967	3,552	2,244	3,102	2,847	7,400	4,409	1,942	7,597	5,975	838	4,357
6	GERINDRA	1055	1,298	1,646	1,756	906	939	1,807	2,831	2,803	1,213	3,180	1,097	209	1,258
7	DEMOKRAT	933	1,624	1,455	6,278	2,617	3,345	1,819	4,212	3,465	1,549	4,743	3,272	448	1,650
8	PAN	2505	5,498	508	1,137	714	1,343	2,564	3,241	3,313	1,027	2,154	1,906	1,434	2,917
9	PPP	3490	683	607	3,741	2,288	2,897	2,292	7,523	5,659	5,119	3,339	2,257	1,127	1,614
10	HANURA	1386	455	1,521	7,832	2,230	1,151	1,128	1,971	3,294	490	2,504	1,305	278	735
14	PBB	238	356	284	465	115	790	225	841	1,023	134	1,286	512	409	925
15	PKPI	80	111	472	312	437	109	123	221	258	78	161	280	218	103
SUARA SAH		17695	19,984	19,361	36,808	19,014	21,800	20,273	43,612	43,070	17,773	38,282	27,018	10,358	22,234

Pindahan

NO	PARTAI POLITIK	BUNGBULANG	PAMULIHAN	TALEONG	PANGATIKAN	CIHURIP	GARUTKOTA	KARANGPAWITAN	TARONGKALER	TARONGKIDUL	BANYURESMI	SAMARANG	PASIRWANGI	LELES	KADUNGORA
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	NasDem	1,064	424	3,485	1,084	202	2,538	2,939	2,041	1,828	1,466	1,399	1,363	1,141	1,064
2	PKB	4,223	606	1,456	2,537	2,023	8,777	8,808	5,973	7,152	7,616	5,856	4,922	2,654	4,440
3	PKS	876	409	802	2,292	290	3,592	4,021	4,107	6,113	4,424	3,231	2,834	2,768	2,474
4	PDI PERJUANGAN	3,019	1,140	1,268	963	1,561	10,038	6,357	5,563	5,415	3,743	3,424	3,731	9,425	9,483
5	GOLKAR	8,766	1,905	5,112	2,697	1,780	10,675	9,799	7,642	9,419	5,612	7,208	7,340	6,225	6,865
6	GERINDRA	1,530	911	1,050	1,009	398	4,790	3,224	2,991	3,570	2,803	1,846	2,445	2,576	2,487
7	DEMOKRAT	2,038	1,021	686	1,517	697	6,654	6,564	4,163	4,569	4,509	2,908	2,434	2,638	3,703
8	PAN	6,365	217	356	546	174	6,010	5,350	2,874	6,237	3,156	2,712	1,717	2,472	4,051
9	PPP	773	402	335	3,813	669	3,052	5,988	3,944	3,863	2,453	4,308	3,603	3,145	6,182
10	HANURA	1,176	1,685	714	426	424	3,752	3,162	2,821	1,594	1,759	1,805	994	1,598	1,591
14	PBB	331	108	126	937	179	2,071	2,484	854	2,525	2,874	530	713	1,445	621
15	PKPI	579	90	971	80	185	471	497	308	614	176	204	121	158	178
SUARA SAH		30,760	8,918	16,361	17,901	8,532	62,420	59,193	43,281	52,919	40,591	35,431	32,217	36,245	43,138

Pindahan

NO	PARTAI POLITIK	CIBATU	KERSAMANAH	MALANGBONG	SUKAWENING	KARANGTENGAH	CILAWU	SINGAJAYA	CISOMPET	CIKELET	MEKARUKTI	PAKANJENG	CARINGAN	CIBUK	SUCNARAJA	JUMLAH
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1	NasDem	1,359	462	1,870	1,380	300	2,318	1,482	3,098	874	421	1,243	583	538	1,013	56,390
2	PKB	3,000	1,227	6,141	4,032	1,314	4,879	4,825	5,078	3,752	1,265	4,026	1,866	2,664	1,559	168,749
3	PKS	2,341	1,499	3,193	1,736	613	3,481	1,446	2,105	945	319	1,876	438	1,123	1,302	87,308
4	PDI PERJUANGAN	4,085	1,584	5,222	1,710	757	6,444	1,609	1,840	1,600	1,108	5,947	1,553	576	1,552	130,166
5	GOLKAR	5,841	1,095	6,229	3,966	1,575	9,261	2,044	3,340	5,318	2,163	5,531	3,850	1,274	2,268	203,355
6	GERINDRA	3,257	837	5,818	1,080	298	4,239	1,379	1,545	1,218	351	2,833	764	804	858	78,929
7	DEMOKRAT	4,623	6,066	7,314	2,729	918	4,887	1,024	1,126	1,807	598	3,754	828	1,762	1,707	120,654
8	PAN	1,464	885	1,604	1,013	165	3,177	1,967	4,196	3,177	1,551	4,557	1,752	1,207	836	100,069
9	PPP	2,873	1,629	8,946	4,736	697	4,612	2,811	913	505	272	1,467	638	2,401	1,556	119,222
10	HANURA	2,400	1,567	4,653	572	289	5,848	910	1,005	744	376	1,913	2,566	1,493	525	74,642
14	PBB	575	361	987	863	294	1,237	392	1,486	878	127	761	369	251	362	32,344
15	PKPI	809	42	204	727	12	378	91	156	136	159	374	193	68	59	10,953
SUARA SAH		32,627	17,254	52,181	24,564	7,232	50,761	19,980	25,888	20,954	8,710	34,282	15,400	14,161	13,597	1,182,781

Tabel 20

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik 42 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut menurut **TERMOHON**. (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara



Partai Politik 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut **TERMOHON**,
Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR)

[Bukti P-9.(J-XI).8 dan 14 s.d. 18 dan 24 s.d. 35]

NO	PARTAI POLITIK	GARUT KOTA	KARANG AWITAN	WANA RAJA	TAROGONG KALER	TAROGONG KIDUL	BANYUR ESMI	SAMARANG	PASIR WANGI	LELES	KADUNGORA	LEUWIG OONG	CIBATU	KERSAM ANAH	MALANGB ONG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NasDem	2.538	2.939	1.601	2.041	1.828	1.466	1.399	1.363	1.141	1.064	739	1.359	462	1.870
2	PKB	8.777	8.808	2.337	5.973	7.152	7.616	5.856	4.922	2.654	4.440	2.206	3.000	1.227	6.141
3	PKS	3.592	4.021	1.965	4.107	6.113	4.424	3.231	2.834	2.768	2.474	1.070	2.341	1.499	3.193
4	PDI P	10.038	6.357	2.230	5.563	5.415	3.743	3.424	3.731	9.425	9.483	3.496	4.085	1.584	5.222
5	GOLKAR	10.675	9.799	3.202	7.642	9.419	5.612	7.208	7.340	6.225	6.865	2.877	5.841	1.095	6.229
6	GERINDRA	4.790	3.224	939	2.991	3.570	2.803	1.846	2.445	2.576	2.487	1.808	3.257	837	5.818
7	DEMOKRAT	6.654	6.564	3.355	4.163	4.569	4.509	2.908	2.434	2.638	3.703	1.823	4.623	6.066	7.314
8	PAN	6.010	5.350	1.343	2.874	6.257	3.156	2.712	1.717	2.472	4.051	2.617	1.464	885	1.604
9	PPP	3.052	5.988	2.897	3.944	3.863	2.453	4.308	3.603	3.145	6.182	2.282	2.873	1.629	8.946
10	HANURA	3.752	3.162	1.151	2.821	1.594	1.759	1.805	994	1.598	1.591	1.128	2.400	1.567	4.653
14	PBB	2.071	2.484	790	854	2.525	2.874	530	713	1.445	621	225	575	361	987
15	PKPI	471	497	109	308	614	176	204	121	158	178	123	809	42	204
	SUARA SAH	62.420	59.193	21.919	43.281	52.919	40.591	35.431	32.217	36.245	43.139	20.394	32.627	17.254	52.181

Pindahan

NO	PARTAI POLITIK	SUKAWENING	KARANG TENGAH	BAYONGBONG	CIGEDUG	CILAWU	CISURUPAN	SUKARESMI	CIKAJANG	BANJAR WANGI	SINGAJAYA	CIHURIP	PEUNDEUY	PAMEUNPEUK	CISOMPET
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	NasDem	1.380	300	1.778	593	2.318	2.476	732	2.338	1.239	1.482	219	1.328	844	3.098
2	PKB	4.032	1.314	5.133	2.921	4.879	9.742	2.529	5.247	6.033	4.825	2.468	3.146	2.759	5.078
3	PKS	1.756	613	4.027	1.067	3.481	5.438	2.086	2.742	1.713	1.446	284	560	1.172	2.105
4	PDI P	1.710	757	4.441	828	6.444	2.889	906	3.002	1.720	1.609	1.961	366	1.650	1.840
5	GOLKAR	3.966	1.575	7.432	2.596	9.261	4.507	1.945	7.597	6.228	2.044	1.923	838	3.816	3.340
6	GERINDRA	1.080	298	2.914	954	4.239	2.866	1.213	3.182	1.118	1.379	408	209	1.331	1.545
7	DEMOKRAT	2.729	918	4.212	931	4.887	3.606	1.560	4.753	3.367	1.024	723	448	1.694	1.126
8	PAN	1.013	165	3.299	2.596	3.177	3.455	1.033	2.154	2.150	1.967	194	1.435	5.616	4.196
9	PPP	4.736	697	7.523	3.261	4.612	5.452	5.119	3.322	2.099	2.811	384	1.125	636	913
10	HANURA	572	289	1.971	1.340	5.848	3.526	490	2.504	1.276	910	412	279	455	1.005
14	PBB	863	294	841	242	1.237	951	134	1.286	448	392	112	409	356	1.486
15	PKPI	727	12	221	79	378	148	78	161	191	91	96	218	86	156
	SUARA SAH	24.564	7.232	43.792	17.408	50.761	45.056	17.825	38.288	27.582	19.980	9.184	10.361	20.415	25.888

Pindahan

NO	PARTAI POLITIK	CIBALONG	CIKELET	BUNGBU LANG	MEKARMUKTI	PAKANJEN G	PAMULIHAN	CISEWU	CARINGIN	TALEGONG	BL LIMBANGAN	SELAWI	CIBIUK	PANGATIKAN	SUCINARAJA	JUMLAH
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	NasDem	1.187	874	1.064	421	1.243	424	890	583	3.485	1.095	784	538	1.084	1.013	56.620
2	PKB	4.032	3.752	4.223	1.265	4.026	611	1.714	1.866	1.456	6.152	3.959	2.664	2.534	1.559	171.028
3	PKS	1.265	945	877	319	1.876	410	917	438	802	1.556	1.277	1.123	2.292	1.302	87.521
4	PDI P	2.252	1.600	3.019	1.108	5.947	1.144	1.382	1.553	1.268	3.267	1.603	576	965	1.552	131.155
5	GOLKAR	4.371	5.318	8.768	2.163	5.531	1.968	7.988	3.850	5.124	3.719	2.286	1.274	2.704	2.268	204.429
6	GERINDRA	1.258	1.218	1.632	351	2.833	913	1.631	764	1.080	1.768	728	804	1.009	858	78.944
7	DEMOKRAT	1.651	1.807	2.049	598	3.754	1.035	1.454	828	686	6.571	2.655	1.762	1.517	1.707	121.372
8	PAN	2.917	3.177	6.377	1.551	4.557	269	515	1.752	356	1.173	684	1.207	546	836	100.879
9	PPP	1.584	505	773	272	1.467	401	568	638	335	3.715	2.285	2.401	3.813	1.556	118.168
10	HANURA	736	744	1.178	376	1.913	1.685	1.583	2.566	716	8.085	2.279	1.493	426	525	75.157
14	PBB	925	878	331	127	761	108	237	369	126	456	112	251	937	362	32.086
15	PKPI	103	136	579	159	374	90	461	192	971	314	427	68	80	59	10.670
	SUARA SAH	22.281	20.954	30.870	8.710	34.282	9.058	19.340	15.400	16.375	37.871	19.079	14.161	17.907	13.597	1.188.029

Tabel 21

Perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Garut Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut Antara Yang Benar menurut **PEMOHON** dan menurut **TERMOHON**



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	2	3	4
1	Partai Nas Dem	56,620	56,390
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	171,028	168,749
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	87,521	87,308
4	PDI Perjuangan	131,155	130,166
5	PARTAI GOLKAR	204,429	203,355
6	PARTAI GERINDRA	78,944	78,929
7	PARTAI DEMOKRAT	121,372	120,654
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	100,879	100,069
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	118,168	119,222
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	75,157	74,642
14	PARTAI BULAN BINTANG	32,086	32,344
15	PKPI	10,670	10,953
JUMLAH SUARA SAH		1,188,029	1,182,781

Tabel 22

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap Kabupaten Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI Yang Benar Menurut **PEMOHON**

MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		KABUPATEN GARUT	KAB. TASIKMALAYA	KOTA TASIKMALAYA	
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	56,390	37,606	11,461	105,457
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	168,749	137,976	28,166	334,891
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	87,308	70,920	28,652	186,880
4	PDI PERJUANGAN	130,166	127,444	44,914	302,524
5	PARTAI GOLKAR	203,355	129,937	35,535	368,827
6	PARTAI GERINDRA	78,929	74,143	22,601	175,673
7	PARTAI DEMOKRAT	120,654	76,872	32,642	230,168
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	100,069	82,831	39,394	222,294
9	PPP	119,222	145,560	78,602	343,384
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	74,642	17,293	7,956	99,891
14	PARTAI BULAN BINTANG	32,344	9,886	11,366	53,596
15	PKPI	10,953	3,482	987	15,422
SUARA SAH		1,182,781	913,950	342,276	2,439,007
TOTAL SUARA SAH					2,439,007

Tabel 23

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Setiap Kabupaten Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI Menurut **TERMOHON**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		KABUPATEN GARUT	KAB. TASIKMALAYA	KOTA TASIKMALAYA	
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	56,620	37,606	11,461	105,687
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	171,028	137,976	28,166	337,170
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	87,521	70,920	28,652	187,093
4	PDI PERJUANGAN	131,155	127,444	44,914	303,513
5	PARTAI GOLKAR	204,429	129,937	35,535	369,901
6	PARTAI GERINDRA	78,944	74,143	22,601	175,688
7	PARTAI DEMOKRAT	121,372	76,872	32,642	230,886
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	100,879	82,831	39,394	223,104
9	PPP	118,168	145,560	78,602	342,330
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	75,157	17,293	7,956	100,406
14	PARTAI BULAN BINTANG	32,086	9,886	11,366	53,338
15	PKPI	10,670	3,482	987	15,139
SUARA SAH		1,188,029	913,950	342,276	2,444,255
TOTAL SUARA SAH					2,444,255



6. Bahwa akibat dari kesalahan penghitungan perolehan suara tersebut, berpengaruh terhadap keseluruhan perolehan suara Pemohon di Dapil Jabar XI yang akan mempengaruhi perolehan kursi DPR yang seharusnya diperoleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk selain dan selebihnya, sepanjang tidak didalilkan kesalahannya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
8. Bahwa terhadap seluruh kesalahan hasil penghitungan perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, baru diketahui Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional oleh KPU RI;
9. Bahwa terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara tersebut, Pemohon telah menyatakan keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU dengan menyatakan keberatan Saksi yang dituliskan dalam Formulir Model DD2 DPR ditandatangani oleh Ketua KPU RI; **[Bukti P.9.(J-XI).1]**
10. Bahwa pada saat dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di KPU RI, KPUD Jawa Barat masih melakukan perubahan-perubahan data dan angka perolehan suara partai politik dalam Formulir Model DC 1 DPR, hal ini menunjukkan kinerja KPU Propinsi Jawa Barat dan jajaran di bawahnya yang sering keliru dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari TPS hingga KPU RI; **[Bukti P.9.(J-XI).2, 3 dan 4]**
11. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan kepada KPU RI pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional, akan tetapi oleh KPU RI diminta untuk mengisi formulir Model DD 2 DPR tentang keberatan saksi partai politik terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan disarankan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI; **[Bukti P-9.(J-XI).1]**
12. Bahwa selain itu, Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu RI, seluruh pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Termohon selama pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Garut, akan tetapi



belum ditindaklanjuti, oleh karenanya Pemohon mengajukan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi RI, **[Bukti P-9.(J-XI).9 dan 10]**

13. Bahwa selain itu, Saksi Pemohon telah menyatakan keberatan terhadap hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Garut, dimana adanya pengakuan dari Ketua KPUD Kabupaten Garut telah diintervensi oleh Kepala Daerah untuk memenangkan parpol tertentu; **[Bukti P.9.(J-XI).11]**
14. Bahwa masyarakat Kabupaten Garut melalui Forum Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil juga menyatakan ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Garut, mendesak dilaksanakannya Pemilu ulang; **[Bukti P.9.(J-XI).12]**
15. Bahwa berdasarkan pemberitaan di media massa Harian Kabar Priangan, mengabarkan tentang berbagai pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Garut; **[Bukti P.9.(J-XI).13]**
16. Bahwa jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2009, Pemohon memperoleh 2 kursi di Dapil Jabar XI, sebagaimana tingkat DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jabar XII yang meliputi wilayah pemilihan yang sama yaitu Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, Pemohon meraih 2 kursi pada Pemilu Legislatif tahun 2014; **[Bukti P.9.(J-XI).5]**
17. Bahwa terhadap keseluruhan permasalahan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Mahkamah Konstitusi RI demi tegaknya hukum dan keadilan.
18. Bahwa sesungguhnya prinsip dasar dari permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dengan mengembalikan suara umat kepada yang berhak, sebagaimana disitir dalam ayat-ayat Al Qur'an sebagai berikut:
 - *“Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang hak dan batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.”* (Ar-Ra'dd : ayat 17)



- *“Dan janganlah kamu mencampuradukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.”* (Al-Baqarah : ayat 42)
- *“Al-Hak (kebenaran) itu daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk daripada golongan orang-orang yang ragu-ragu.”* (Al-Baqarah : ayat 147)
- *“... supaya Allah menegakkan yang hak (benar) dan menghapuskan yang batil (kufur dan syirik) sekalipun golongan (kafir musyrik) yang berdosa itu tidak menyukainya.”* (Al-Anfal : ayat 8)

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, sebagai berikut:

Tabel 24
 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI
 JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	JABAR XI	343.384

Tabel 25
 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT YANG BENAR MENURUT PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai Nasdem	105.457
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	334.891
3.	Partai Keadilan Sejahtera	186.880
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	302.524
5.	Partai Golkar	368.827
6.	Partai Gerindra	175.673
7.	Partai Demokrat	230.168
8.	Partai Amanat Nasional	222.294
9.	Partai Persatuan Pembangunan	343.384
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	99.891
14.	Partai Bulan Bintang	53.596
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15.422
	Jumlah Suara Sah	2.439.007

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan utusan ini.
Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Daftar Tabel Pemohon

No.	TABEL	KETERANGAN
1.	Tabel 1	Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (PPP) Di Provinsi Jawa Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPR
2.	Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik



		Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Cigedug (Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
3.	Tabel 3	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Cigedug (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
4.	Tabel 4	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Pameungpeuk (Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
5.	Tabel 5	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Pameungpeuk (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
6.	Tabel 6	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Cisewu (Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
7.	Tabel 7	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Cisewu (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
8.	Tabel 8	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan BL. Limbangan (Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
9.	Tabel 9	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan BL. Limbangan (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
10.	Tabel 10	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Selaawi (Berdasarkan Lampiran Formulir Model C 1 DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
11.	Tabel 11	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota



		DPR Tahun 2014 Di Kecamatan Selaawi (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
12.	Tabel 12	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
13.	Tabel 13	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut (Berdasarkan Model DA 1 DPR Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Dilakukan Oleh TERMOHON di Tingkat Kecamatan)
14.	Tabel 14	Perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut Antara TERMOHON dan PEMOHON (Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Dilakukan Oleh TERMOHON di Tingkat Kecamatan dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 5 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON)
15.	Tabel 15	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Yang Benar Menurut PEMOHON , Setelah Dilakukan Koreksi Terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Pada Formulir Model C 1 TPS Yang Terjadi Di 126 TPS, Di 67 Desa, Dari 14 Kecamatan Se-Kabupaten Garut)
16.	Tabel 16	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut TERMOHON , Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR)
17.	Tabel 17	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 14 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut PEMOHON , Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR)



18.	Tabel 18	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut TERMOHON , Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR)
19.	Tabel 19	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 42 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut menurut PEMOHON (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut PEMOHON)
20.	Tabel 20	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 42 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut menurut TERMOHON (Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari 19 Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Menurut TERMOHON , Berdasarkan Model DA 1 DPR dan DB 1 DPR)
21.	Tabel 21	Perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Garut Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Kabupaten Garut Antara Yang Benar menurut PEMOHON dan menurut TERMOHON
22.	Tabel 22	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Kabupaten Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI Yang Benar Menurut PEMOHON
23.	Tabel 23	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Kabupaten Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI Menurut TERMOHON
24.	Tabel 24	Perolehan Suara Pemohon (PPP) Di Provinsi Jawa Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat XI
25.	Tabel 25	Perolehan Suara Partai Politik Di Provinsi Jawa Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Di Daerah Pemilihan Jawa Barat Yang Benar Menurut Pemohon

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-9.(J-XI).1 sampai dengan bukti P-9.(J-XI).52 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut:



NO.	TANDA BUKTI	ALAT BUKTI
1.	P-9.(J-XI).1	Model DD 2 DPR KPU RI Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2.	P-9.(J-XI).2	Model DC 1 DPR Propinsi Jawa Barat Dapil Jabar XI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Versi Pertama)
3.	P-9.(J-XI).3	Model DC 1 DPR Propinsi Jawa Barat Dapil Jabar XI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Versi Perbaikan)
4.	P-9.(J-XI).4	Berita Acara Rapat Pleno KPU Propinsi Jawa Barat Nomor : 47/BA/IV/2014 Tentang Perubahan Model DC Setelah Pencermatan Data Pemilih dan Validasi Data
5.	P-9.(J-XI).5	Model DC 1 DPRD Propinsi Jawa Barat Dapil Jabar XII Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun 2014
6.	P-9.(J-XI).6	Model DB 1 DPR Kabupaten Tasikmalaya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
7.	P-9.(J-XI).7	Model DB 1 DPR Kota Tasikmalaya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
8.	P-9.(J-XI).8	Model DB 1 DPR Kabupaten Garut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
9.	P-9.(J-XI).9	Berita Acara Panwaslu Kabupaten Garut Nomor: 027/BA/Panwaskab-Garut/IV/2014 Tanggal, 23 April 2014 Beserta daftar laporan dan temuan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Garut
10.	P-9.(J-XI).10	Tanda Terima Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 9 Mei 2014
11.	P-9.(J-XI).11	Surat Pernyataan Keberatan Pemohon terhadap hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Garut
12.	P-9.(J-XI).12	Maklumat



		Pernyataan sikap Forum Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil
13.	P-9.(J-XI).13	Kliping Media Massa Harian Kabar Priangan
14.	P-9.(J-XI).14	Model DA 1 DPR Kecamatan Cigedug Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
15.	P-9.(J-XI).14.A	Model DA 1 DPR Kecamatan Cigedug Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
16.	P-9.(J-XI).14.B	Model DA 1 DPR Kecamatan Cikajang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
17.	P-9.(J-XI).14.C	Model DA 1 DPR Kecamatan Cisewu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
18.	P-9.(J-XI).15	Model DA 1 DPR Kecamatan Pamempeuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
19.	P-9.(J-XI).16	Model DA 1 DPR Kecamatan Cisewu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
20.	P-9.(J-XI).17	Model DA 1 DPR Kecamatan BL. Limbangan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
21.	P-9.(J-XI).18	Model DA 1 DPR Kecamatan Selaawi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
22.	P-9.(J-XI).19	Model C 1 DPR Se-Kecamatan Cigedug Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jumlah Desa = 5 Jumlah TPS = 69



23.	P-9.(J-XI).20	Model C 1 DPR Se-Kecamatan Pamemppek Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jumlah Desa = 8 Jumlah TPS = 97
24.	P-9.(J-XI).21	Model C 1 DPR Se-Kecamatan Cisewu Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jumlah Desa = 9 Jumlah TPS = 74
25.	P-9.(J-XI).22	Model C 1 DPR Se-Kecamatan BL. Limbangan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jumlah Desa = 14 Jumlah TPS = 153
26.	P-9.(J-XI).23	Model C 1 DPR Se-Kecamatan Selaawi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jumlah Desa = 7 Jumlah TPS = 84
27.	P-9.(J-XI).24	Model DA 1 DPR Kecamatan Wanaraja Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
28.	P-9.(J-XI).25	Model DA 1 DPR Kecamatan Leuwigoong Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
29.	P-9.(J-XI).26	Model DA 1 DPR Kecamatan Bayongbong Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
30.	P-9.(J-XI).27	Model DA 1 DPR Kecamatan Cisurupan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
31.	P-9.(J-XI).28	Model DA 1 DPR Kecamatan Sukaresmi



		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
32.	P-9.(J-XI).29	Model DA 1 DPR Kecamatan Banjarwangi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
33.	P-9.(J-XI).30	Model DA 1 DPR Kecamatan Cihurip Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
34.	P-9.(J-XI).31	Model DA 1 DPR Kecamatan Peundeuy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
35.	P-9.(J-XI).32	Model DA 1 DPR Kecamatan Cibalong Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
36.	P-9.(J-XI).33	Model DA 1 DPR Kecamatan Bungbulang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
37.	P-9.(J-XI).34	Model DA 1 DPR Kecamatan Pamulihan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
38.	P-9.(J-XI).35	Model DA 1 DPR Kecamatan Pangatikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
39.	P-9.(J-XI).36	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Wanaraja Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 4 TPS di 2 Desa
40.	P-9.(J-XI).37	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Sukaresmi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 6 TPS di 3 Desa



41.	P-9.(J-XI).38	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Cikajang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 4 TPS di 3 Desa
42.	P-9.(J-XI).39	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Banjarwangi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 17 TPS di 9 Desa
43.	P-9.(J-XI).40	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Cihurip Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 6 TPS di 4 Desa
44.	P-9.(J-XI).41	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Peundeuy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 14 TPS di 4 Desa
45.	P-9.(J-XI).42	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Cibalong Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 9 TPS di 6 Desa
46.	P-9.(J-XI).43	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Bungbulang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 6 TPS di 2 Desa
47.	P-9.(J-XI).44	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Pamulihan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 10 TPS di 4 Desa
48.	P-9.(J-XI).45	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Talegong Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 3 TPS di 1 Desa
49.	P-9.(J-XI).46	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Pangatikan



		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 4 TPS di 3 Desa
50.	P-9.(J-XI).47	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Leuwigoong Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 13 TPS di 6 Desa
51.	P-9.(J-XI).48	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Bayongbong Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 16 TPS di 10 Desa
52.	P-9.(J-XI).49	Model C 1 DPR Dari Kecamatan Cisarupan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Koreksi Pemohon terhadap 22 TPS di 11 Desa
53.	P-9.(J-XI).50	Surat KPU Nomor: 1129/KPU/V/2014, perihal persiapan menghadapi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2014 di MK ditujukan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia, tertanggal 17 Mei 2014
54.	P-9.(J-XI).51	Surat KPU Kabupaten Garut Nomor 514/Kpukab-011.329063/V/2014, perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Panwaslu Kab. Garut, tertanggal 17 Mei 2014
55.	P-9.(J-XI).52	Surat Panwaslu Kabupaten Garut Nomor 309/Panwaslu-Leg/Grt/V/2014, perihal Tidak Menghadiri, ditujukan kepada Ketua KPUD Garut, tertanggal 17 Mei 2014

[2.6] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI KABUPATEN CIANJUR, DAPIL CIANJUR**

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		



1.	NASDEM	10.772	9.802	+ 970	
2.	PKB	13.691	15.621	+ 1.930	
3.	PKS	13.674	13.677	- 3	
4.	PDIP	20.928	20.926	- 2	
5.	GOLKAR	28.525	28.525	0	
6.	GERINDRA	13.925	13.923	- 2	
7.	DEMOKRAT	46.546	43.096	- 3.450	
8.	PAN	6.189	6.189	0	
9.	PPP	9.624	9.624	0	
10.	HANURA	11.173	11.173	0	
14.	PBB	3.618	6.343	+ 2.725	
15.	PKPI	779	896	+ 117	

Bahwa, Permohonan ini dilakukan atas dasar banyaknya temuan yang mengakibatkan kerugian terhadap perolehan suara baik suara Caleg maupun suara partai PPP dan perolehan kursi PPP di 5 Dapil Kabupaten Cianjur, untuk Pemilu Legislatif tingkat DPRD Kabupaten. Hal tersebut terjadi dan terindikasikan adanya oknum PPK, KPUD dan Partai Politik Lain yang bermain, baik memindahkan suara partai A ke Partai B, penambahan suara Caleg partai lain, penambahan suara partai lain dan penggelembungan suara terhadap partai lain. Bahwa dalam hal ini kami bagi menjadi 3 bagian gugatan yang berbeda, baik untuk dapil Cianjur I, Cianjur 3 dan Cianjur 4.

URAIAN KEJADIAN/FAKTA :

Dapil Cianjur I

Dalam gugatan di Dapil Cianjur I Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

- Dapil I memperebutkan 10 Kursi DPRD Kabupaten Cianjur
- Dapil I terdiri dari 4 Kecamatan (Cianjur kota, Cilaku, Warungkondang dan Gekbrong)
- Jumlah Suara Sah seluruh Partai Politik di dapil 1 sebesar : 179.444 suara
- Perolehan suara Caleg dan Parpol antara lain :

Partai NASDEM mendapatkan suara : 10.772

PKB mendapatkan suara : 13. 691

PKS mendapatkan suara : 13. 674



PDIP mendapatkan suara : 20. 928

Partai Golkar mendapatkan suara : 28.525

Partai Gerindra mendapatkan suara : 13. 925

Partai Demokrat mendapatkan suara : 46.546

PAN mendapatkan suara : 6.189

PPP mendapatkan suara : 9. 624

Partai Hanura mendapatkan suara : 11. 173

PBB mendapatkan suara : 3. 618

PKPI mendapatkan suara : 779

Suara tersebut telah diplenokan oleh KPUD Cianjur pada tanggal 20 Bulan April Tahun 2014, bertempat di Hotel Grand Hill Cipanas Kabupaten Cianjur. Namun setelah itu banyak gugatan dari masing-masing Parpol bahwa diduga oknum PPK Kecamatan Cianjur Kota melakukan penggelembungan suara baik Caleg maupun Parpol, pemindahan suara Parpol A ke Parpol B, pemindahan suara partai ke Caleg.

Dari gugatan-gugatan tersebut ternyata dapat terbukti bahwa oknum PPK bersama-sama dengan Komisioner KPUD telah melakukan sebagaimana yang diduga, ini terbukti bahwa pada hari rabu tanggal 8 Mei 2014 KPUD Cianjur kembali melakukan Rapat Pleno di Bandung tentang Validasi Formulir D-1 (PPS) DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) Tingkatan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Cianjur dengan Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor 50/BA/V/2014. Hal tersebut dilakukan oleh KPU dalam rangka menindaklanjuti surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 354/KPU-Prov-11/V/2014 Perihal tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Mei 2014 serta surat rekomendasi Bawaslu Provinsi 374/Bawaslu Jabar/V/2014. Perihal rekomendasi tanggal 3 Mei 2014 KPU Kabupaten Cianjur telah melakukan validasi data di tingkat DPRD Kabupaten berupa pencocokan data formulir D-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU KABUPATEN) antara data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Cianjur dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur khususnya Kecamatan Cianjur Kota/Dapil I Cianjur Kota.

Dari hasil validasi tersebut menghasilkan :

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	SEBELUM VALIDASI	SETELAH VALIDASI	KETERANGAN
----	--------------------------------	------------------	------------------	------------



	PARPOL DAN SUARA CALON			
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
1	PARTAI NASDEM			
7	GERRI ARDIWIMARTA, ST	2520	1550	Suara calon berkurang 970
	Jumlah suara sah partai dan suara calon	2520	1550	Suara sah partai dan calon-calon berkurang 970

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN SUARA CALON	SEBELUM VALIDASI	SETELAH VALIDASI	KETERANGAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
2	PARTAI PKB	824	2079	Suara Partai bertambah 1255
1	H. AHMAD ZENI CHOERUZZAINI M	3266	3941	Suara Calon bertambah 675
	Jumlah suara sah partai dan suara calon	4090	6020	Suara sah partai dan calon-calon bertambah 1930

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN SUARA CALON	SEBELUM VALIDASI	SETELAH VALIDASI	KETERANGAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
3	PARTAI PKS			
8	NURHANDAYANI S.Pd	63	62	Suara Calon berkurang 1
10	ECE	25	29	Suara Calon bertambah 4
	Jumlah suara sah partai dan suara calon	88	91	Suara sah partai dan calon-calon bertambah 3

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN SUARA CALON	SEBELUM VALIDASI	SETELAH VALIDASI	KETERANGAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
4	PDIP			
4	ASEP LUKMAN	917	915	Suara Calon berkurang 2
	Jumlah suara sah partai dan suara calon	917	915	Suara sah partai dan calon-calon bertambah 2

NO	RINCIAN JUMLAH	SEBELUM	SETELAH	KETERANGAN
----	----------------	---------	---------	------------



	PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN SUARA CALON	VALIDASI	VALIDASI	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
6	GERINDRA	1988	2427	Suara Partai bertambah 439
5	SAHLI SAIDI	1503	1064	Suara Calon berkurang 439
10	SUPRIYANTO. ST. MM	104	102	Suara Calon berkurang 2
	Jumlah suara sah partai dan suara calon	3595	3593	Suara sah partai dan calon-calon berkurang 2

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN SUARA CALON	SEBELUM VALIDASI	SETELAH VALIDASI	KETERANGAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
7	DEMOKRAT	5361	5561	Suara partai bertambah 200
4	ARI SYAHRIDAR	661	461	Suara Calon berkurang 200
6	RENZI KANSIL	4434	984	Suara Calon berkurang 3450
	Jumlah suara sah partai dan suara calon	10456	7006	Suara sah partai Dan calon- calon berkurang 3450

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN SUARA CALON	SEBELUM VALIDASI	SETELAH VALIDASI	KETERANGAN
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
14	PBB	174	759	Suara sah partai bertambah 585
1	KH ME HAMBALI	150	626	Suara calon bertambah 476
2	EEM KHOERUMAN SP.Di	101	622	Suara calon bertambah 521
3	IKA RUSTIKA ZAINAH SP.di	31	52	Suara calon bertambah 21
4	YAYAN RUYANI	33	95	Suara calon bertambah 62
5	RAHMI SAUKI ILAHI S.SOS	17	65	Suara calon bertambah 48
6	SRI MULYATI. SE	30	70	Suara calon bertambah 40
7	MOH JUAENI	28	258	Suara calon bertambah 230
8	JAMALUDIN SE	10	12	Suara calon bertambah 2
9	SITI MARIAM	19	32	Suara calon bertambah 13
10	NONIA WULANDARI BUNUT	43	770	Suara calon bertambah 727
	Jumlah suara sah partai dan suara calon	636	3361	Suara sah partai dan calon-calon bertambah 2725

NO	RINCIAN JUMLAH	SEBELUM	SETELAH	KETERANGAN
----	----------------	---------	---------	------------



	PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN SUARA CALON	VALIDASI	VALIDASI	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON				
15	PKPI	70	140	Suara sah partai bertambah 70
1	GURUH YOGA KOMARA S.Pd	154	193	Suara calon bertambah 39
2	YAYAN SUPIYANDI	37	36	Suara calon berkurang 1
3	TITIN RB SKM	119	118	Suara calon berkurang 1
4	MUHIDIN	51	65	Suara calon bertambah 14
5	ENI JAMILAH	40	36	Suara calon berkurang 4
	Jumlah suara sah partai dan suara calon	471	588	Suara sah partai dan calon-calon bertambah 117

KETERANGAN I :

Partai yang bertambah :

1. PKB bertambah 1930 suara
 2. PKS bertambah 3 suara
 3. PBB bertambah 2725 suara
 4. PKPI bertambah 117 suara
- 4775 suara**

Partai yang berkurang :

1. NASDEM berkurang 970 suara
 2. PDIP berkurang 2 suara
 3. GERINDRA berkurang 2 suara
 4. DEMOKRAT berkurang 3450 suara
- 4424 suara**

Selisih suara dari yg bertambah dan berkurang tidak sebanding (*balance*), dan ada selisih sebesar **351 suara**, sehingga disini masih terjadi penggelembungan suara sah parpol dan caleg, serta tidak seluruhnya pengembalian suara dari yang berkurang.

KETERANGAN II :

Dengan demikian, hitungan suara sah parpol dan caleg yang awalnya 179.444, menjadi 179.795.(**terjadi penggelembungan suara sebesar 351 suara**)



KETERANGAN III :

Bahwa terindikasikan pengurangan suara Partai NasDem tidak semuanya, dan hanya dikurangi 970 suara, yang seharusnya dikurangi 1321 suara, sehingga NasDem yang semula mendapatkan suara 10.772 harusnya menjadi 9451 suara, berarti suara NasDem dibawah PPP yang memperoleh suara 9626.

KETERANGAN IV :

Dengan demikian perolehan suara PPP di dapil 1 Cianjur mendapatkan perolehan sisa kursi yang terakhir atau ke 10

KETERANGAN V :

PEROLEHAN KURSI PARPOL HASIL VALIDASI KPUD JABAR
DI DAPIL 1 CIANJUR.

BPP/Harga Kursi Untuk Dapil I Jumlah Suara Sah Dibagi 10 Kursi

$$179.795 : 10 = 17.979$$

NO	NAMA PARTAI	SUARA ASAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HASIL AKHIR	Kursi Tahap 1	Kursi Tahap 2	Sisa suara	Ket
1	NASDEM	10.772		970	9.802			9.802	1 kursi
2	PKB	13.691	1930		15.621			15.621	1 kursi
3	PKS	13.674	3		13.677			13.677	1 kursi
4	PDIP	20.928		2	20.926	17.979		2.947	1 kursi
5	GOLKAR	28.525	-	-	28.525	17.979		10.546	2 kursi
6	GERINDRA	13.925		2	13.923			13.923	1 kursi
7	DEMOKRAT	46.546		3.450	43.096	17.979	25.117	7138	2 kursi
8	PAN	6.189	-	-	6.189			6.189	-
9	PPP	9.624	-	-	9.624			9.624	-
10	HANURA	11.173	-	-	11.173			11.173	1 kursi
14	PBB	3.618	2.725		6.343			6.343	-
15	PKPI	779	117		896			896	-
Jumlah					179.795				10 kursi

Pada posisi ini, PPP tidak mendapatkan kursi

PERKIRAAN PEROLEHAN KURSI PARPOL HASIL VALIDASI KPUD JABAR
DI DAPIL 1 CIANJUR.



(kalau selisih suara dikurangkan kepada partai NASDEM)

BPP/Harga Kursi Untuk Dapil I Jumlah Suara Sah Dibagi 10 Kursi

179.444 : 10 = 17.944

NO	NAMA PARTAI	SUARA ASAL	PENAM BAHAN	PENGUR ANGAN	HASIL AKHIR	Kursi Tahap 1	Kursi Tahap 2	Sisa suara	Ket
1	NASDEM	10.772		1321	9.451			9.451	-
2	PKB	13.691	1930		15.621			15.621	1 kursi
3	PKS	13.674	3		13.677			13.677	1 kursi
4	PDIP	20.928		2	20.926	17.944		2.982	1 kursi
5	GOLKAR	28.525	-	-	28.525	17.944		10.581	2 kursi
6	GERINDR A	13.925		2	13.923			13.923	1 kursi
7	DEMOKR AT	46.546		3.450	43.096	17.944	25.152	7208	2 kursi
8	PAN	6.189	-	-	6.189			6.189	-
9	PPP	9.624	-	-	9.624			9.624	1 kursi
10	HANURA	11.173	-	-	11.173			11.173	1 kursi
14	PBB	3.618	2.725		6.343			6.343	-
15	PKPI	779	117		896			896	-
Jumlah					179.444				10 kursi

Pada posisi ini, PPP mendapatkan 1 (satu) kursi

Demikian surat permohonan Gugatan ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian, pertimbangan dalam pelaksanaan gugatan kepihak Mahkamah Konstitusi. Adapun berkas D1 (PPS) se Dapil 1 Cianjur, DA1 (PPK) Empat Kecamatan se Dapil 1 Cianjur dan DB1(KPU Kabupaten) serta hasil Pleno kedua KPUD Cianjur di Jawa Barat tentang Validasi (yang bermasalah) terlampir.

**REKAPITULASI SUARA HASIL PLENO PPK
KECAMATAN CIANJUR KOTA (DA 1)
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL PLENO 5 DESA DI KECAMATAN CIANJUR
KOTA (D 1)**

NAMA PARTAI	DESA/KELURAHAN	SUARA ASAL (D 1)	REKAP (DA 1)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
	NAGRAK				



PPP		369	368	-	1
	MEKARSARI	195	194	-	1
	JUMLAH	564	562	-	2

KETERANGAN : SUARA PPP DI 2 DESA TERSEBUT BERKURANG 2 SUARA

NAMA PARTAI	DESA/KELURAHAN	SUARA ASAL (D 1)	REKAP (DA 1)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
NASDEM	MUKA	290	490	200	-
	BABAKAN KARET	368	495	127	-
	NAGRAK	320	341	21	-
	SUKAMAJU	203	204	1	-
	JUMLAH	1181	1530	349	-

KETERANGAN :

SUARA PARTAI NASDEM DI 4 DESA/KELURAHAN TERJADI PENGGELEMBUNGAN SEBESAR 349

KETERANGAN AKHIR :

Jumlah dari penambahan dan pengurangan sebesar **351 suara**, sesuai dengan selisih adanya dugaan penggelembungan suara.

PENJELASAN :

setelah diketahui adanya selisih 351 suara maka Partai Persatuan Pembangunan Dapil Cianjur 1 Sangat dirugikan dengan tidak mendapatkannya kursi di DPRD Kabupaten Cianjur DAPIL Cianjur 1 (satu) yang semestinya mendapatkan 1 (satu) Kursi dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia.

PERMOHONAN PEMOHON :

Kami memohon dengan sangat kepada Mahkamah Kostitusi yang terhormat untuk:

1. Memutuskan dan mengesahkan bahwa suara PPP di DAPIL Cianjur 1 (satu) adalah : 9.626.



2. Memutuskan dan mengesahkan bahwa suara Partai NASDEM di DAPIL Cianjur 1 (satu) adalah : 9.451.
3. Memutuskan dan memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk melakukan Penghitungan Ulang di Tingkat Kelurahan/Desa di Dapil Cianjur 1 Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.7 dan tidak ada saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P-9.1. Model D-1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
2. P-9.2. Model D-1 DPRD KAB/KOTA Desa Babakan Karet Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
3. P-9.3. Model D-1 DPRD KAB/KOTA Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
4. P-9.4. Model D-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
5. P-9.5. Model D-1 DPRD KAB/KOTA Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
6. P-9.6. Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
7. P-9.7. Berita Acara Nomor : 50/BA/V/2014 Tentang Validasi Formulir Model D-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) Tingkatan DPRD Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Cianjur.

[2.8] PEROLEHAN SUARA PERSEORANGAN (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI KABUPATEN BEKASI, DAPIL BEKASI 4

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (CALEG DPRD KABUPATEN BEKASI)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	PPP	3824	3824	0	



1.	H. KAIRAN	4083	3907	(+) 176	P-9.1 s.d P-9.6
2.	MUAMMAR GADAFI	3923	3923	0	P-9.1, P-9.2
3.	H. YUYUN KHOERUNI , SPd	2076	2076	0	P-9.1, P- 9.2
4.	ARINI, SH	870	870	0	P-9.1, P- 9.2
5.	HERIYADI	687	687	0	P-9.1, P- 9.2
6.	IIN IANATUNA HDOH	103	103	0	P-9.1, P- 9.2
7.	Drs. M.MA'RUF, MM	861	861	0	P-9.1, P- 9.2
8.	LIA KHOFIAH	64	64	0	P-9.1, P- 9.2
9.	H. AHMAD RIFQI, SAg	982	982	0	P-9.1, P- 9.2
10.	NURFALAH	125	125	0	P-9.1, P- 9.2
11.	SUBUR SPdi	252	252	0	P-9.1 P- 9.2



PENJELASAN;

Kecamatan Babelan Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi:

1. Jumlah TPS di kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kab. Bekasi sejumlah 160 TPS.
2. Berdasarkan perhitungan dari TPS 01 sampai dengan TPS 160 di Kelurahan Bahagia, Termohon atas nama H. Kairan mendapatkan suara 508, tapi di data C1 jumlah caleg nomor urut 1 atas nama H. Kairan hanya mendapat 332 suara. Sehingga terjadi penambahan suara untuk Caleg Nomor 1 atas nama H. Kairan sebesar 176 suara.
3. Di bukti P-9-2 (lampiran model C-1) terdapat di 94 TPS dari 160 TPS yang mengalami penambahan suara. Penambahan suara sejumlah 176 suara untuk H. Kairan yang seharusnya memperoleh suara sebanyak 332.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pemohon (**MUAMMAR GADAFI**) bahwa yang berhak atas kursi ke 10 di Dapil 4 Kabupaten Bekasi adalah Pemohon caleg Nomor urut 2 atas nama **MUAMMAR GADAFI** dengan perolehan suara sebanyak 3923 bukan caleg nomor urut 1 atas nama **H. KAIRAN** dengan perolehan suara sebanyak 3907 suara.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1	H. KAIRAN	3907
2	MUAMMAR GADAFI	3923
3	H. YUYUN KHOERUNI, SPd	2076
4	ARINI, SH	870
5	HERIYADI	687
6	IIN IANATUNAHDOH	103
7	Drs. M.MA'RUF, MM	861
8	LIA KHOFIAH	64
9	H. AHMAD RIFQI, SAg	982
10	NURFALAH	125
11	SUBUR SPdi	252



[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.6 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P-9.1 Model C (Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);
2. P-9.2 Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014);
3. P-9.3 Lampiran Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) DPRD KAB/KOTA;
4. P-9.4 Model D1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
5. P-9.5 Model DA-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
6. P-9.6 Model DB-1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ferry Fadli

- Saksi sebagai saksi Partai Golkar di kelurahan;
- Pihak Pemohon dalam hal ini Muamar Khadafi meminta saksi untuk mencocokkan data C-1 milik saksi dengan C-1 milik Muamar Khadafi;
- Hasilnya, saksi menemukan PPP ada selisih di 94 TPS dari 160 TPS Kelurahan Bahagia;
- Untuk caleg perseorangan atas nama Muamar Khadafi dari 94 TPS yang bermasalah memperoleh 40 suara sama dengan hasil D1 yaitu 40 suara;
- Untuk caleg perseorangan atas nama H. Ahmad Khairan dari 94 TPS yang bermasalah memperoleh 332 suara sedangkan berdasarkan D1 H. Ahmad Khairan memperoleh 508 suara sehingga terdapat selisih 176 suara;a

2. Susanto

- Saksi sebagai saksi PPP di sidang pleno Kelurahan bahagia;



- Saat sidang pleno Kelurahan bahagia saksi PKS mengajukan keberatan untuk TPS 111;
- Tetapi keberatan tersebut tidak diakomodasi oleh PPS;
- Saat rekap di Kelurahan Bahagia saksi tidak punya C1 sehingga saksi tidak mengajukan keberatan;

3. Salahudin Fauzi

- Saksi sebagai saksi mandat di PPK;
- Saksi menjelaskan perubahan jumlah suara dari D1 ke DA-1 di Kelurahan Bahagia;
- Terjadi perubahan untuk nomor 1 atas nama Haji Khairan memperoleh 1.906 suara berdasarkan D1 berubah menjadi 508 suara berdasarkan DA1;
- Saksi menemukan kejanggalan-kejanggalan dan ditindaklanjuti penemuan tersebut ke Panwaskab tetapi belum ada tindak lanjutnya sampai saat ini;

[2.10] PEROLEHAN SUARA PERSEORANGAN (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI KABUPATEN BEKASI, DAPIL BEKASI 5

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL V yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	BEKASI 5				
2.	PPP	16240	16298	(-)58	Bukti P-1 s/d P-9.9
3.	PAN	16306	16206	(+)100	

Bahwa Pemohon telah kehilangan suara akibat Termohon salah merekap suara Pemohon, sehingga Termohon dirugikan tidak mendapat kursi Dapil 5 Kabupaten Bekasi.



Bahwa kekurangan suara pemohon yang direkap Termohon setelah Pemohon telusuri sebanyak 58 suara, terhadap perselisihan tersebut Pemohon akan berupaya untuk mengambil kembali, suara yang direkap Termohon didasarkan atas kecurangan-kecurangan yang berakibat merugikan Pemohon. Kerugian suara Pemohon seharusnya direkap Termohon sebanyak : 16298 suara BUKAN 16240 suara. Akibatnya Pemohon tidak memperoleh kursi, karena selisih 58 suara.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (Drs. Hasan Bisri) DAPIL 5.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	H. Junawan	4127			
2.	H. Mahmudin	2808			
3.	Hj. Mulyanah S.KOM.I	1754			
4.	Drs. Hasan Bisri	3982			
5.	Hj. Ratna Yuliana	144			
6.	Indah	93			
7.	Ujid Duryudana	925			

DUDUK PERSOALAN SENGKETA HASIL PEMILU :

1. Bahwa berdasarkan hasil pleno Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi suara keseluruhan PPP sebanyak **1.657** sesuai dengan bukti D1 Desa Sukamulya-----**(P-9.1)**.
2. Bahwa, sedangkan pada pleno tingkat PPK Kecamatan Sukatani dari 7 desa, hanya satu desa yang dibacakan yaitu Desa Banjarsari dan kemudian PPK merekapitulasi adapun hasil rekapitulasi suara PPP tercatat menjadi **1.599** suara sesuai model DA-1----- **(P-9.2)**;
3. Bahwa terhadap rekapan itu berubah untuk kedua kalinya menjadi **1600** sesuai model DA 1 PPK Kecamatan Sukatani Sehingga Total Keseluruhan Suara PPP di Kecamatan Sukatani Menjadi 4.551 Suara sesuai yang direkap Termohon (DB KPU Kabupaten Bekasi)-----**(P-9.3)** dan tanda tangan saksi di PALSUKAN pada Model DA 1. Terhadap kasus ini PPP Kabupaten Bekasi



khususnya di Kecamatan Sukatani terdapat pengurangan suara partai sebanyak **58** suara

4. Bahwa berdasarkan pada C1 Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi tercatat suara **H. Namat Hidayat** Caleg dari PAN Kabupaten Bekasi Dapil 5 memperoleh suara sebanyak **13** suara tercatat pada C1 di **TPS 01** Desa Sukalaksana----- (**P-9.4**);
5. Bahwa akan tetapi terjadi perubahan kemudian pada formulir D1 untuk **H.Namat Hidayat** dari PAN bertambah/digelembungkan **100** suara, sehingga jumlah suara **H. Namat Hidayat** yang semula **13** suara menjadi **113** suara tercatat dan di plenokan di tingkat PPK DA 1- (**P-9.6**) dan tingkat KPU Kabupaten Kota (Model DB-1----- (**P-9.7**);
6. Bahwa adapun kecurangan yang terjadi di Kecamatan Muara Gembong berdasarkan Model C-1 dan Model D-1 di Peroleh suara PPP di Kecamatan Muara Gembong sebanyak 751 suara pada Pleno KPUD Kabupaten Kota Bekasi, sehingga terdapat selisih 159 suara di 41 TPS (**Bukti P.9-8**).
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas mohon didalam putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemohon memperoleh suara 16.298 dan membatalkan Keputusan Termohon atas penetapan PAN terkait dengan perolehan kursi DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 5.

Kronologis Kecurangan

Kecamatan Sukatani

Hasil Pleno Dapil V Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi terdapat 3 perubahan hasil suara PPP :

1. Berdasarkan D1/Pleno PPS Desa Sukamulya = 1657
2. Berdasarkan Da 1/Pleno PPK Kecamatan Sukatani = 1599
3. Berdasarkan Db/Pleno KPU = 1600

Terjadi pengurangan sebanyak 58 suara dan pemalsuan tandatangan saksi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sukatani(diantaranya tanda tangan saksi PPP dan partai lain)

Kecamatan Sukakarya

Hasil Pleno Dapil V Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi suara Caleg PAN nomor urut 2 atas nama Namat Hidayat

1. TPS 01 = 13 suara
2. Pelno PPS = 113 suara



3. Pleno PPK = 113 suara

4. Pleno KPU = 113 suara

Terjadi penambahan atau penggelembungan suara untuk caleg PAN nomor urut 2 atas nama Namat Hidayat sebanyak **100** suara

Dengan demikian suara PPP menurut hasil Pleno KPU yang semestinya sebanyak 1298 suara namun terjadi pengurangan yang terjadi pada :

1. Pleno Kecamatan Sukatani terjadi pengurangan **58** suara PPP yang seharusnya suara PPP adalah 1657 menjadi 1599 suara
2. Pleno Kecamatan Sukakarya terjadi penggelembungan **100** suara caleg PAN Nomor Urut 2

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon meminta agar MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan Pemohon memperoleh Suara sebesar **16.298 Bukan** 16240 .

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P-9.1: Model D-1 Rekapitulasi Tingkat Desa Suka Mulia.
2. P-9.2: Model DA-1 Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Sukatani.
3. P-9.3: Model DB-1 Rekapitulasi KPUD Kabupaten Bekasi.
4. P-9.4: Model C-1 Rincian suara sah di TPS 1 Desa Sukalaksana.
5. P-9.5: Model D-1 Rekapitulasi Di Tingkat Desa Sukalaksana .
6. P-9.6: Model DA-1 Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Sukakarya.
7. P-9.7: Model DB-1 Rekapitulasi Suara Di Tingkat KPUD Kabupaten Bekasi.
8. P-9.8 Model C-1 Rekapitulasi Di Tingkat TPS untuk 6 (enam) desa, Kecamatan Muara Gembong.
9. P-9.9 Model Da-1, Rekapitulasi Suara Di Tingkat Kecamatan Muara Gembong.

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan



menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. **Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.



- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

1. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kabupaten/Kota) Kabupaten Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kabupaten Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapinya permohonan/Lewat Waktu.

- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiapun –*Quad Non*– telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.



- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

*“Pasal 223 (2) yaitu ; **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*



- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN ;

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
- 2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON *mensomeer* dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;



4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau Desa tempat Permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut ;

**[2.13] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) MENURUT TERMOHON
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JABAR II**

Bahwa pemohon mendalilkan adanya perselisihan perhitungan perolehan suara antara termohon dengan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

Bahwa untuk menjawab dalil tersebut, termohon memeriksa bukti-bukti yang dimiliki dengan hasil sebagai berikut :



Tabel 1. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan
Oleh Pemohon Di Dapil Kabupaten Bandung

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JABAR II (KAB BANDUNG)	69.818	90.458	T-9.JABARII.1
2	JABAR II (KAB BANDUNG BARAT)	50.930	50.930	T-9.JABARII.2
	Jumlah	120.748	141.388	

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-9.JABARII.1 sampai dengan bukti T-9.JABARII.3 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-9.JABARII.1: DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.
2. T-9.JABARII.2: Surat Mandat Saksi dari PPP Kabupaten Bandung Barat.
3. T-9.JABARII.3: DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.15] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI PROVINSI JAWA BARAT DI DAERAH PEMILIHAN BEKASI 4**

Termohon menyampaikan dan menjelaskan data penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon (disandingkan dengan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon Perseorangan Muammar Gadafi secara lengkap dalam tabel di bawah ini hanya pada DAPIL Bekasi 4 yang dimohonkan, sebagai berikut:
Tabel 1: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PERSEORANGAN MUAMMAR GADAFI (CALON ANGGOTA DPRD KAB. BEKASI NOMOR URUT 2 DARI PARTAI PPP) DI DAPIL BEKASI 4



No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.824	3.824	T-9.KAB-BEKASI4.616
1.	H. KAIRAN	4.083	3.907	
2.	MUAMMAR GADAFI	3.923	3.923	
3.	Hj. YUYUN KHOERUDIN, S.P.d	2.076	2.076	
4.	ARINI, SH	870	870	
5.	HERIYADI	687	687	
6.	IIN I'ANATUN NAHDLOH	103	103	
7.	Drs. M. MA'RUF, MM	861	861	
8.	LIA KHOFIFAH	64	64	
9.	H. AHMAD RIFQI, S.Ag	982	982	
10	NURFALAH	125	125	
11	SUBUR, S.Pdi	252	252	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	17.850	17.674	

Selanjutnya Termohon juga menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan Pemohon Perseorangan Muammar Gadafi mengenai perolehan suaranya di seluruh TPS yang ada di Kelurahan Bahagia Kecamatan Bahagia.

Tabel 3: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PERSEORANGAN MUAMMAR GADAFI (CALON ANGGOTA DPRD KAB. BEKASI No.URUT 2 DARI PARTAI PPP) DI KELURAHAN BAHAGIA KECAMATAN BAHAGIA UNTUK PEROLEHAN SUARA H. KAIRAN CALON ANGGOTA DPRD KAB.BEKASI No. URUT 1 DARI PARTAI PPP

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. KAIRAN	508	332	T-9.KAB-BEKASI4.617

Selanjutnya Termohon menyampaikan dan menjelaskan bukti-bukti tentang peringkat perolehan suara sah Calon PPP di Dapil Bekasi 4 yang mendapatkan peringkat perolehan suara sah pertama adalah calon nomor urut 1 atas nama H. Kairan dengan perolehan suara sah sebanyak 4.083 suara dan peringkat perolehan suara sah kedua adalah calon nomor urut 2 atas nama Muammar



Gadafi dengan perolehan suara 3.923 suara. Penjelasan rinci peringkat perolehan suara sah calon PPP di Dapil Bekasi 4 seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PERSEORANGAN MUAMMAR GADAFI (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI NOMOR URUT 2 DARI PPP) UNTUK RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PPP DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILU TAHUN 2014 DI DAPIL BEKASI 4

No. Urut DCT	PARTAI CALON	POLITIK/NAMA	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON	KODE BUKTI
(1)	(2)		(3)		T-9.KAB-BEKASI4.618
	9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.824		
1.		H. KAIRAN	4.083	1	
2.		MUAMMAR GADAFI	3.923	2	
3.		Hj. YUYUN KHOERUDIN, S.P.d	2.076	3	
4.		ARINI, SH	870	5	
5.		HERIYADI	687	7	
6.		IIN I'ANATUN NAHDLOH	103	10	
7.		Drs. M. MA'RUF, MM	861	6	
8.		LIA KHOFIFAH	64	11	
9.		H. AHMAD RIFQI, S.Ag	982	4	
10		NURFALAH	125	9	
11		SUBUR, S.Pdi	252	8	
		Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	17.850		

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-9.KAB-BEKASI4.625 sampai dengan bukti T-9.KAB-BEKASI4.626 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

- T-9.KAB-BEKASI4.625 : MODEL DB DPRD KAB/KOTA Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu tahun 2014
- T-9.KAB-BEKASI4.626 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

[2.17] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI JAWA BARAT UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DAPIL V DPRD KABUPATEN BEKASI**

Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan termohon yang mengakibatkan pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi di Dapil 5 sebanyak 58 suara.

Bahwa untuk menjawab dalil pemohon, termohon memeriksa bukti-bukti yang dimiliki termohon dan menyatakan data yang BENAR menurut termohon sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara antara Pemohon dengan dengan Termohon di Daerah Pemilihan Bekasi 5

No	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
1	BEKASI 5	16.240	16.298	T-9.KAB-BEKASI 5.619

[2.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-9.KAB-BEKASI5.616 sampai dengan bukti T-9.KAB-BEKASI5.619 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-9.KAB-BEKASI5.616 : Berita Acara Nomor 11/BA/PPS-Skm/V/2014 Pengecekan Ulang antara Model C1 dengan Model D1.
2. T-9.KAB-BEKASI5.617 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
3. T-9.KAB-BEKASI5.618 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
4. T-9.KAB-BEKASI5.619 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.



[2.19] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI JAWA BARAT UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DAPIL CIANJUR 1 DPRD PROVINSI**

Bahwa TERMOHON mendalilkan terjadinya penggelembungan suara terhadap partai NasDem sebesar 351 suara. Dengan hasil sebagai berikut:

Persandingan data pada model D-1 di Kelurahan/Desa Muka, Babakankaret, Nagrak, Sukamaju dan Mekarsari dan DA-1 di Kecamatan Cianjur antara PPP dengan Partai NasDem sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara antara PPP dengan partai NasDem versi D-1 di 5 (lima) Kelurahan/Desa

No	Kel/Ds	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		NasDem	PPP	
1	Muka	290	576	T-9.KAB- CIANJUR1.620
2	Babakankaret	368	177	
3	Nagrak	321	368	
4	Sukamaju	201	296	
5	Mekarsari	366	194	
Jumlah		1.546	1.611	

Menurut data pada model D-1 di 6 (enam) Kelurahan/Desa lain yaitu Sayang, Limbangan sari, bojongherang, Solokapandan, Sawahgede dan Pamoyanan sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara antara PPP dengan partai NasDem versi D-1 di 5 (lima) Kelurahan/Desa

No	Kel/Ds	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		NasDem	PPP	
1	Sayang	1203	1645	T-9.KAB- CIANJUR1.621
2	Limbangsari	434	191	
3	Bojongherang	693	306	
4	Solokpanadan	178	322	
	Sawahgede	324	234	
5	Pamoyanan	412	263	
Jumlah		3244	2961	

Dari hasil persandingan kedua data tersebut di atas, dapat terlihat bahwa hasil perolehan suara PPP adalah 4572 suara dan NasDem 4790 suara. Selisih suara di partai tersebut sebesar 218 suara.

Model D-1 di Kelurahan/Desa dan DA-1 DPRD Kabupaten di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur terjadi perubahan dan hal tersebut di dasarkan atas Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 354/KPU-Prov-11/V/2014



Perihal Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tanggal 4 Mei 2014. ;(Bukti T-9.KAB-CIANJUR1.622)

Dari hasil persandingan data D-1 antara beberapa Kelurahan/Desa dan Model DA-1 DPRD di Kecamatan Cianjur di tuangkan Berita Acara Nomor : 50/BA/V/2014 tentang validasi Formulir model D-1 dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) tingkatan DPRD Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Cianjur sehingga tidak ada penggelembungan suara sebesar 351 suara. Sehingga jumlah suara partai Nasdem pada Dapil Cianjur 1 (satu) adalah 9.802 suara dan PPP 9.624 suara, sehingga tidak perlu untuk melakukan penghitungan ulang di tingkat Kelurahan/Desa di Dapil Cianjur 1 (satu) di Kecamatan Cianjur.

[2.20] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-9.KAB-CIANJUR1.620 sampai dengan bukti T-9. KAB-CIANJUR1.624 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-9.KAB-CIANJUR1.620 : Model D-1 Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
2. T-9.KAB-CIANJUR1.621: Model D-1 Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
3. T-9. KAB-CIANJUR1.622 :SE KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
4. T-9. KAB-CIANJUR1.623 :BA Nomor 50/BA/V/2014 tentang Validasi Formulir D-1 dengan DA-1 dan DB-1 Kabupaten Tingkatan DPRD Kabupaten Cianjur.
5. T-9. KAB-CIANJUR1.624 :MODEL DB DPRD KAB/KOTA Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu tahun 2014.

[2.21] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA BARAT
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDAPIL JABAR XI**



Bahwa Termohon dalam jawabannya tidak memberikan jawaban terkait dengan daerah pemilihan Jawa Barat XI yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Termohon hanya mengajukan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk menjawab permohonan Pemohon.

[2.22] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-9. JABARXI.4 sampai dengan bukti T-9. JABARXI.615 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-9. JABARXI.4 : MODEL C-I DPR PLANO Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
2. T-9. JABARXI.5 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
3. T-9. JABARXI.6 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
4. T-9. JABARXI.7 : MODEL C-I DPR PLANO Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
5. T-9. JABARXI.8 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
6. T-9. JABARXI.9 : MODEL C-I DPR PLANO Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
7. T-9. JABARXI.10 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
8. T-9. JABARXI.11 : MODEL C-I DPR PLANO Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
9. T-9. JABARXI.12 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
10. T-9.JABARXI.13 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 11. T-9.JABARXI.14 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Poiitik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 12. T-9.JABARXI.15 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 13. T-9. JABARXI.16 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 14. T-9.JABARXI.17 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Panai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 15. T-9.JABARXI.18 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 16. T-9. JABARXI.19 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 17. T-9.JABARXI.20 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 18. T-9.JABARXI.21 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR UL Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 19. T-9.JABARXI.22 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 20. T-9.JABARXI.23 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Polidk dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
 21. T-9. JABARXI.24 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014



22. T-9.JABARXI.25 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
23. T-9.JABARXI.26 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
24. T-9.JABARXI.27 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Poliuik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
25. T-9.JABARXI.28 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
26. T-9. JABARXI.29 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
27. T-9. JABARXI.30 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
28. T-9. JABARXI.31 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
29. T-9. JABARXI.32 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
30. T-9. JABARXI.33 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Poliuik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
31. T-9. JABARXI.34 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
32. T-9. JABARXI.35 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
33. T-9, JABARXI.36 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Poliuik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
34. T-9. JABARXI.37 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
35. T-9. JABARXI.38 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
36. T-9. JABARXI.39 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
37. T-9. JABARXI.40 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
38. T-9. JABARXI.41 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Polidk dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
39. T-9. JABARXI.42 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
40. T-9. JABARXI.43 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
41. T-9. JABARXI.44 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
42. T-9. JABARX3.45 : MODEL C-1 DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
43. T-9. JABARXI.46 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Ansgota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
44. T-9. JABARXI.47 : MODEL C-1 DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Seup Partai Poliuk dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
45. T-9. JABARXI.48 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Poiitik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
46. T-9. JABARXI.49 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Polidk dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014



47. T-9.JABARXI.50 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
48. T-9.JABARXI.51 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
49. T-9.JABARXI.52 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
50. T-9.JABARXI.53 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
51. T-9.JABARXI.54 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
52. T-9.JABARXI.55 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
53. T-9.JABARXI.56 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
54. T-9.JABARXI.57 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
55. T-9.JABARXI.58 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
56. T-9.JABARXI.59 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
57. T-9.JABARXI.60 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
58. T-9.JABARXI.61 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
59. T-9.JABARXI.62 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
60. T-9.JABARXI.63 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
61. T-9.JABARXI.64 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
62. T-9.JABARXI.65 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
63. T-9.JABARXI.66 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
64. T-9.JABARXI.67 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
65. T-9.JABARXI.68 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
66. T-9.JABARXI.69 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
67. T-9.JABARXI.70 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
68. T-9.JABARXI.71 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
69. T-9.JABARXI.72 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
70. T-9.JABARXI.73 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
71. T-9.JABARXI.74 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014



72. T-9.JABARXI.75 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
73. T-9.JABARXI.76 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
74. T-9.JABARXI.77 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
75. T-9.JABARXI.78 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
76. T-9.JABARXI.79 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
77. T-9.JABARXI.80 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
78. T-9.JABARXI.81 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
79. T-9.JABARXI.82 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
80. T-9.JABARXI.83 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
81. T-9.JABARXI.84 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
82. T-9.JABARXI.85 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
83. T-9.JABARXI.86 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
84. T-9.JABARXI.87 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
85. T-9.JABARXI.88 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
86. T-9.JABARXI.89 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
87. T-9.JABARXI.90 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
88. T-9.JABARXI.91 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
89. T-9.JABARXI.92 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
90. T-9.JABARXI.93 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
91. T-9.JABARXI.94 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
92. T-9.JABARXI.95 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
93. T-9.JABARXI.96 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
94. T-9.JABARXI.97 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
95. T-9.JABARXI.98 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
96. T-9.JABARXI.99 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014



97. T-9.JABARXI.100 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
98. T-9.JABARXI.101 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
99. T-9.JABARXI.102 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
100. T-9.JABARXI.103 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
101. T-9.JABARXI.104 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
102. T-9.JABARXI.105 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
103. T-9.JABARXI.106 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
104. T-9.JABARXI.107 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
105. T-9.JABARXI.108 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
106. T-9.JABARXI.109 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
107. T-9.JABARXI.110 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
108. T-9.JABARXI.111 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
109. T-9.JABARXI.112 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
110. T-9.JABARXI.113 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
111. T-9.JABARXI.114 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
112. T-9.JABARXI.115 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
113. T-9.JABARXI.116 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
114. T-9.JABARXI.117 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
115. T-9.JABARXI.118 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
116. T-9.JABARXI.119 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
117. T-9.JABARXI.120 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
118. T-9.JABARXI.121 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
119. T-9.JABARXI.122 : MODEL C-I DPR PLANO Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sedap Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
120. T-9.JABARXI.123 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
121. T-9.JABARXI.124 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



122. T-9.JABARXI.125 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
123. T-9.JABARXI.126 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
124. T-9.JABARXI.127 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
125. T-9.JABARXI.128 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
126. T-9.JABARXI.129 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
127. T-9.JABARXI.130 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
128. T-9.JABARXI.131 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
129. T-9.JABARXI.132 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
130. T-9.JABARXI.133 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
131. T-9.JABARXI.134 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
132. T-9.JABARXI.135 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
133. T-9.JABARXI.136 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
134. T-9.JABARXI.137 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
135. T-9.JABARXI.138 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
136. T-9.JABARXI.139 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
137. T-9.JABARXI.140 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
138. T-9.JABARXI.141 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
139. T-9.JABARXI.142 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
140. T-9.JABARXI.143 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
141. T-9.JABARXI.144 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
142. T-9.JABARXI.145 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
143. T-9.JABARXI.146 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
144. T-9.JABARXI.147 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
145. T-9.JABARXI.148 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
146. T-9.JABARXI.149 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



147. T-9.JABARXI.150 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
148. T-9.JABARXI.151 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
149. T-9.JABARXI.152 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
150. T-9.JABARXI.153 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
151. T-9.JABARXI.154 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
152. T-9.JABARXI.155 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
153. T-9.JABARXI.156 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
154. T-9.JABARXI.157 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
155. T-9.JABARXI.158 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
156. T-9.JABARXI.159 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
157. T-9.JABARXI.160 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
158. T-9.JABARXI.161 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
159. T-9.JABARXI.162 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
160. T-9.JABARXI.163 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
161. T-9.JABARXI.164 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
162. T-9.JABARXI.165 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
163. T-9.JABARXI.166 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
164. T-9.JABARXI.167 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
165. T-9.JABARXI.168 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
166. T-9.JABARXI.169 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
167. T-9.JABARXI.170 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
168. T-9.JABARXI.171 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
169. T-9.JABARXI.172 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
170. T-9.JABARXI.173 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
171. T-9.JABARXI.174 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



172. T-9.JABARXI.175 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
173. T-9.JABARXI.176 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
174. T-9.JABARXI.177 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
175. T-9.JABARXI.178 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
176. T-9.JABARXI.179 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
177. T-9.JABARXI.180 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
178. T-9.JABARXI.181 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
179. T-9.JABARXI.182 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
180. T-9.JABARXI.183 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
181. T-9.JABARXI.184 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
182. T-9.JABARXI.185 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
183. T-9.JABARXI.186 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
184. T-9.JABARXI.187 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
185. T-9.JABARXI.188 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
186. T-9.JABARXI.189 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
187. T-9.JABARXI.190 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
188. T-9.JABARXI.191 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
189. T-9.JABARXI.192 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
190. T-9.JABARXI.193 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
191. T-9.JABARXI.194 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
192. T-9.JABARXI.195 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
193. T-9.JABARXI.196 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
194. T-9.JABARXI.197 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
195. T-9.JABARXI.198 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
196. T-9.JABARXI.199 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



197. T-9.JABARXI.200 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
198. T-9.JABARXI.201 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
199. T-9.JABARXI.202 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
200. T-9.JABARXI.203 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
201. T-9.JABARXI.204 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
202. T-9.JABARXI.205 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
203. T-9.JABARXI.206 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
204. T-9.JABARXI.207 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
205. T-9.JABARXI.208 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
206. T-9.JABARXI.209 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
207. T-9.JABARXI.210 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
208. T-9.JABARXI.211 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
209. T-9.JABARXI.212 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
210. T-9.JABARXI.213 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
211. T-9.JABARXI.214 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
212. T-9.JABARXI.215 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
213. T-9.JABARXI.216 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
214. T-9.JABARXI.217 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
215. T-9.JABARXI.218 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
216. T-9.JABARXI.219 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
217. T-9.JABARXI.220 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
218. T-9.JABARXI.221 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
219. T-9.JABARXI.222 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
220. T-9.JABARXI.223 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
221. T-9.JABARXI.224 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



222. T-9.JABARXI.225 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
223. T-9.JABARXI.226 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
224. T-9.JABARXI.227 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
225. T-9.JABARXI.228 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
226. T-9.JABARXI.229 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
227. T-9.JABARXI.230 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
228. T-9.JABARXI.231 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
229. T-9.JABARXI.232 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
230. T-9.JABARXI.233 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
231. T-9.JABARXI.234 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
232. T-9.JABARXI.235 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
233. T-9.JABARXI.236 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
234. T-9.JABARXI.237 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
235. T-9.JABARXI.238 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
236. T-9.JABARXI.239 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
237. T-9.JABARXI.240 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
238. T-9.JABARXI.241 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
239. T-9.JABARXI.242 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
240. T-9.JABARXI.243 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
241. T-9.JABARXI.244 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
242. T-9.JABARXI.245 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
243. T-9.JABARXI.246 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
244. T-9.JABARXI.247 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
245. T-9.JABARXI.248 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
246. T-9.JABARXI.249 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



247. T-9.JABARXI.250 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
248. T-9.JABARXI.251 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
249. T-9.JABARXI.252 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
250. T-9.JABARXI.253 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
251. T-9.JABARXI.254 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
252. T-9.JABARXI.255 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
253. T-9.JABARXI.256 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
254. T-9.JABARXI.257 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
255. T-9.JABARXI.258 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
256. T-9.JABARXI.259 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
257. T-9.JABARXI.260 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
258. T-9.JABARXI.261 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
259. T-9.JABARXI.262 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
260. T-9.JABARXI.263 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
261. T-9.JABARXI.264 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
262. T-9.JABARXI.265 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
263. T-9.JABARXI.266 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
264. T-9.JABARXI.267 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
265. T-9.JABARXI.268 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
266. T-9.JABARXI.269 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
267. T-9.JABARXI.270 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
268. T-9.JABARXI.271 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
269. T-9.JABARXI.272 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
270. T-9.JABARXI.273 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
271. T-9.JABARXI.274 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



272. T-9.JABARXI.275 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
273. T-9.JABARXI.276 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
274. T-9.JABARXI.277 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
275. T-9.JABARXI.278 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
276. T-9.JABARXI.279 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
277. T-9.JABARXI.280 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
278. T-9.JABARXI.281 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
279. T-9.JABARXI.282 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
280. T-9.JABARXI.283 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
281. T-9.JABARXI.284 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
282. T-9.JABARXI.285 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
283. T-9.JABARXI.286 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
284. T-9.JABARXI.287 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
285. T-9.JABARXI.288 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
286. T-9.JABARXI.289 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
287. T-9.JABARXI.290 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
288. T-9.JABARXI.291 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
289. T-9.JABARXI.292 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
290. T-9.JABARXI.293 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
291. T-9.JABARXI.294 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
292. T-9.JABARXI.295 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
293. T-9.JABARXI.296 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
294. T-9.JABARXI.297 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
295. T-9.JABARXI.298 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
296. T-9.JABARXI.299 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



297. T-9.JABARXI.300 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
298. T-9.JABARXI.301 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
299. T-9.JABARXI.302 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
300. T-9.JABARXI.303 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
301. T-9.JABARXI.304 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
302. T-9.JABARXI.305 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
303. T-9.JABARXI.306 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
304. T-9.JABARXI.307 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
305. T-9.JABARXI.308 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
306. T-9.JABARXI.309 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
307. T-9.JABARXI.310 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
308. T-9.JABARXI.311 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
309. T-9.JABARXI.312 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
310. T-9.JABARXI.313 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
311. T-9.JABARXI.314 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
312. T-9.JABARXI.315 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
313. T-9.JABARXI.316 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
314. T-9.JABARXI.317 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
315. T-9.JABARXI.318 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
316. T-9.JABARXI.319 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
317. T-9.JABARXI.320 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
318. T-9.JABARXI.321 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
319. T-9.JABARXI.322 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
320. T-9.JABARXI.323 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
321. T-9.JABARXI.324 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



322. T-9.JABARXI.325 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
323. T-9.JABARXI.326 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
324. T-9.JABARXI.327 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
325. T-9.JABARXI.328 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
326. T-9.JABARXI.329 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
327. T-9.JABARXI.330 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
328. T-9.JABARXI.331 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
329. T-9.JABARXI.332 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
330. T-9.JABARXI.333 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
331. T-9.JABARXI.334 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
332. T-9.JABARXI.335 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
333. T-9.JABARXI.336 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
334. T-9.JABARXI.337 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
335. T-9.JABARXI.338 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
336. T-9.JABARXI.339 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
337. T-9.JABARXI.340 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
338. T-9.JABARXI.341 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
339. T-9.JABARXI.342 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
340. T-9.JABARXI.343 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
341. T-9.JABARXI.344 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
342. T-9.JABARXI.345 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
343. T-9.JABARXI.346 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
344. T-9.JABARXI.347 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
345. T-9.JABARXI.348 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
346. T-9.JABARXI.349 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



347. T-9.JABARXI.350 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
348. T-9.JABARXI.351 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
349. T-9.JABARXI.352 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
350. T-9.JABARXI.353 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
351. T-9.JABARXI.354 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
352. T-9.JABARXI.355 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
353. T-9.JABARXI.356 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
354. T-9.JABARXI.357 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
355. T-9.JABARXI.358 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
356. T-9.JABARXI.359 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
357. T-9.JABARXI.360 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
358. T-9.JABARXI.361 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
359. T-9.JABARXI.362 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
360. T-9.JABARXI.363 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
361. T-9.JABARXI.364 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
362. T-9.JABARXI.365 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
363. T-9.JABARXI.366 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
364. T-9.JABARXI.367 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
365. T-9.JABARXI.368 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
366. T-9.JABARXI.369 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
367. T-9.JABARXI.370 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
368. T-9.JABARXI.371 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
369. T-9.JABARXI.372 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
370. T-9.JABARXI.373 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
371. T-9.JABARXI.374 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



372. T-9.JABARXI.375 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
373. T-9.JABARXI.376 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
374. T-9.JABARXI.377 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
375. T-9.JABARXI.378 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
376. T-9.JABARXI.379 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
377. T-9.JABARXI.380 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
378. T-9.JABARXI.381 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
379. T-9.JABARXI.382 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
380. T-9.JABARXI.383 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
381. T-9.JABARXI.384 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
382. T-9.JABARXI.385 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
383. T-9.JABARXI.386 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
384. T-9.JABARXI.387 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
385. T-9.JABARXI.388 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
386. T-9.JABARXI.389 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
387. T-9.JABARXI.390 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
388. T-9.JABARXI.391 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
389. T-9.JABARXI.392 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
390. T-9.JABARXI.393 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
391. T-9.JABARXI.394 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
392. T-9.JABARXI.395 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
393. T-9.JABARXI.396 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
394. T-9.JABARXI.397 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
395. T-9.JABARXI.398 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
396. T-9.JABARXI.399 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



397. T-9.JABARXI.400 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
398. T-9.JABARXI.401 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
399. T-9.JABARXI.402 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
400. T-9.JABARXI.403 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
401. T-9.JABARXI.404 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
402. T-9.JABARXI.405 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
403. T-9.JABARXI.406 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
404. T-9.JABARXI.407 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
405. T-9.JABARXI.408 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
406. T-9.JABARXI.409 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
407. T-9.JABARXI.410 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
408. T-9.JABARXI.411 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
409. T-9.JABARXI.412 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
410. T-9.JABARXI.413 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
411. T-9.JABARXI.414 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
412. T-9.JABARXI.415 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
413. T-9.JABARXI.416 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
414. T-9.JABARXI.417 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
415. T-9.JABARXI.418 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
416. T-9.JABARXI.419 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
417. T-9.JABARXI.420 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
418. T-9.JABARXI.421 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
419. T-9.JABARXI.422 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
420. T-9.JABARXI.423 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
421. T-9.JABARXI.424 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



422. T-9.JABARXI.425 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
423. T-9.JABARXI.426 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
424. T-9.JABARXI.427 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
425. T-9.JABARXI.428 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
426. T-9.JABARXI.429 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
427. T-9.JABARXI.430 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
428. T-9.JABARXI.431 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
429. T-9.JABARXI.432 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
430. T-9.JABARXI.433 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
431. T-9.JABARXI.434 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
432. T-9.JABARXI.435 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
433. T-9.JABARXI.436 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
434. T-9.JABARXI.437 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
435. T-9.JABARXI.438 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
436. T-9.JABARXI.439 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
437. T-9.JABARXI.440 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
438. T-9.JABARXI.441 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
439. T-9.JABARXI.442 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
440. T-9.JABARXI.443 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
441. T-9.JABARXI.444 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
442. T-9.JABARXI.445 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
443. T-9.JABARXI.446 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
444. T-9.JABARXI.447 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
445. T-9.JABARXI.448 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
446. T-9.JABARXI.449 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



447. T-9.JABARXI.450 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
448. T-9.JABARXI.451 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
449. T-9.JABARXI.452 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
450. T-9.JABARXI.453 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
451. T-9.JABARXI.454 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
452. T-9.JABARXI.455 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
453. T-9.JABARXI.456 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
454. T-9.JABARXI.457 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
455. T-9.JABARXI.458 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
456. T-9.JABARXI.459 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
457. T-9.JABARXI.460 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
458. T-9.JABARXI.461 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
459. T-9.JABARXI.462 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
460. T-9.JABARXI.463 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
461. T-9.JABARXI.464 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
462. T-9.JABARXI.465 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
463. T-9.JABARXI.466 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
464. T-9.JABARXI.467 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
465. T-9.JABARXI.468 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
466. T-9.JABARXI.469 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
467. T-9.JABARXI.470 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
468. T-9.JABARXI.471 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
469. T-9.JABARXI.472 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
470. T-9.JABARXI.473 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
471. T-9.JABARXI.474 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



472. T-9.JABARXI.475 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
473. T-9.JABARXI.476 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
474. T-9.JABARXI.477 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
475. T-9.JABARXI.478 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
476. T-9.JABARXI.479 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
477. T-9.JABARXI.480 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
478. T-9.JABARXI.481 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
479. T-9.JABARXI.482 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
480. T-9.JABARXI.483 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
481. T-9.JABARXI.484 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
482. T-9.JABARXI.485 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
483. T-9.JABARXI.486 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
484. T-9.JABARXI.487 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
485. T-9.JABARXI.488 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
486. T-9.JABARXI.489 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
487. T-9.JABARXI.490 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
488. T-9.JABARXI.491 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
489. T-9.JABARXI.492 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
490. T-9.JABARXI.493 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
491. T-9.JABARXI.494 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
492. T-9.JABARXI.495 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
493. T-9.JABARXI.496 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
494. T-9.JABARXI.497 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
495. T-9.JABARXI.498 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
496. T-9.JABARXI.499 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



497. T-9.JABARXI.500 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
498. T-9.JABARXI.501 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
499. T-9.JABARXI.502 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
500. T-9.JABARXI.503 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
501. T-9.JABARXI.504 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
502. T-9.JABARXI.505 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
503. T-9.JABARXI.506 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
504. T-9.JABARXI.507 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
505. T-9.JABARXI.508 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
506. T-9.JABARXI.509 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
507. T-9.JABARXI.510 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
508. T-9.JABARXI.511 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
509. T-9.JABARXI.512 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
510. T-9.JABARXI.513 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
511. T-9.JABARXI.514 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
512. T-9.JABARXI.515 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
513. T-9.JABARXI.516 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
514. T-9.JABARXI.517 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
515. T-9.JABARXI.518 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
516. T-9.JABARXI.519 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
517. T-9.JABARXI.520 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
518. T-9.JABARXI.521 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
519. T-9.JABARXI.522 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
520. T-9.JABARXI.523 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
521. T-9.JABARXI.524 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



522. T-9.JABARXI.525 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
523. T-9.JABARXI.526 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
524. T-9.JABARXI.527 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
525. T-9.JABARXI.528 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
526. T-9.JABARXI.529 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
527. T-9.JABARXI.530 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
528. T-9.JABARXI.531 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
529. T-9.JABARXI.532 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
530. T-9.JABARXI.533 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
531. T-9.JABARXI.534 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
532. T-9.JABARXI.535 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
533. T-9.JABARXI.536 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
534. T-9.JABARXI.537 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
535. T-9.JABARXI.538 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
536. T-9.JABARXI.539 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
537. T-9.JABARXI.540 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
538. T-9.JABARXI.541 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
539. T-9.JABARXI.542 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
540. T-9.JABARXI.543 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
541. T-9.JABARXI.544 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
542. T-9.JABARXI.545 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
543. T-9.JABARXI.546 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
544. T-9.JABARXI.547 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
545. T-9.JABARXI.548 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
546. T-9.JABARXI.549 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



547. T-9.JABARXI.550 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
548. T-9.JABARXI.551 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
549. T-9.JABARXI.552 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
550. T-9.JABARXI.553 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
551. T-9.JABARXI.554 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
552. T-9.JABARXI.555 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
553. T-9.JABARXI.556 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
554. T-9.JABARXI.557 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
555. T-9.JABARXI.558 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
556. T-9.JABARXI.559 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
557. T-9.JABARXI.560 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
558. T-9.JABARXI.561 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
559. T-9.JABARXI.562 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
560. T-9.JABARXI.563 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
561. T-9.JABARXI.564 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
562. T-9.JABARXI.565 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
563. T-9.JABARXI.566 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
564. T-9.JABARXI.567 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
565. T-9.JABARXI.568 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
566. T-9.JABARXI.569 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
567. T-9.JABARXI.570 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
568. T-9.JABARXI.571 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
569. T-9.JABARXI.572 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
570. T-9.JABARXI.573 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
571. T-9.JABARXI.574 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



572. T-9.JABARXI.575 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
573. T-9.JABARXI.576 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
574. T-9.JABARXI.577 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
575. T-9.JABARXI.578 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
576. T-9.JABARXI.579 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
577. T-9.JABARXI.580 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
578. T-9.JABARXI.581 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
579. T-9.JABARXI.582 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
580. T-9.JABARXI.583 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
581. T-9.JABARXI.584 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
582. T-9.JABARXI.585 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
583. T-9.JABARXI.586 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
584. T-9.JABARXI.587 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
585. T-9.JABARXI.588 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
586. T-9.JABARXI.589 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
587. T-9.JABARXI.590 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
588. T-9.JABARXI.591 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
589. T-9.JABARXI.592 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
590. T-9.JABARXI.593 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
591. T-9.JABARXI.594 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
592. T-9.JABARXI.595 : MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
593. T-9.JABARXI.596 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
594. T-9.JABARXI.597 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
595. T-9.JABARXI.598 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014



596. T-9.JABARXI.599 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
597. T-9.JABARXI.600 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
598. T-9.JABARXI.601 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
599. T-9.JABARXI.602 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
600. T-9.JABARXI.603 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
601. T-9.JABARXI.604 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
602. T-9.JABARXI.605 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
603. T-9.JABARXI.606 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
604. T-9.JABARXI.607 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
605. T-9.JABARXI.608 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014



606. T-9.JABARXI.609 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
607. T-9.JABARXI.610 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
608. T-9.JABARXI.611 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
609. T-9.JABARXI.612 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
610. T-9.JABARXI.613 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
611. T-9.JABARXI.614 : MODEL DA DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
612. T-9.JABARXI.615 : MODEL DB DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

[2.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai NasDem menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a./PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota Daerah Pemilihan Jawa Barat XI. Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam rapat Pleno rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

[2.24] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertandabukti PT-1.1 sampai dengan bukti PT-1.2 sebagai berikut.

1. PT-1.1 Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. PT-1.2 Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. PT-1.2a Keputusan KPU Nomor 05//Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Selain itu, Pihak Terkait NasDem juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muslim Sidik Kodratuloh.

- Saksi sebagai Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut dan sekaligus LO DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut untuk KPU;
- Saksi menyatakan hasil rekapitulasi tanggal 20 hari minggu yang ditetapkan KPUD Garut Pihak Terkait mendukung dan semua saksi yang hadir menandatangani termasuk Pihak Pemohon;



[2.25] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama H.Khairandalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17.2.a/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa Pemohon menguraikan dalam posita tabel perbandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 4), dimana perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon 3.923 suara, selisih 0. Sementara pada bagian penjelasan posita halaman 357, Pemohon mengklaim bahwa pihak Terkait (H. Kairan) mendapat suara 508 berdasarkan perhitungan di Kelurahan Bahagia, tapi didata C-I jumlah suara Caleg PPP Nomor urut 1, sebanyak 332 suara, tanpa merincikan secara satu persatu model C-I di tingkat TPS nomor berapakah telah dilakukan penambahan suara untuk Caleg Nomor urut 1.
2. Bahwa Pemohon menyatakan dalam dalil posita poin 2, bahwa telah terjadi penambahan suara untuk Caleg Nomor urut 1 a.n H. Kairan (Pihak Terkait) sebesar 176 suara, namun dalil posita Pemohon hanya menunjukkan alat bukti P-9.1 s/d P-9.6 dan dalam kolom /tabel bagian alat bukti Pemohon mendalilkan P-9.1 - P-9.2. Bagaimana mungkin selisih 176 suara Pemohon hanya mendalilkan 2 (dua) model C saja menjadi alat bukti ? Sungguh ironis dan tidak masuk akal antara selisih suara sebanyak 176 suara, tetapi hanya 2 (dua) model C-I saja yang didalilkan sebagai alat bukti Pemohon.
3. Bahwa pada bagian penjelasan posita poin 1, Pemohon mendalilkan bahwa di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan jumlah TPS sebanyak 60 dan 94 TPS dari 160 TPS yang mengalami penambahan suara. Sementara dari 94 TPS tersebut tidak dirincikan TPS mana saja yang mengalami penambahan suara dan tidak didalilkan seluruh model C-I sebagai alat bukti pada setiap TPS di Kelurahan Bahagia, sehingga berakibat pada ketidakjelasan permohonan Pemohon.



4. Bahwa, seandainya Pemohon mempersoalkan penambahan suara di Kelurahan Bahagia, maka seharusnya disaat proses perhitungan rekapitulasi suara dari tingkat C-I s/d DB-1, seharusnya Pemohon mengajukan pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi, akan tetapi Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut, maka secara hukum proses perhitungan perolehan suara dari semua tingkatan tersebut di atas dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan 176 suara, namun pada bagian dalil pembuktian pemohon tidak berhasil mendalilkan berapa jumlah model C-I yang dijadikan bukti dalam perkara *aquo* terkait dengan penambahan 176 suara itu. Oleh karena bukti yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonan sangat sumir dan tidak sesuai dengan kecurangan penambahan 176 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi *obscuur libel*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak seluruh dalil Pemohon dan mohon agar dalil-dalil Pihak Terkait yang diterangkan pada bagian eksepsi dijadikan satu kesatuan dan dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa penetapan Termohon dalam keputusan menyatakan bahwa Pihak Terkait memperoleh 4.083 suara menurut Pihak Terkait sudah benar dan sah secara hukum, karena selama dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari semua tingkatan, Pemohon tidak pernah menggunakan hak untuk menyatakan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam model C-2, D-2, DA-2 dan DB-2, sehingga secara hukum Pemohon tidak berwenang mengajukan perkara *aquo* ke Mahkamah Konstitusi, karena sudah dianggap menyetujui semua rekapan perolehan suara DPRD Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu keputusan Termohon menyatakan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 4.083 suara adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Bahwa, dalil Pemohon dalam poin 2 menyatakan bahwa ketika dilakukan perhitungan suara dari TPS 01 s/d TPS 160 di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Pihak Terkait memperoleh 508 suara, tetapi di data C-I



jumlah Caleg Nomor 1 a.n H. Kairan hanya mendapat 332 suara. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak uraikan secara rinci TPS mana saja jumlah suara yang ditambah Pihak Terkait, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

4. Bahwa Termohon di dalam menetapkan suara Pemohon sebanyak 3.923 suara sudah sah sesuai dengan rekap C-I, D-I, DA-1 dan DB-1, karena jumlah suara Pemohon yang direkap dalam perolehan suara Pemilu Caleg Tahun 2014, Pemohon tidak pernah menyatakan kejadian khusus dan keberatan saksi. Jika Pemohon tahu ada kecurangan maka disaat itu juga Pemohon seharusnya mengajukan sikap untuk menyatakan kejadian khusus dan mengajukan keberatan saksi terhadap kecurangan tersebut, namun Pemohon tidak mengisi model C-2, D-2, DA-2 dan DB-2 maka seluruh rekapan di semua tingkatan tidak dapat diganggu gugat oleh Pemohon dan tidak boleh memperkarakan Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi mengingat Pemohon tidak pernah menyatakan kejadian khusus dan keberatan saksi disaat rekapitulasi perhitungan perolehan suara di semua tingkatan
5. Bahwa Pemohon di dalam posita permohonan mendalilkan bahwa Pihak Terkait seharusnya memperoleh 332 suara, bukan 508 suara, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon pada bagian dalil pembuktian tidak merincikan secara angka dan jumlah di TPS manakah Pihak Terkait menambah suara sebanyak 176 itu. Adapun suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sebanyak 4.083 suara sudah sesuai dengan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari semua tingkatan. Oleh karena itu Pemohonseharusnya menerima keputusan Termohon dan tidak boleh ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi-argumentasi tersebut mohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Termohon



Nomor411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 4.

4. Menyatakan Pihak Terkait memperoleh 4.083 suara selaku suara terbanyak dan berhak atas kursi Dapil Bekasi 4.
5. Memerintahkan Termohon untuk menjalankan putusan ini.

[2.26] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama H.Khairan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti PT-9.1 sampai dengan bukti PT-9.4 sebagai berikut:

1. PT-9.1 Model C-1 TPS 01 samoai dengan TPS 160 Desa Bahagia.
2. PT-9.2 Model D-1 Rekapitulasi di tingkat Desa Bahagia Kecamatan Babelan.
3. PT-9.3 Model DA-1 Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Babelan.
4. PT-9.4 Model DB-1 Rekapitulasi Tingkat KPUD Kabupaten Bekasi.

[2.27] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Sehubungan dengan adanya surat panggilan Mahkamah Konstitusi Nomor 162.10-07/PAN.MK/5/2014 tertanggal 30 Mei 2014 Perihal Panggilan Sidang, terkait adanya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara :

- Bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Daftar Calon Tetap sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 112/Kpts/KPU-Prov-011/VIII/2013



Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada tanggal 21 Agustus 2013;

- Bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan :
 - 1) Berita Acara Nomor 43/BA/IV/2014 Tanggal 7 Mei 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014; Nomor 43/BA/IV/2014 Tanggal 7 Mei 2014;
 - 2) Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 44/BA/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi dalam Pemilu 2014 dengan Agenda Penceramatan Validasi Data;
 - 3) Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 45/BA/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014, Tentang Perubahan Atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi dalam Pemilu 2014 Nomor 43/BA/IV/2014;
 - 4) Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 46/BA/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014 Tentang Validasi Data DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat III;
 - 5) Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 47/BA/IV/2014 tanggal 8 Mei 2014, Tentang Perubahan Model DC Setelah Penceramatan Data Pemilih dan Validasi Data;
 - 6) Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/IV/2014 tanggal 13 Mei 2014, Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

A. KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN



- Bahwa, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan surat Rekomendasi Kepada KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam **Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 374/Bawaslu Jabar/V/2014, tanggal 3 Mei 2014, Perihal : Rekomendasi**, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat agar melaksanakan Validasi hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Model C.1, Model D.1, Model DA.1 dan DB.1 di 15 Kabupaten/Kota;
- Bahwa, terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana angka 2 diatas, KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Validasi hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Model C.1, Model D.1, Model DA.1 dan DB.1 di 15 Kabupaten/Kota;
- Bahwa, berdasarkan Lampiran **Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 374/Bawaslu Jabar/V/2014, tanggal 3 Mei 2014, Perihal : Rekomendasi**, Validasi Data dilaksanakan di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

TABEL. 1 : HASIL VALIDASI KPU PROVINSI JAWA BARAT
 REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

N O	KABUPA TEN/ KOTA	LOKASI	KETERANG AN	TINDAKLANJUT
1.	KAB.CIA NJUR	KEC. CIANJUR KEC. LELES KEC. CIDAUN KEC. CUGENANG KEC. CIPANAS	Ditemukan adanya ketidaksesai an antara data D.1 dan DA.1 Di Kec. Cianjur, Leles dan Cidaun	BA KPU KAB. CIANJUR Nomor: 50/BA/V/2014 Tanggal : 8 Mei 2014
2.	KOTA.CI MAHI	KEC. CIMAH SELATAN KEC. CIMAH UTARA KEC. CIMAH TENGAH	Ditemukan adanya ketidaksesai an antara data C.1 , D.1 dan DA.1	BA KPU KOTA CIMAH Nomor: 137/BA/V/2014 Tanggal : 9 Mei 2014
3.	KAB. CIAMIS	KEC. PANUMBANG AN KEC. SINDANGKAS IH	ditemukan adanya perbedaan dari C.1, D.1 dan DA.1 di kec,	BA KPU KAB. CIAMIS Nomor:18/BA/V/2 014 Tanggal : 4 Mei 2014



			Panumbangan dan Kec. Sindangkasih	
4.	KOTA BEKASI	KEC. BEKASI TIMUR KEC. BEKASI UTARA KEC. RAWALUMBU	Ditemukan adanya perbedaan dari C.1, D.1 dan DA.1 di Kel Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	BA KPU KOTA. BEKASI Nomor:43/BA/V/2014 Tanggal : 5 Mei 2014
5.	KAB. BEKASI	KEC. TAMBUN UTARA KEC. TARUMAJAYA KEC. SUKATANI	Tidak ditemukan adanya perbedaan dari C.1, D.1 dan DA.1	BA KPU KAB. BEKASI Nomor:21/BA/V/2014 Tanggal : 5 Mei 2014
6.	KAB. CIREBON	KEC. LOSARI KEC. JAMBLANG KEC. GUNUNGJATI KEC. SURANEGLA KEC. PLUMBON KEC. ARJAWINANGUN	ditemukan adanya perbedaan dari C.1, D.1 dan DA.1 di Kec. Arjawinangun	BA KPU KAB. CIREBON Nomor:31/BA/V/2014 Tanggal : 4 Mei 2014
7.	KAB. INDRAMAYU	KEC. SINDANG KEC. ARAHAN KEC. BONGAS KEC. LOH BENER	Tidak ditemukan adanya perbedaan dari C.1, D.1 dan DA.1	BA KPU KAB. INDRAMAYU Nomor: 22/BA/V/2014 Tanggal : 4 Mei 2014
8.	KAB. BANDUNG BARAT	KEC. LEMBANG KEC. NGAMPRAH KEC. CIPATAT KEC. CIKALONG WETAN KEC. PADALARANG KEC. CILILIN KEC. SINDANGKERTA KEC. CIPONGKOR KEC. PARONGPONG KEC. CISARUA	Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data D.1 dan DA.1 di Kec. Sindangkerta	BA KPU KAB. BANDUNG BARAT No. 38/BA/KPU/KPU-Kab/011.329865/V/2014 Tanggal :5 Mei 2014



		KEC.CIPENDEUY KEC.SAGULING KEC.RONGGA		
9.	KAB. KARAWANG	KEC. TIRTAJAYA KEC.TELUKJAMBE KEC.RENGASDENGKLOK	Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data C.1, D.1 dan DA.1	BA KPU KAB. KARAWANG Nomor: 16/BA/V/2014 Tanggal : 5 Mei 2014
10.	KOTA DEPOK	KEC. CIMANGGIS KEC. LIMO KEC. BEJI KEC. TAPOS	Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data C.1, D.1 dan DA.1	BA KPU KOTA DEPOK Nomor: 21/BA/V/2014 Tanggal : 9 Mei 2014

N O	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI	KETERANGAN	TINDAKLANJUT
11.	KAB. KUNINGAN	KEC.KUNINGAN KEC.GARAWANGI KEC.HANTARA KEC. CIGUGUR KEC.SINDANGGUNG KEC.CINIRU	Tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data C.1, D.1 dan DA.1	BA KPU KAB. KUNINGAN Nomor: 410/BA/V/2014 Tanggal : 5 Mei 2014
12.	KAB. BOGOR	KEC.CISEENG KEC.BOJONGGEDE KEC.CIAMPEA	Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data C.1, D.1 dan DA.1 di Kec. Bojonggede	BA KPU KAB. BOGOR Nomor: 40/BA/V/2014 Tanggal : 4 Mei 2014
13.	KAB. BANDUNG	KEC.PANGALENGAN KEC.CIMENYAN KEC.BOJONGSOANG	Ditemukan adanya ketidaksesuaian data C.1, D.1 dan DA.1 di Kec. Pangalengan	BA KPU Kab. Bandung Nomor. 39/BA/V/2014 Tanggal: 4 Mei 2014
14.	KAB. GARUT	KEC. PAKENJENG KEC.BUNGBULANG KEC.BAYONGBONG	Tidak Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data C.1, D.1	BA KPU KAB. GARUT Nomor:331/BA/V/2014 Tanggal : 5 Mei 2014



			dan DA.1	
15.	KOTA BANDUN G	30 KECAMATAN	Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data C.1, D.1 dan DA.1	BA KPU Kota Bandung Nomor :34/BA/V/2014 Tanggal: 5 Mei 2014

- Bahwa, setelah KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, maka hasil Validasi Rekapitulasi Perolehan Suara dari Model C.1, Model D.1, Model DA.1 dan DB.1 di 15 Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam :
 - a. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 44/BA/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi dalam Pemilu 2014 dengan Agenda Pencermatan Validasi Data;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 45/BA/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014, Tentang Perubahan Atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi dalam Pemilu 2014 Nomor : 43/BA/IV/2014;
 - c. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 46/BA/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014 Tentang Validasi Data DPR Daerah Pemilihan: Jawa Barat III;
 - d. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 47/BA/IV/2014 tanggal 8 Mei 2014, Tentang Perubahan Model DC Setelah Pencermatan Data Pemilih dan Validasi Data;
 - e. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 48/BA/IV/2014 tanggal 13 Mei 2014, Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

1. KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN NOMOR 06-09-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)

- 1.1. Bahwa, Pemohon menyatakan sebagaimana permohonan yang tertuang dalam angka 4.11.2 dalam pokok permohonan Pemohon menyebutkan telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan



suara partai politik dari seluruh TPS di 5 Kecamatan dari 42 Kecamatan Se-Kabupaten Garut, dimana pemohon menemukan terjadinya kesalahan-kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Politik yang dilakukan oleh termohon;

Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Garut, diketahui perolehan suara berbasis Formulir Model C.1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 di Kecamatan Cigedug, Kecamatan Pamengpeuk, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Selawi, adalah sebagai berikut :

**TABEL. 11 : PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU 2014
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KAB/KOTA
DESA/KELURAHAN DI 4 KECAMATAN DI
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
(DIOLAH BERDASARKAN C.1 DAN D.1)**

Kecamatan Cigedug

1. Desa Barusuda

NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	JUMLAH
NASDEM	58	18	36	6	8	11	10	4	9	3	3	5	13	5	4	193
PKB	32	164	37	13	0	28	21	16	4	3	11	36	14	86	62	527
PKS	20	9	19	11	47	14	14	5	6	64	21	9	11	7	23	280
PDIP	17	7	18	17	30	18	25	14	28	31	15	45	19	5	5	294
GOLKAR	27	49	46	62	84	49	32	80	129	89	55	61	60	11	6	840
GERINDRA	13	13	23	25	22	31	12	5	6	24	17	18	17	2	20	248
DEMOKRAT	4	24	11	19	35	15	15	12	18	5	23	19	25	10	12	247
PAN	100	47	12	45	49	62	106	118	41	12	61	4	18	32	58	765
P3	49	19	75	22	84	53	98	5	5	29	60	41	71	24	27	662
HANURA	11	18	44	23	14	7	6	8	8	6	3	2	12	5	9	176
PBB	1	4	2	3	2	2	0	0	0	0	1	4	5	2	12	38
PKPI	5	2	0	1	1	1	2	0	0	1	0	2	0	1	0	16
JUMLAH	337	374	323	247	376	291	341	267	254	267	270	246	265	190	238	4286



2. Desa Cigedug

NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
NASDEM	3	51	9	9	8	5	10	8	12	2	117
PKB	121	7	74	57	38	126	58	98	30	30	639
PKS	5	14	8	26	4	4	50	20	8	8	147
PDIP	3	19	44	2	2	4	13	14	7	1	109
GOLKAR	2	28	31	7	5	10	27	29	20	61	220
GERINDRA	4	53	35	8	2	7	17	23	28	12	189
DEMOKRAT	17	58	20	11	30	6	24	15	13	20	214
PAN	104	36	11	33	5	1	23	22	55	36	326
P3	6	12	12	83	43	60	71	27	21	94	429
HANURA	26	24	12	32	57	35	26	43	45	19	319
PBB	1	5	3	2	2	3	1	0	2	1	20
PKPI	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
JUMLAH	292	308	259	270	196	262	320	299	241	285	2732

3. Desa Cinta Negara

NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
NASDEM	3	5	6	3	4	13	14	3	13	15	79
PKB	13	19	19	14	11	5	13	5	13	8	120
PKS	11	44	4	87	6	6	4	8	7	7	184
PDIP	13	6	10	3	3	2	4	2	12	7	62
GOLKAR	12	14	11	4	5	12	18	3	26	25	130
GERINDRA	3	15	12	0	2	4	21	12	14	4	87
DEMOKRAT	6	9	11	7	21	18	27	12	5	8	124
PAN	46	73	50	32	89	44	140	17	42	18	551
P3	87	55	68	14	100	73	35	106	53	42	633
HANURA	12	8	38	3	4	41	12	84	29	25	256
PBB	1	1	32	0	1	2	4	1	3	23	68
PKPI	2	0	11	0	2	1	4	1	6	1	28
JUMLAH	209	249	272	167	248	221	296	254	223	183	2322

4. Desa Sindang Sari



NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
NASDEM	11	14	2	7	3	1	3	5	14	5	65
PKB	33	14	30	59	108	61	10	52	11	34	412
PKS	3	7	5	5	1	4	3	18	6	11	63
PDIP	6	6	11	4	7	15	30	8	4	8	99
GOLKAR	79	32	47	12	42	66	59	36	21	16	410
GERINDRA	3	6	3	5	3	12	5	43	12	29	121
DEMOKRAT	3	8	3	34	7	4	2	6	13	4	84
PAN	32	18	14	16	20	35	13	26	9	46	229
P3	51	86	65	14	4	45	9	50	254	8	586
HANURA	11	42	23	16	11	10	16	24	14	7	174
PBB	17	22	7	6	1	1	0	0	4	2	60
PKPI	1	1	0	1	5	0	3	1	0	1	13
JUMLAH	250	256	210	179	212	254	153	269	362	171	2316

5. Desa Suka Hurip

NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
NASDEM	7	4	6	10	5	2	9	4	11	6	64
PKB	27	109	61	18	136	55	49	65	149	82	751
PKS	26	6	14	23	26	17	31	0	13	11	167
PDIP	6	3	5	4	2	5	37	6	2	13	83
GOLKAR	64	15	27	10	14	44	55	38	11	74	352
GERINDRA	8	1	4	9	9	11	13	12	53	10	130
DEMOKRAT	7	12	6	3	1	1	7	2	3	6	48
PAN	4	12	42	159	20	28	17	22	21	40	365
P3	17	13	43	61	15	27	40	7	26	31	280
HANURA	27	2	19	2	7	2	20	25	54	3	161
PBB	1	1	0	1	1	0	4	5	0	1	14
PKPI	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	6
JUMLAH	195	179	229	301	236	192	283	186	343	277	2421

Berikut ini Rekapitulasi hasil Perhitungan perolehan suara partai politik dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR tahun 2014 di kecamatan Cigedug :



NAMA PARTAI	BARUSUDA	CIGEDUG	SUKAHURIP	SINDANGSARI	CINTANAGAR	JUMLAH
NASDEM	193	161	66	65	108	593
PKB	574	819	834	512	182	2921
PKS	280	239	214	63	271	1067
PDIP	294	245	86	97	106	828
GOLKAR	840	725	387	410	234	2596
GERINDRA	248	330	140	121	115	954
DEMOKRAT	247	365	53	84	182	931
PAN	765	464	387	229	75	1920
P3	662	770	297	586	946	3261
HANURA	176	477	174	174	339	1340
PBB	38	40	16	60	88	242
PKPI	16	10	7	13	33	79
JUMLAH	4333	4645	2661	2414	2679	16732

2. Kecamatan Pameungpeuk

a. Desa Bojong

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	NASDEM	6	0	9	6	11	8	5	3	48
2	PKB	67	70	15	49	68	28	25	6	328
3	PKS	12	2	9	7	19	6	8	3	66
4	PDIP	1	8	1	5	8	3	4	8	38
5	GOLKAR	29	24	23	12	21	11	30	4	154
6	GERINDRA	4	7	22	19	19	17	17	12	117
7	DEMOKRAT	4	4	1	16	8	2	9	16	60
8	PAN	39	30	33	33	106	86	60	23	410
9	P3	23	13	13	18	4	1	1	1	74
10	HANURA	3	3	1	1	3	2	2	0	15
11	PBB	0	1	3	1	0	1	1	1	8
12	PKPI	2	1	0	1	0	1	1	1	7
	JUMLAH	190	163	130	168	267	166	163	78	1325

b. Desa Bojong Kidul

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	NASDEM	6	3	5	9	16	4	2	18	63
2	PKB	13	31	39	13	19	43	15	1	174
3	PKS	5	32	11	4	8	0	18	12	90
4	PDIP	12	12	7	8	1	0	5	1	46
5	GOLKAR	30	23	33	55	62	14	6	30	253
6	GERINDRA	10	8	9	13	6	5	3	1	55
7	DEMOKRAT	32	39	16	48	29	17	13	5	199
8	PAN	22	20	38	63	40	37	53	37	310
9	P3	3	7	5	2	3	5	2	8	35
10	HANURA	3	3	2	6	4	0	3	2	23
11	PBB	1	2	1	3	0	0	0	1	8
12	PKPI	7	4	2	2	0	1	0	0	16
	JUMLAH	144	184	168	226	188	126	120	116	1272

c. Desa Jati Mulya



NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	NASDEM	9	29	24	4	7	12	2	6	93
2	PKB	7	24	6	9	9	26	30	12	123
3	PKS	16	6	1	15	16	6	18	12	90
4	PDIP	51	25	14	28	49	11	9	39	226
5	GOLKAR	17	40	57	19	61	45	33	52	324
6	GERINDRA	10	10	12	30	26	15	21	41	165
7	DEMOKRAT	13	9	30	45	16	8	14	13	148
8	PAN	59	156	53	69	46	59	37	27	506
9	P3	4	12	1	6	4	4	2	6	39
10	HANURA	3	9	1	6	2	5	2	6	34
11	PBB	1	7	4	5	5	13	3	3	41
12	PKPI	0	0	0	1	0	0	2	1	4
	JUMLAH	190	327	203	237	241	204	173	218	1793

d. Desa Mandala Kasih

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	NASDEM	4	6	7	20	25	10	9	5	86
2	PKB	3	8	40	11	18	16	20	9	125
3	PKS	34	24	10	40	5	16	12	18	159
4	PDIP	6	5	17	9	5	30	3	3	78
5	GOLKAR	36	29	26	34	83	53	14	5	280
6	GERINDRA	16	11	13	12	8	20	14	3	97
7	DEMOKRAT	20	22	16	17	15	28	16	8	142
8	PAN	85	60	28	63	31	28	50	76	421
9	P3	1	7	8	11	21	25	6	1	80
10	HANURA	7	11	7	5	3	3	2	0	38
11	PBB	5	13	3	2	7	18	7	5	60
12	PKPI	1	0	0	1	0	0	1	0	3
	JUMLAH	218	196	175	225	221	247	154	133	1569

e. Desa Paas

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	NASDEM	3	6	9	4	7	11	6	13	59
2	PKB	20	24	20	11	29	20	26	27	177
3	PKS	24	24	26	21	5	13	26	10	149
4	PDIP	45	46	20	15	18	22	15	36	217
5	GOLKAR	46	71	63	40	29	56	36	64	405
6	GERINDRA	6	6	12	4	19	19	13	8	87
7	DEMOKRAT	27	18	24	13	4	8	9	14	117
8	PAN	99	102	77	78	39	95	110	52	652
9	P3	8	6	12	4	6	13	7	8	64
10	HANURA	3	0	7	2	9	28	42	8	99
11	PBB	7	3	2	2	2	5	4	2	27
12	PKPI	0	0	2	1	0	2	0	1	6
	JUMLAH	288	306	274	195	167	292	294	243	2059

f. Desa Pameungpeuk



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	81
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	18	
1	NASDEM	7	3	5	6	10	60	32	8	12	2	13	158
2	PKB	37	22	3	19	25	4	53	21	86	11	27	308
3	PKS	58	12	1	16	5	9	5	20	19	8	9	162
4	PDIP	29	55	16	12	19	12	12	22	27	6	9	219
5	GOLKAR	54	46	18	34	89	32	87	95	86	60	48	649
6	GERINDRA	16	6	8	28	29	17	14	19	16	11	20	184
7	DEMOKRAT	33	14	16	17	60	6	11	17	11	13	18	216
8	PAN	67	28	33	50	83	79	76	20	61	22	41	560
9	P3	10	7	11	13	10	3	6	13	15	18	1	107
10	HANURA	4	4	8	3	6	5	3	4	2	5	15	59
11	PBB	4	4	4	0	7	1	4	2	8	1	4	39
12	PKPI	5	1	2	7	1	1	2	0	0	0	0	19
	JUMLAH	324	202	125	205	344	229	305	241	343	157	205	2680

g. Desa Sirna Bakti

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	NASDEM	2	11	32	18	15	8	3	24	113
2	PKB	2	59	78	116	26	66	20	0	367
3	PKS	11	9	4	2	20	3	2	6	57
4	PDIP	12	35	7	4	9	14	11	7	99
5	GOLKAR	13	37	35	57	44	16	83	32	317
6	GERINDRA	1	20	7	3	12	1	8	7	59
7	DEMOKRAT	0	24	7	17	28	4	43	10	133
8	PAN	108	70	5	22	37	99	34	101	476
9	P3	0	5	8	5	7	6	11	5	47
10	HANURA	1	6	2	2	12	1	8	2	34
11	PBB	0	4	1	1	2	9	15	0	32
12	PKPI	3	0	0	0	1	0	0	0	4
	JUMLAH	153	280	186	247	213	227	238	194	1738

Model DA Kec. Pameungpeuk

NO	NAMA PARTAI	MANCAGAHAR	PAMEMPEK	BOJONG	BOJONG KIDUL	PAAS	MANDALAKASIH	SIRN Bkti	JATI MULYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	NASDEM	53	219	48	63	90	125	128	118	844
2	PKB	306	455	328	174	495	253	550	198	2759
3	PKS	82	286	66	90	182	225	110	131	1172
4	PDIP	413	261	38	46	287	141	137	127	1450
5	GOLKAR	423	915	154	253	610	479	485	497	3816
6	GERINDRA	225	296	117	55	132	152	94	260	1331
7	DEMOKRAT	217	303	60	199	175	302	172	226	1654
8	PAN	616	845	410	310	806	1071	812	746	5616
9	P3	52	140	74	35	92	124	65	54	636
10	HANURA	40	84	15	23	145	58	44	46	455
11	PBB	29	54	8	8	36	100	93	78	406
12	PKPI	9	28	7	16	9	6	5	6	86
	JUMLAH	2465	3886	1325	1272	3059	3036	2695	2487	20225

Kecamatan Cisewu

Desa : Cikarang Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Jumlah
1	Nasdem	4	4	32	10	16	10	5	4	15	28	128
2	PKB	8	7	18	50	27	10	20	15	11	17	183
3	PKS	23	24	25	12	7	24	32	14	24	20	238
4	PDIP	23	24	25	12	7	24	32	14	24	20	238



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa : Cisewu Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	Jumlah
1	NASDEM	9	8	10	14	4	9	2	4	14	3	8	85
2	PKB	12	31	36	114	16	13	12	19	80	20	10	363
3	PKS	24	14	1	8	22	19	8	28	43	3	21	191
4	PDI PERJUANGAN	19	4	7	7	27	26	57	112	13	6	17	295
5	GOLKAR	102	111	110	114	123	236	165	125	78	160	80	1.404
6	GERINDRA	47	29	20	27	11	26	16	11	5	14	40	246
7	DEMOKRAT	28	29	8	9	15	17	20	11	14	15	18	184
8	PAN	16	17	11	5	17	5	3	-	1	4	6	85
9	PPP	15	14	4	1	3	3	8	12	3	3	4	70
10	HANURA	8	14	13	3	9	7	12	8	1	10	12	97
14	PBB	12	1	1	1	2	3	-	-	2	-	2	24
15	PKPI	3	5	3	1	4	7	-	-	5	1	-	29
Suara Sah		295	277	224	304	253	371	303	330	259	239	218	3.073

Desa : Girimukti Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jumlah
1	Nasdem	15	5	12	13	45	7	7	10	114
2	PKB	12	7	6	20	13	4	13	9	84
3	PKS	4	6	6	17	3	2	-	1	39
4	PDI PERJUANGAN	10	7	7	26	11	21	28	5	115
5	GOLKAR	137	130	151	86	88	145	172	188	1.097
6	GERINDRA	32	42	40	94	9	10	22	15	264
7	DEMOKRAT	21	18	11	20	1	18	9	20	118
8	PAN	2	6	3	2	3	1	2	1	20
9	PPP	3	3	4	5	-	1	2	6	24
10	HANURA	16	3	9	3	8	10	6	16	71
14	PBB	7	1	-	2	-	4	2	1	17
15	PKPI	19	1	2	27	2	4	2	4	61
Suara Sah		278	229	251	315	183	227	265	276	2.024

Desa : Karangsewu Kabupaten : Garut
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah
1	NASDEM	9	7	7	25	5	53
2	PKB	27	59	13	27	10	136
3	PKS	24	6	7	10	6	53
4	PDI PERJUANGAN	24	17	31	17	19	108
5	GOLKAR	108	48	59	107	108	430
6	GERINDRA	8	12	3	14	22	59
7	DEMOKRAT	29	10	26	22	71	158
8	PAN	14	1	3	4	3	25
9	PPP	3	2	1	2	35	43
10	HANURA	29	3	3	41	23	99
14	PBB	2	1	26	-	2	31
15	PKPI	9	10	7	7	9	42
Suara Sah		286	176	186	276	313	1.237



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa : Mekarsewu Kabupaten : Garut
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah
1	NASDEM	18	7	7	8	4	44
2	PKB	6	16	5	3	4	34
3	PKS	16	8	7	3	8	42
4	PDI PERJUANGAN	18	7	20	14	3	62
5	GOLKAR	180	51	83	131	102	547
6	GERINDRA	18	6	12	18	29	83
7	DEMOKRAT	23	45	10	10	8	96
8	PAN	20	26	9	10	2	67
9	PPP	2	-	8	4	-	14
10	HANURA	13	10	34	11	3	71
14	PBB	1	-	-	-	1	2
15	PKPI	2	-	6	1	1	10
Suara Sah		317	176	201	213	165	1.072

Desa : Nyalindung Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jumlah
1	NASDEM	6	18	5	5	28	8	16	3	23	62
2	PKB	14	29	9	48	35	24	39	18	15	135
3	PKS	4	7	29	13	4	7	4	11	1	57
4	PDI PERJUANGAN	4	9	4	25	8	13	21	22	3	50
5	GOLKAR	150	186	77	80	93	69	168	70	59	586
6	GERINDRA	25	33	26	24	21	77	43	41	24	129
7	DEMOKRAT	11	9	8	14	5	11	21	8	17	47
8	PAN	3	7	3	3	3	4	1	1	5	19
9	PPP	9	12	4	2	4	2	9	3	4	31
10	HANURA	6	3	6	17	5	17	12	11	2	37
14	PBB	1	3	-	-	6	4	1	-	19	10
15	PKPI	1	1	1	3	3	8	2	2	8	9
Suara Sah		234	317	172	234	215	244	337	190	180	1.172

Desa : Pamalayan Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jumlah
1	NASDEM	6	4	4	7	6	6	24	9	32	98
2	PKB	8	2	8	6	16	16	8	17	28	109
3	PKS	7	15	12	15	6	7	3	16	14	95
4	PDI PERJUANGAN	4	18	11	24	12	8	11	20	40	148
5	GOLKAR	132	143	149	49	89	143	105	105	77	992
6	GERINDRA	27	14	11	10	5	23	25	29	14	158
7	DEMOKRAT	-	6	8	13	13	9	14	34	18	115
8	PAN	3	6	6	48	8	6	4	8	8	97
9	PPP	2	3	2	12	2	3	10	10	48	92
10	HANURA	23	24	23	19	5	11	6	20	21	152
14	PBB	-	4	2	1	36	1	-	2	6	52
15	PKPI	-	3	3	3	1	6	7	1	6	30
Suara Sah		212	242	239	207	199	239	217	271	312	2.138

Desa : Pangajene Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah
1	NASDEM	23	13	22	12	4	27	16	138
2	PKB	23	13	22	12	4	27	16	107

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Gencar Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia, Jl. Merdeka No.16 Jakarta 10110 Telp. (021) 23529000, Fax (021) 35201777, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa : Sukajaya Kabupaten : Garut Daerah Pemilihan : Jawa Barat XI
Kecamatan : Cisewu Provinsi : Jawa Barat

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Jumlah
1	Nasdem	14	43	16	8	12	3	5	3	8	6	118
2	PKB	8	43	8	50	137	57	71	13	28	42	457
3	PKS	3	4	19	16	13	17	27	4	24	4	131
4	PDI PERJUANGAN	7	13	7	64	5	13	23	20	25	15	192
5	GOLKAR	64	97	154	100	121	69	88	149	123	85	1.050
6	GERINDRA	11	7	71	38	16	7	7	4	12	14	187
7	DEMOKRAT	7	7	11	17	15	10	15	8	25	30	145
8	PAN	1	4	24	14	20	2	4	5	3	15	92
9	PPP	3	2	12	15	7	4	12	27	13	11	106
10	HANURA	144	46	49	54	19	26	41	53	43	54	529
14	PBB	1	1	2	1	2	2	3	3	-	1	16
15	PKPI	2	2	4	2	2	8	3	14	7	11	55
Suara Sah		265	269	377	379	369	218	299	303	311	288	3.078

Kecamatan BL. Limbangan

a. Desa Cijolang

No	Partai Politik	Cisewu	Pamalayan	Sukajaya	Cikarang	Girimukti	Nyalindung	Karangsewu	Mekarsewu	Panggalih	Jumlah
1	Nasdem	85	98	118	128	114	112	53	44	138	890
2	PKB	363	109	457	183	84	241	136	34	107	1.714
3	PKS	191	95	131	101	39	80	53	42	185	917
4	PDI PERJUANGAN	295	148	192	228	115	109	108	62	125	1.382
5	GOLKAR	1.404	992	1.050	827	1.090	952	430	547	696	7.988
6	GERINDRA	246	158	187	250	264	314	59	82	71	1.631
7	DEMOKRAT	184	115	145	416	118	104	158	96	118	1.454
8	PAN	85	97	92	34	20	30	25	67	65	515
9	PPP	70	92	106	53	24	49	43	14	117	568
10	HANURA	97	152	529	162	71	79	99	71	323	1.583
14	PBB	24	52	16	39	17	34	31	2	22	237
15	PKPI	29	30	55	177	61	29	42	10	28	461
JUMLAH		3.073	2.138	2.074	2.501	2.133	1.237	1.071	1.995	1.930	19.340

b. Desa Sagade

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
1	NASDEM	4	6	2	0	3	4	7	2	10	16	54
2	PKB	56	44	156	113	17	47	19	76	71	55	654
3	PKS	7	7	51	12	4	12	20	28	43	4	188
4	PDIP	9	26	7	3	15	10	42	27	31	20	190
5	GOLKAR	17	16	24	3	19	21	13	11	20	10	154
6	GERINDRA	7	11	11	4	23	15	7	4	6	10	98
7	DEMOKRAT	19	27	86	20	143	43	106	33	13	34	524
8	PAN	10	7	2	4	6	14	9	9	4	2	67
9	PPP	15	26	27	4	10	2	2	16	15	58	175
10	HANURA	8	20	3	23	28	22	18	13	4	6	145
11	PBB	0	2	1	0	2	1	1	3	1	0	11
12	PKPI	0	0	3	0	1	0	1	0	2	1	8
JUMLAH		152	192	373	186	271	191	245	222	220	216	2268



c. Desa Ciwangi

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	JUMLAH
1	NASDEM	9	8	14		4	12	7	13	7	9	6	9	4	71
2	PKB	49	39	23		24	87	146	75	37	39	46	131	15	600
3	PKS	13	5	12		2	0	8	11	1	8	4	9	3	46
4	PDIP	16	18	5		7	4	13	18	1	6	3	11	3	66
5	GOLKAR	58	34	37		35	51	17	22	2	14	23	40	6	210
6	GERINDRA	14	12	10		11	6	16	17	3	18	10	17	5	103
7	DEMOKRAT	38	39	34		42	29	12	69	7	96	18	15	18	306
8	PAN	6	7	7		0	0	3	4	1	1	3	6	6	24
9	PPP	26	20	25		20	9	1	8	3	3	2	107	7	160
10	HANURA	53	83	111		82	32	27	42	123	111	27	101	57	602
11	PBB	1	3	4		0	2	1	0	3	5	4	2	0	17
12	PKPI	6	12	0		1	1	1	1	0	8	0	6	0	18
	JUMLAH	289	280	282	0	228	233	252	280	188	318	146	454	124	2223

d. Desa Dunguswiru

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	NASDEM	2	22	16	12	11	8	1	5	77
2	PKB	10	64	19	44	34	15	12	6	204
3	PKS	5	5	88	18	20	14	3	36	189
4	PDIP	8	18	28	20	43	37	6	4	164
5	GOLKAR	28	33	20	25	16	73	19	21	235
6	GERINDRA	24	25	6	14	24	5	5	11	114
7	DEMOKRAT	32	42	54	69	61	65	40	70	433
8	PAN	102	2	7	8	9	5	4	8	145
9	PPP	2	28	25	27	11	23	3	2	121
10	HANURA	9	14	19	29	25	23	8	12	139
11	PBB	0	1	6	5	4	0	1	1	18
12	PKPI	0	5	1	1	0	0	2	5	14
	JUMLAH	222	259	289	272	258	268	104	181	1853

e. Desa Galihpakuwon

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
1	NASDEM	2	3	4	1	8	7	7	3	1	7	43
2	PKB	15	15	33	25	4	18	20	26	10	20	186
3	PKS	4	11	1	1	8	9	5	8	9	8	64
4	PDIP	7	14	10	75	116	48	37	42	35	14	398
5	GOLKAR	30	22	111	34	21	43	26	19	34	20	360
6	GERINDRA	24	18	8	3	9	14	12	8	14	10	120
7	DEMOKRAT	12	7	8	31	19	60	61	27	37	10	272
8	PAN	12	1	21	36	6	2	5	3	8	3	97
9	PPP	17	27	3	6	28	11	18	12	10	7	139
10	HANURA	27	21	35	16	45	43	63	113	138	93	594
11	PBB	1	0	5	6	2	0	3	0	3	0	20
12	PKPI	0	0	0	0	0	5	1	7	2	12	27
	JUMLAH	151	139	239	234	266	260	258	268	301	204	2320

f. Desa Limbangan Barat



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	JUMLAH
1	NASDEM	2	1	2	1	28	3	2	2	4	7	3	55
2	PKB	16	10	12	45	47	17	32	81	82	14	12	368
3	PKS	5	5	11	4	2	4	6	7	3	3	6	56
4	PDIP	16	9	13	4	2	5	4	9	10	9	5	86
5	GOLKAR	22	13	24	11	6	38	15	5	11	17	6	168
6	GERINDRA	20	11	13	16	13	20	8	6	14	16	10	147
7	DEMOKRAT	139	192	65	79	111	140	40	106	65	84	128	1149
8	PAN	15	4	7	4	1	4	10	13	15	3	3	79
9	PPP	25	28	24	95	39	41	114	70	50	50	16	552
10	HANURA	34	5	4	13	19	12	6	6	33	12	8	152
11	PBB	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	7
12	PKPI	4	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	9
	JUMLAH	300	280	175	273	268	287	238	305	287	217	198	2828

Desa Limbangan Timur

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	JUMLAH
1	NASDEM	14	10	14	23	1	2	11	0	3	7	4	4	5	3	12	113
2	PKB	8	37	11	13	7	34	8	6	15	7	9	29	4	36	16	240
3	PKS	8	3	3	5	5	30	15	8	4	5	2	13	6	2	1	110
4	PDIP	17	22	29	6	24	4	14	9	9	13	12	10	5	4	19	197
5	GOLKAR	31	13	38	51	18	6	32	20	15	53	17	34	17	5	25	375
6	GERINDRA	17	12	17	7	8	2	20	7	9	12	18	8	8	5	15	165
7	DEMOKRAT	49	20	19	53	47	26	19	13	24	49	86	43	25	3	34	510
8	PAN	4	0	1	6	0	3	5	1	1	2	6	5	2	1	2	39
9	PPP	8	8	10	39	2	10	5	5	8	4	42	34	7	7	7	196
10	HANURA	176	67	45	121	151	117	141	92	154	90	68	80	64	140	40	1546
11	PBB	0	0	0	0	0	3	0	1	0	117	0	0	1	2	0	124
12	PKPI	3	3	7	2	2	1	2	1	1	4	1	1	0	1	6	35
	JUMLAH	335	195	194	326	265	238	272	163	243	363	265	261	144	209	177	3650

Desa Neglasari

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH
1	NASDEM	2	3	2	1	9	5	5	3	7	17	3	12	69
2	PKB	37	35	90	51	48	91	5	17	12	80	104	77	647
3	PKS	11	13	17	9	11	7	4	7	15	3	12	6	115
4	PDIP	14	37	18	11	19	16	24	7	5	18	7	4	180
5	GOLKAR	9	32	10	27	23	21	22	26	38	12	5	4	229
6	GERINDRA	17	12	11	19	23	20	18	21	7	11	5	1	165
7	DEMOKRAT	36	24	6	19	43	40	75	23	45	25	8	4	348
8	PAN	4	4	0	9	3	8	7	4	10	2	5	0	56
9	PPP	36	5	22	27	40	40	20	64	35	51	54	66	460
10	HANURA	54	32	36	37	24	35	29	15	10	7	13	4	296
11	PBB	5	7	2	1	1	1	1	1	1	3	0	1	24
12	PKPI	3	1	0	2	2	13	2	3	3	2	0	2	33
	JUMLAH	228	205	214	213	246	297	212	191	188	231	216	181	2622

Desa Pasir waru



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH
1	NASDEM	5	6	13	14	3	1	5	1	3	4	6	5	66
2	PKB	57	13	22	7	12	99	13	48	58	43	26	73	471
3	PKS	4	4	46	5	13	2	1	5	3	39	9	18	149
4	PDIP	3	2	7	5	9	16	7	3	9	7	3	3	74
5	GOLKAR	14	6	25	7	32	10	18	10	10	20	8	16	176
6	GERINDRA	6	10	9	2	19	8	22	5	9	7	3	3	103
7	DEMOKRAT	25	17	35	41	55	26	73	27	35	75	46	176	631
8	PAN	4	1	19	1	18	1	1	3	3	1	0	7	59
9	PPP	54	14	14	2	5	4	0	32	54	27	10	35	251
10	HANURA	78	114	105	154	145	37	65	38	49	59	25	12	881
11	PBB	2	2	0	1	2	0	0	2	2	1	1	5	18
12	PKPI	2	3	2	0	1	1	0	2	2	1	0	1	15
	JUMLAH	254	192	297	239	314	205	205	176	237	284	137	354	2894

Desa Simpen Kaler

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	JUMLAH
1	NASDEM	8	9	4	3	16	3	5	4	3	6	4	57
2	PKB	8	4	2	4	7	13	27	12	42	39	49	199
3	PKS	4	5	1	4	4	1	9	7	6	4	1	42
4	PDIP	53	124	128	175	56	205	59	26	5	12	42	832
5	GOLKAR	47	30	25	13	61	0	26	20	8	10	17	210
6	GERINDRA	14	8	4	3	8	6	16	10	2	8	6	71
7	DEMOKRAT	28	31	33	18	22	20	38	73	1	31	20	287
8	PAN	35	5	2	3	4	5	33	80	82	13	23	250
9	PPP	34	5	7	1	0	2	21	49	11	55	24	175
10	HANURA	20	44	20	3	66	16	29	34	7	37	52	308
11	PBB	8	0	1	1	5	0	3	4	6	17	9	46
12	PKPI	2	2	0	1	1	1	2	2	0	0	0	9
	JUMLAH	261	267	227	229	250	272	268	321	173	232	247	2486

Desa Simpen Kidul

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	JUMLAH
1	NASDEM	11	8	2	10	9	9	11	8	8	13	12	101
2	PKB	31	65	52	7	19	79	17	69	63	26	29	457
3	PKS	13	21	12	11	33	2	4	12	11	7	12	138
4	PDIP	31	29	61	57	32	19	28	12	17	31	30	347
5	GOLKAR	48	45	19	13	30	31	88	36	25	51	40	426
6	GERINDRA	15	12	15	5	15	13	10	18	9	17	16	145
7	DEMOKRAT	34	56	33	52	26	15	19	44	45	32	38	394
8	PAN	3	11	7	7	2	0	3	4	3	7	6	53
9	PPP	20	8	5	5	17	11	6	59	37	32	32	232
10	HANURA	76	38	44	42	36	30	71	35	47	61	52	532
11	PBB	7	13	2	4	1	4	2	10	4	1	8	56
12	PKPI	5	0	0	0	3	0	0	20	1	1	3	33
	JUMLAH	294	298	252	213	223	213	259	327	270	279	278	2914

Desa Surabaya



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	NASDEM	3	1	14	9	7	11	2	3	51
2	PKB	32	30	15	24	39	34	28	42	246
3	PKS	8	14	11	2	7	2	5	28	80
4	PDIP	8	3	10	5	10	1	1	5	47
5	GOLKAR	11	11	7	27	2	27	7	4	101
6	GERINDRA	2	3	8	8	7	8	3	0	45
7	DEMOKRAT	29	10	52	18	48	10	8	6	188
8	PAN	1	0	0	0	5	2	6	3	25
9	PPP	74	75	65	63	43	86	59	19	493
10	HANURA	107	106	18	34	18	109	65	150	617
11	PBB	2	0	1	8	3	1	1	0	27
12	PKPI	3	10	3	0	3	1	2	0	34
	JUMLAH	280	263	204	198	192	292	187	260	1954

Desa Pangeureunan

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
1	NASDEM	1	3	14	16	9	14	7	11	9	5	89
2	PKB	144	101	23	55	30	63	29	27	9	13	494
3	PKS	15	23	2	6	4	7	0	4	4	3	68
4	PDIP	15	12	22	20	6	33	11	19	7	15	160
5	GOLKAR	22	51	33	15	24	30	4	14	64	76	333
6	GERINDRA	6	17	18	21	12	17	15	8	11	17	142
7	DEMOKRAT	29	65	18	25	44	56	9	30	53	32	361
8	PAN	7	10	1	2	3	6	3	3	2	2	39
9	PPP	46	4	2	5	9	4	1	2	3	1	77
10	HANURA	32	30	166	108	38	73	133	70	83	63	796
11	PBB	2	5	4	6	0	9	2	0	3	3	34
12	PKPI	4	3	4	0	1	4	1	0	22	1	40
	JUMLAH	323	324	307	279	180	316	215	188	270	231	2633

Model DA Kec. BL. Limbangan

NO	NAMA PARTAI	Cigagade	Cijolang	Ciwangi	Dungusw iru	Gaplak	Limbangan Barat	Limbangan Tengah	Limbangan Timur	Neglasari	Pangeure unan	Pasinwaru	simpen kaler	simpen kidul	Surabaya	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NASDEM	54	89	141	77	43	55	83	113	69	89	66	65	101	50	1095
2	PKB	654	906	739	204	199	368	322	240	647	494	471	207	457	244	6152
3	PKS	188	186	96	189	64	56	75	110	114	68	149	46	138	77	1556
4	PDIP	206	238	119	164	397	86	169	197	181	160	74	885	348	43	3267
5	GOLKAR	154	189	420	235	360	168	249	375	225	333	176	313	426	96	3719
6	GERINDRA	99	141	149	114	119	146	152	165	164	142	103	90	145	39	1768
7	DEMOKRAT	524	268	436	433	272	1149	730	510	367	361	631	315	394	181	6571
8	PAN	67	66	49	145	97	79	122	39	56	39	59	285	53	17	1173
9	P3	175	375	262	121	140	552	177	196	463	77	251	210	232	484	3715
10	HANURA	142	367	896	229	614	155	659	1546	296	796	882	361	532	607	8082
11	PBB	10	36	26	18	20	8	12	124	24	34	18	54	56	16	456
12	PKPI	8	7	39	12	27	9	26	35	33	40	12	11	33	22	314
	JUMLAH	2281	2868	3372	1941	2352	2831	2776	3650	2639	2633	2892	2842	2915	1876	37868

5. Kec. Selaawi

a. Desa Mekarsari



NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH
1	NASDEM	8	5	16	12	33	34	12	9	9	31	18	12	199
2	PKB	36	17	19	93	50	42	32	30	27	12	12	16	386
3	PKS	8	1	4	11	14	21	41	13	20	77	101	27	338
4	PDIP	8	4	6	23	37	34	12	7	12	6	1	3	153
5	GOLKAR	15	22	9	5	16	19	12	17	22	35	4	6	182
6	GERINDRA	5	4	6	6	4	3	6	8	6	2	4	2	56
7	DEMOKRAT	9	25	20	14	11	8	8	8	23	42	0	6	174
8	PAN	3	3	7	1	2	2	2	9	6	3	1	1	40
9	PPP	64	58	34	16	29	17	10	63	47	21	21	63	443
10	HANURA	113	60	66	42	21	26	30	21	46	17	11	34	487
11	PBB	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0	1	2	11
12	PKPI	4	17	29	2	6	5	3	8	10	3	9	2	98
	JUMLAH	273	218	218	227	223	212	169	193	228	249	183	174	2567

b. Desa Selaawi

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
1	NASDEM	9	3	6	8	6	10	5	9	3	12	71
2	PKB	38	35	53	56	25	15	11	35	50	68	386
3	PKS	54	14	7	14	14	16	5	25	16	12	177
4	PDIP	33	22	9	12	5	23	10	19	12	21	166
5	GOLKAR	62	70	28	35	46	33	9	22	15	16	336
6	GERINDRA	15	3	8	5	3	10	8	8	7	17	84
7	DEMOKRAT	23	29	11	15	16	13	4	34	49	27	221
8	PAN	5	14	2	5	5	3	7	7	1	4	53
9	PPP	38	7	30	28	35	9	11	66	108	108	440
10	HANURA	30	9	17	13	27	22	69	39	11	62	299
11	PBB	5	2	1	0	2	2	0	4	1	0	17
12	PKPI	4	8	2	5	6	7	1	4	3	6	46
	JUMLAH	316	216	174	196	190	163	140	272	276	353	2296

c. Desa Samida

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
1	NASDEM	8	17	6	13	4	11	18	11	42	8	138
2	PKB	64	114	7	62	24	38	116	116	40	57	638
3	PKS	14	17	6	25	19	10	37	10	9	12	159
4	PDIP	27	34	32	18	17	22	22	27	10	26	235
5	GOLKAR	87	40	114	18	10	28	15	16	14	16	358
6	GERINDRA	9	14	13	21	6	3	4	6	6	6	88
7	DEMOKRAT	21	23	16	15	73	74	21	25	7	14	289
8	PAN	7	7	1	1	1	3	2	0	0	1	23
9	PPP	34	25	17	21	24	30	16	12	26	30	235
10	HANURA	12	3	8	7	7	3	7	8	4	5	64
11	PBB	3	2	2	3	1	0	0	0	0	1	12
12	PKPI	10	4	14	1	0	3	1	2	13	1	49
	JUMLAH	296	283	236	205	186	225	259	233	171	177	2288

d. Desa Putra Jawa



NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	JUMLAH
1	NASDEM	0	7	7	5	3	1	8	3	5	4	6	3	0	3	55
2	PKB	5	63	25	132	120	145	74	133	114	176	69	42	53	63	1214
3	PKS	12	3	9	8	33	52	8	8	8	20	4	4	4	10	183
4	PDIP	3	4	10	6	7	7	21	19	1	13	17	7	33	38	186
5	GOLKAR	27	20	18	17	17	17	37	15	12	12	18	3	46	49	308
6	GERINDRA	5	7	9	6	5	8	3	2	8	4	9	2	9	12	89
7	DEMOKRAT	91	29	43	14	24	24	32	15	12	15	29	7	43	81	459
8	PAN	32	6	200	16	3	1	26	10	21	12	19	2	9	5	362
9	PPP	28	10	2	14	9	9	20	58	15	5	39	8	5	23	245
10	HANURA	18	59	13	15	12	11	13	4	7	22	14	62	16	15	281
11	PBB	0	0	0	1	3	1	3	0	1	1	7	1	1	3	22
12	PKPI	4	4	26	5	9	6	5	5	3	16	4	1	13	6	107
	JUMLAH	225	212	362	239	245	282	250	272	207	300	235	142	232	308	3511

e. Desa Cigawir

NO	NAMA PARTAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
1	NASDEM	25	16	0	7	8	18	17	19	28	2	140
2	PKB	19	18	21	10	15	4	89	58	35	46	315
3	PKS	5	9	24	10	5	8	49	17	8	11	146
4	PDIP	60	30	16	12	25	59	9	9	15	10	245
5	GOLKAR	36	27	39	66	42	45	23	29	46	33	386
6	GERINDRA	21	22	3	16	12	17	14	25	13	6	149
7	DEMOKRAT	51	29	61	10	14	49	31	67	41	30	383
8	PAN	5	2	1	2	1	34	12	5	7	1	70
9	PPP	8	4	50	7	7	8	19	20	37	9	169
10	HANURA	27	35	24	102	36	69	74	40	25	52	484
11	PBB	1	0	0	0	1	7	7	2	2	2	22
12	PKPI	12	2	15	7	0	4	4	2	1	13	60
	JUMLAH	270	194	254	249	166	322	348	293	258	215	2569

Model DA Kec. Selaaw

NO	NAMA PARTAI	SELAAWI	CIRAPUHAN	SAMIDA	PUTRAJAWA	CIGAWIR	MEKARSARI	PENGASIHAN	JUMLAH
1	NASDEM	71	89	138	54	140	199	93	784
2	PKB	456	562	698	1214	315	386	328	3959
3	PKS	177	193	159	183	146	338	81	1277
4	PDIP	166	452	235	186	245	153	167	1604
5	GOLKAR	340	382	358	308	389	182	327	2286
6	GERINDRA	84	186	88	89	149	56	76	728
7	DEMOKRAT	221	735	289	459	383	174	394	2655
8	PAN	53	61	23	362	70	40	75	684
9	PPP	460	616	235	245	169	443	117	2285
10	HANURA	389	334	64	345	484	487	176	2279
11	PBB	17	31	12	15	22	11	4	112
12	PKPI	46	46	49	107	60	98	21	427
	JUMLAH	2480	3598	2348	3567	2572	2567	1859	19080

4.1 Bahwa, Pemohon dalam Pokok permohonannya angka 5.12.1, menyebutkan : Perolehan Suara Pemohon Partai Politik di Dapil Jabar XI, untuk pengisian keanggotaan DPR adalah 343.384 suara. Bahwa, dari hasil Pengawasan diperoleh Data Perolehan suara Partai Politik di Daerah Pemilihan Jabar XI adalah sebagai berikut :



N O	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLA H
		KAB. GARUT	KAB. TASIKMALAY A	KOTA TASIKMALAY A	
1.	NASDEM	56620	37606	11561	105687
2.	PKB	171028	137976	28166	337170
3.	PKS	87521	70920	28652	187093
4.	PDIP	131155	127444	44914	303513
5.	GOLKAR	204429	129937	35535	369901
6.	GERINDRA	78944	74143	22601	175688
7.	DEMOKRAT	121372	76872	32642	230886
8.	PAN	100879	82831	39394	223104
9.	PPP	118168	145560	78602	342330
10.	HANURA	75157	17293	7956	100406
14.	PBB	32086	9886	11366	53338
15.	PKPI	10670	3482	987	15139

4.2 Bahwa, Pemohon dalam Pokok permohonannya angka 1.1.1, menyebutkan : Perolehan Suara Pemohon Partai Politik di Dapil Jabar II, untuk pengisian keanggotaan DPR adalah **141.388**

TABEL. 12 DATA HASIL PENGAWASAN PEROLEHAN SUARA
: PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN JABAR II
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH
		KAB.Bandung	KAB.Bandung Barat	
1.	NASDEM	85490	33491	118981
2.	PKB	112989	51790	164779
3.	PKS	122721	66204	188925
4.	PDIP	277339	181570	458909
5.	GOLKAR	325163	106752	431915
6.	GERINDRA	186365	88046	274411



7.	DEMOKRAT	216832	92447	309279
8.	PAN	94845	41920	136765
9.	PPP	69818	50930	120748
10.	HANURA	91636	52264	143900
14.	PBB	39152	19702	58854
15.	PKPI	6859	8614	15473

4.3 Bahwa, Pemohon dalam Pokok permohonannya angka 1.1.2, menyebutkan : Perolehan Suara Pemohon Perseorangan MUAMAR GADAFI di Dapil Kabupaten Bekasi IV (empat), untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi.

Bahwa, hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Bekasi, Hasil Perolehan suara Pemohon Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif di Dapil Bekasi IV adalah sebagai berikut :

TABEL. 13 PEROLEHAAN SUARA PEMOHON DI DAPIL IV KAB.
 : BEKASI

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
PPP		3.824
1	H. KAIRAN	4.083
2	MUAMMAR GADAFI	3.923
3	HJ. YUYUN KHOERUNI, S.Pd	2.076
4	ARINI, SH	870
5	HERIYADI	687
6	IIN I'ANATUNI NAHDLOH	103
7	Drs. M. MA'RUF, MM	861
8	LIA KHOFIAH	64
9	H. AHMAD RIFQI, S.Ag	982
10	NURFALAH	125
11	SUBUR, S.Pd.I	252
JUMLAH		17.850



4.4 Bahwa, Pemohon dalam Pokok permohonann angka 1.1.3, menyebutkan : Perolehan Suara Pemohon di Dapil Kabupaten Bekasi V (LIMA) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi.

Bahwa, hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Bekasi, Hasil Perolehan suara Pemohon Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif di Dapil Bekasi V adalah sebagai berikut :

TABEL. 14 PEROLEHAAN SUARA PARTAI POLITIK DI DAPIL V KAB. BEKASI

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	NasDem	10.481
2	PKB	10.629
3	PKS	19.195
4	PDIP	23.796
5	GOLKAR	49.759
6	GERINDRA	18.576
7	DEMOKRAT	18.153
8	PAN	16.306
9	PPP	16.241
10	HANURA	10.319
14	PBB	6.128
15	PKPI	3.001
Total Suara Sah		202.584

4.5 Bahwa, Pemohon dalam Pokok permohonannya angka 1.1.4, menyebutkan : Perolehan Suara Pemohon di Dapil Kabupaten Cianjur 1 (satu) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur

Bahwa, hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Cianjur, Hasil Perolehan suara di Dapil Cianjur 1 (satu) adalah sebagai berikut :

TABEL. 15 HASIL PENGAWASAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
 :
 DI DAPIL CIANJUR 1 UNTUK PENGISIAN CALON
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN



No	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1.	NASDEM	9.802	10
2.	PKB	15.621	5
3.	PKS	13.677	6
4.	PDIP	20.926	4 sisa 2951
5.	Partai Golkar	28.252	3 sisa 10,277 (9)
6.	Partai Gerindra	13.923	7
7.	Partai Demokrat	43.096	1, 2 sisa 7.146
8.	PAN	6.189	
9.	PPP	9.624	
10.	Partai Hanura	11.173	8
11.	PBB	6.343	
12.	PKPI	896	
	jumlah	179.743	10 ursi

2. KETERANGAN LAIN

3.1 LANGKAH PENCEGAHAN PENGAWASAN

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang signifikan mempengaruhi hasil Pemilu yaitu melaksanakan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang meliputi :

- a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.



- c. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- d. Pelaksanaan kampanye;
- e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- f. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
- g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- h. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- i. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- j. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- k. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- l. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- m. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- n. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- o. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- p. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- q. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3.2. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat :

- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

3.4 LANGKAH PENINDAKAN

- a. Bahwa, selama penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Bawaslu Provinsi Jawa Barat Menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagai berikut :

TABEL 16 : REKAPITULASI DATA LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DALAM TAHAPAN KAMPANYE RAPAT UMUM PILEG 2014 DI PROVINSI JAWA BARAT

NO	JENIS PELANGGARAN	Jumlah Kasus	Jumlah Kab/Kota	KETERANGAN
----	-------------------	--------------	-----------------	------------



1	MOBILISASI WNI YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH	55	14	Kab Cianjur (12 kasus), Kab Sukabumi (6), Kota Depok (8), Kota Bekasi (5), Kab Bogor (5), Kab Purwakarta (4), Kab Bandung (3), Kab Indramayu (2), Kab Bandung Barat (2), Kab Garut (4), Kab Sumedang (1), Kab Kuningan (1), Kota Cimahi (1), Kota Sukabumi (1)
2	KETERLIBATAN PNS	6	4	Kota Tasikmalaya (2 kasus), Kota Bekasi, Kab Cianjur, Kab Ciamis, Kab Garut dan Kab Indramayu masing-masing 1 Kasus
3	MENGGUNAKAN FASILITAS PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN	8	5	Kota Bekasi (4 Kasus), Kab Kuningan, Kab Subang, Kota Bogor dan Kota Tasikmalaya 1 kasus
4	MENGIKUTSERTAKAN KEPALA DESA	3	3	Kab Kuningan, Kab Sumedang, dan Kab. Subang
5	KAMPANYE DI LUAR JADWAL	28	12	Kota Bogor (9 kasus), Kab Indramayu (4), Kota Cirebon (3), Kab Cianjur (3), Kab Kuningan (2), Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya masing2 1 kasus.
6	SENGKETA PEMILU	2	2	Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi
7	PERUSAKAN APK, PEMASANGAN APK DI ZONA TERLARANG	4	4	Kab Cianjur, Kab Indramayu, Kota Bekasi dan Kota Cirebon
8	BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM)	2	2	Kab Indramayu dan Kota Cirebon



9	MONEY POLITICS (POLITIK UANG)	34	14	Kab Ciamis (7 Kasus), Kota Bekasi (5), Kota Tasikmalaya (4), kab Indramayu (3), Kab Purwakarta (3), Kab Bandung (2), Kab Karawang (1), Kab Cianjur (1), Kab Cirebon (1), Kab Bogor (1), Kab Kuningan (1), Kota Bandung (1), Kab Bekasi (1), Kota Sukabumi (1), Bawaslu Jabar (1)
10	KAMPANYE MELIBATKAN PERANGKAT DESA	3	1	Kab Majalengka (3 kasus),
11	MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM	4	3	Kab Garut (2 kasus), Kota Sukabumi, Kota Depok,
TOTAL		149		

- b. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Barat Menerima Laporan Setelah Pemungutan Dan Penghitungan Suara Sebanyak 87 Laporan Terkait Dugaan Penggelembungan Suara;
- c. Bahwa, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 198 ayat (1) yang berbunyi :
- “Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU Provinsi”*
- d. Bahwa, Terkait Laporan Dugaan Penggelembungan Suara yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, maka Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPU Provinsi Jawa Barat, telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk dilaksanakan Validasi hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Model C.1, Model D.1, Model DA.1 dan DB.1 di 15 Kabupaten/Kota, sebagaimana **Surat**



**Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 374/Bawaslu Jabar/V/2014,
 tanggal 3 Mei 2014, Perihal : Rekomendasi.**

- e. Bahwa, hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu :

N O	NO REGISTRASI	POKOK LAPORAN/TEMUA N	TINDAK LANJUT	KESIMPULA N
1	01/TM/PILEG/X/ 2013	Temuan dugaan Pelanggaran Pemasangan Iklan Kampanye di luar jadwal Tahapan Kampanye a.n. Ir. KETUT SUSTIAWAN CALEG PDIP DPR RI NO. URUT 1 (DAPIL KOTA BANDUNG-KOTA CIMAHI) yang dimuat di Halaman 9, Harian Umum BANDUNG EXPRES edisi hari Senin tanggal 7 Oktober 2013	Diteruskan ke SENTRA GAKKUM DU JAWA BARAT	Dihentikan di Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhi unsur kampanye secara komulatif
2	02/TM/PILEG/X/ 2013	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Iklan Kampanye di luar jadwal Tahapan Kampanye a.n. Dra. MIRA ROSANA GNAGEY, M.Pd CALEG Partai NasDem DPR RI NO. URUT 2 (DAPIL KOTA BANDUNG-KOTA CIMAHI) yang dimuat di Halaman 16, Harian Umum REPUBLIKA edisi hari Senin tanggal 24 Oktober 2013	Diteruskan ke SENTRA GAKKUM DU JAWA BARAT	Dihentikan di Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhi unsur kampanye secara komulatif
3	04/TM/PILEG/IV	Pada Hari Minggu	Diteruskan	Dihentikan di



	/2014	Tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di lapangan Tegallega Kota Bandung dilaksanakan Kampanye Rapat Umum Partai Demokrat, pada saat Kampanye Rapat Umum terjadi pemberian barang berupa bola sepak yang dilemparkan oleh Juru Kampanye Nasional Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono) kepada peserta kampanye.	n ke SENTRA GAKKUM DU JAWA BARAT	Sentra Gakkumdu diputuskan bukan pelanggaran
4	05/TM/PILEG/IV /2014	Adanya Laporan dugaan penyalahgunaan penyaluran dana Bantuan Sosial kepada RT yang dimanfaatkan untuk sosialisasi/kampanye Calon Anggota DPRD Prov. Jawa Barat atas nama H. IRFAN SURYANEGARA dan Calon Anggota DPRD Kota Depok atas nama: Ir. EDY SITORUS dari Partai Demokrat di Kota Depok	Diteruskan ke SENTRA GAKKUM DU JAWA BARAT	Dihentikan di Sentra Gakkumdu karena Bukan merupakan Pelanggaran Pidana Pemilu
5	06/TM/PILEG/IV /2014	Adanya temuan Bahwa, berdasarkan Keputusan nomor :001/READY-TF/DPD-RI/SKEP-14 tentang Konfigurasi Personalia	Diteruskan ke SENTRA GAKKUM DU JAWA BARAT	Dihentikan karena hasil klarifikasi terbukti bahwa tidak ada PNS yang terlibat sebagai pelaksana



		<p>Kepengurusan “READY TASK FORCE” Pendukung Kandidat DPD RI a.n. DRS. H.K. EDI PARMADI, M. M.Pd Perwakilan Jawa Barat pada Pemilu 2014, dalam konsideran memperhatikan berbunyi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Rapat Khusus Pengurus PGRI kabupaten/Kota se-Jawa Barat, tanggal 18 februari, nomor :029/Kep/IBA/XX/2 013, tentang Pengusungan Calon Anggota DPD RI a.n. Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M.Pd; 2. Keputusan Konferensi PGRI Provinsi Jawa Barat (KONPROV) Tanggal 30 Oktober 2013, tentang Pernyataan KONRPROV PGRI 2013, bagian A, Butir 7, bahwa calon DPD RI periode 2014- 2019”... adalah satu-satunya yang mewakili PGRI Provinsi Jawa Barat dan telah tercatat pada Keputusan KPU Pusat, Nomor : 679/Kpts/KPU/201 2, tanggal 28 	Kampanye
--	--	--	----------



		<p>Agustus 2013. Bahwa, dari temuan tersebut, diduga pelaku melibatkan PNS sebagai Pelaksana Kampanye Calon DPD RI a.n. DRS. H.K. EDI PARMADI, M.M.Pd.</p>		
6	07/TM/PILEG/III/2014	<p>Adanya surat dari ICW dengan judul "TANGKAP DAN HUKUM PELAKU POLITIK UANG" yang menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu berupa politik uang dengan cara mengedarkan voucher pulsa dilingkungan sekolah yang dilakukan oleh sejumlah calon anggota legislative di wilayah Kabupaten Bogor</p>	<p>Diteruskan ke SENTRA GAKKUM DU JAWA BARAT</p>	<p>Dihentikan karena tidak terpenuhi unsur kampanye secara komulatif</p>
7	03/TM/PILEG/IV/2014	<p>Pada pada sekitar Pk. 09.00 WIB hari minggu Tanggal 9 April 2014 ditemukan surat suara yang sudah dicoblos atas nama caleg Lukmanudin (caleg Demokrat DPRD), Muhamad Azhari (Partai Demokrat DPR RI), H Audi IZ Tambunan (PDIP untuk DPR-RI), di 22 (dua puluh dua) TPS di Desa Benteng Kecamatan</p>	<p>Diteruskan ke SENTRA GAKKUM DU JAWA BARAT</p>	<p>Diteruskan ke Kepolisian, kejaksaan dan sedang Proses persidangan di PN Cibinong</p>



		Ciampea Kabupaten Bogor, sehingga berakibat dihentikannya Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014 di Desa Benteng Kec. Ciampea Kab. Bogor.		
8	08/TM/PILEG/V/2014	Dugaan terjadinya Pelanggaran Penggelembungan Suara Terlapor : KPU Kab. Cianjur, PPK Kec, Cianjur, Cidaun dan Leles	Diteruskan ke SENTRA GAKKUM DU JAWA BARAT	Dihentikan karena di Sentra Gakkumdu karena sudah ditangani oleh Sentra Gakkumdu Cianjur

- f. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan sengketa Pemilu sebagai berikut

TABEL 17 PENANGANAN SENGKETA PEMILU DI BAWASLU
 : JABAR

NO REGISTRASI	POKOK PERMOHONAN	PEMOHON	TERMOHON	HASIL KAJIAN/PUTUSAN
01/S/BAWASLU JABAR/VII/2013	Calon Tidak Masuk DCS	PPP Kab. Bogor	KPU Kab. Bogor	Ditolak
02/S/BAWASLU JABAR/VII/2013	Calon Tidak Masuk DCS	DPC PPP Kab. Bogor	KPU Kab. Bogor	Dikabulkan
03/S/BAWASLU JABAR/VII/2013	Calon Tidak Masuk DCS	DPC PDI P Kab. Karawang	KPU Kab. Karawang	Ditolak dalam Putusan Pendahuluan
04/S/BAWASLU JABAR/VIII/2013	Perubahan DCS	P DEMOKRAT Kab Cirebon	KPU Kab Cirebon	Dikembalikan (Karena tidak melengkapi berkas dalam jangka waktu yg



				ditentukan)
05/S/BAWASLU JABAR/IX/2013	Perubahan DCT	DPC PDI P Kab. Karawang	KPU Kab. Karawang	Ditolak
06/S/BAWASLU JABAR/X/2013	Perubahan DCT	DPC GERINDRA Kota Bandung	KPU Kota Bandung	Ditolak dalam Putusan Pendahuluan

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya yang diputuskan dalam rapat pleno.

[2.28] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;

[2.29] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Jawa Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Jawa Barat II
2. DPR RI Jawa Barat XI
3. DPRD Kabupaten Cianjur 1



4. DPRD Kabupaten Bekasi 4 (Perseorangan Muammar Khadafi)

5. DPRD Kabupaten Bekasi 5 (Perseorangan Hasan Bisri)

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Adapun permohonan Pemohon perseorangan atas nama Muammar Gadafi DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan dengan 1270/N/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014, sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk



permohonan PPHU anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Cianjur 1 dan anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 5 (Perseorangan Hasan Bisri), berdasarkan Ketetapan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/ 2014, bertanggal 28 Mei 2014, tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, yaitu diajukan pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini;

Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, keterangan dan bukti surat/tulisan, serta Partai Nasional Demokrat (DPR RI Dapil Jawa Barat XI, keterangan Pihak Terkait (perseorangan calon) H. Khairan dan bukti surat/tulisan Pihak Terkait H. Khairan (DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4), keterangan Bawasli Provinsi Jawa Barat, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



DPR RI DAPIL JAWA BARAT II

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat II** tentang Pemohon di Kabupaten Bandung memperoleh 90.458 suara, namun menurut Termohon memperoleh 69.818 suara, sehingga terdapat selisih 20.640 suara. Selain itu, Pemohon di Kabupaten Bandung Barat memperoleh 50.930 suara, namun Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menyebutkan perolehan suaranya menurut versi Termohon (tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat).

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9-1 sampai dengan P-9.34, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Guen Guen, Yuyun Supriyatna, Dasep Ashari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 3 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9.JABAR II.1 sampai dengan T-9.JABAR II.3, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bukti P-9.1 dan bukti P-9.2 = bukti T.9.JABAR II.1 (Model DB dan Lampirannya) Kabupaten Bandung. Bukti P-9.2 = bukti T.9.JABAR II.1 tersebut ditemukan fakta adanya kesamaan perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Bandung sebanyak 69.818 suara. Dalil Pemohon tentang adanya perbedaan perolehan suara Pemohon di KPU Bandung, menurut Mahkamah hal itu terjadi karena Pemohon menggunakan data pembanding yang tidak resmi, bukti P-9.1 (Lampiran Model DB-1 dan Model DA-1) dan bukti P-9.33 (Model DA-1) tidak ada tanda tangan dari KPU Kabupaten Bandung (Model DB) dan tidak ada tanda tangan saksi-saksi peserta Pemilu (Lampiran DB-1). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



b. Untuk Kabupaten Bandung Barat Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 75 UU MK dalil permohonan Pemohon untuk Kabupaten Bandung Barat tidak memenuhi persyaratan permohonan PHPU. Meskipun Pemohon mengajukan Bukti P-9.3 dan bukti T.9.JABAR II.02 (Model DB dan Lampirannya) Kabupaten Bandung Barat, namun oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Mahkamah tidak mempertimbangkan;

Menurut Mahkamah bahwa sekalipun Pemohon mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas, namun pada hakikatnya keterangan Pemohon hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

DPR RI DAPIL JAWA BARAT XI

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk **Dapil Jawa Barat XI** tentang Termohon dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya telah melakukan pelanggaran/kecurangan yang bersifat sistematis, tersruktur, dan massif. Pemohon menemukan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik oleh Termohon di seluruh TPS di 5 Kecamatan Kabupaten Garut. Selain itu, Pemohon menemukan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon di 134 TPS, 68 desa dari 14 Kecamatan se-Kabupaten Garut;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9.(J-XI).1 sampai dengan P-9.(J-XI).52, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9.JABAR XI.4 sampai dengan T-9.JABAR XI.615, tanpa mengajjukan saksi ataupun ahli;

Pihak Terkait Partai Nasdem membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1.1 sampai dengan bukti PT.1-2A, serta



seorang saksi bernama Muslim Sidik Kodor Hidayatullah yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juni 2015, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, pada pokoknya menerangkan apa yang telah ditetapkan oleh KPU untuk Dapil Jawa Barat XI sama dengan yang diketahuinya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bukti P-9.(J-X 1) 19 dan bukti T-9 JABAR XI.129 (Model C dan lampirannya) TPS 7 Desa Barusuda, Kecamatan Cigedug, ditemukan fakta hukum Pemohon telah menebalkan dan/atau mengganti perolehan suaranya pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) yang sebenarnya tertulis 98 tetapi ditulis 97, namun jumlah angka dalam huruf tertulis sembilan puluh delapan. Perolehan suara Pemohon sebanyak 98 di TPS tersebut sama dengan bukti Termohon;
- b. Bukti P-9.(J-X1) 19 dan bukti T-9 JABAR XI.133 (Model C dan lampirannya) TPS 11 Desa Barusuda, Kecamatan Cigedug ditemukan fakta hukum jumlah perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) sebanyak 50 suara, namun dalam bukti Termohon sebanyak 60 suara. Selisih 10 suara tersebut terjadi karena Pemohon tidak menulis perolehan suara Caleg Nomor Urut 5;
- c. Bukti P-9.(J-X1) 19 dan bukti T-9 JABAR XI.141 (Model C dan lampirannya) TPS 3 Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug ditemukan fakta hukum jumlah perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) sebanyak 11 suara, namun dalam bukti Termohon sebanyak 12 suara. Selisih 1 suara tersebut terjadi karena Pemohon tidak menulis perolehan suara Caleg Nomor Urut 8;
- d. Bukti P-9.(J-X1) 19 dan bukti T-9 JABAR XI.180 (Model C dan lampirannya) TPS 10 Desa Sindangsari, Kecamatan Cigedug ditemukan fakta hukum Pemohon telah salah menjumlah perolehan suaranya pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) sebanyak 18, padahal jumlah perolehan suara partai (PPP) dan caleg sebanyak 8 suara. Jumlah tersebut sama dengan bukti Termohon, yaitu Pemohon memperoleh 8 suara;



- e. Bukti P-9.(J-X1) 19 dan bukti T-9 JABAR XI.184 (Model C dan lampirannya) TPS 03 Desa Sukahurih, Kecamatan Cigedug ditemukan fakta hukum perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) sebanyak 43 suara, namun dalam bukti Termohon sebanyak 41 suara. Selisih 2 suara tersebut terjadi karena Pemohon mengurangi 1 suara sah Caleg Nomor Urut 3, menambah 2 suara Caleg Nomor 4, mengurangi 3 suara Caleg Nomor Urut 5, dan menambah 4 suara Caleg Nomor Urut 6;
- f. Bukti P-9.(J-X1) 19 dan bukti T-9 JABAR XI.192 (Model C dan lampirannya) TPS 11 Desa Sukahurih, Kecamatan Cigedug ditemukan fakta perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) dicoret-coret, tetapi perolehan suara Pemohon pada kolom jumlah huruf tertulis sembilan. Jumlah tersebut sama dengan bukti Termohon yaitu Pemohon memperoleh 9 suara;
- g. Bukti P-9.(J-X1) 20 dan bukti T-9 JABAR XI.209 (Model C dan lampirannya) TPS 01 Desa Jatimulya, Kecamatan Pamempeuk ditemukan fakta perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) sebanyak 7 suara, namun dalam bukti Termohon sebanyak 4 suara. Selisih 3 suara tersebut terjadi karena Pemohon salah menjumlah pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B), sebab Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara dan Caleg Nomor Urut 5 memperoleh 1 suara, sehingga seharusnya berjumlah 4 suara;
- h. Bukti P-9.(J-X1) 20 dan bukti T-9 JABAR XI.275 (Model C dan lampirannya) TPS 15 Desa Pamempeuk, Kecamatan Pamempeuk ditemukan fakta perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) sebanyak 18 suara, namun dalam bukti Termohon sebanyak 10 suara. Selisih 8 suara tersebut terjadi karena Pemohon menambah 4 suara untuk partai (PPP), menambah 1 suara untuk Calon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 7, dan Nomor 9, serta menambah 2 suara untuk Calon Nomor Urut 6;
- i. Bukti P-9.(J-X1) 21 dan bukti T-9 JABAR XI.312 (Model C dan lampirannya) TPS 2 Desa Girimukti, Kecamatan Cisewu tersebut ditemukan fakta perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) sebanyak 1 suara, namun dalam bukti Termohon sebanyak 3



suara. Selisih 2 suara pada bukti Pemohon terjadi karena Pemohon menghilangkan 3 suara Caleg Nomor Urut 1 suara dan menambah 1 suara untuk Calon Nomor 7;

- j. Bukti P-9.(J-X1) 22 dan bukti T-9 JABAR XI.372 (Model C dan lampirannya) TPS 4 Desa Cijolang, Kecamatan BL. Limbangan ditemukan fakta perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) sebanyak 51 suara, namun dalam bukti Termohon sebanyak 47 suara. Selisih 4 suara tersebut terjadi karena Pemohon menambah 2 suara untuk partai (PPP), menambah 1 suara untuk Calon Nomor 4 dan Nomor 10, mengurangi 1 suara untuk Calon Nomor Urut 6 dan Nomor 9, menambah 1 suara untuk Caleg Nomor 7;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti Pemohon maka seolah-olah terdapat perbedaan atau adanya kesalahan penghitungan oleh Termohon, padahal sebagian bukti Pemohon tersebut telah diubah sendiri, sehingga tidak dapat membuktikan apa yang didalilkannya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD KABUPATEN DAPIL BEKASI 4

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon Perseorangan atas nama Muammar Gadafi untuk **Dapil Bekasi 4** tentang perolehan suara Caleg atas nama H. Kairan di TPS 1 sampai dengan TPS 160 Kelurahan Bahagia menurut ketentuan Termohon memperoleh 508 suara, tetapi pada Model C-1, H. Kairan memperoleh 332, sehingga ada penambahan 176 suara, sehingga menurut Pemohon yang berhak mendapat kursi ke 10 anggota DPRD Bekasi adalah Muammar Gadafi dengan perolehan suara sebanyak 3.923 suara.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9-1 sampai dengan P-9-6, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Feri Fadli, Susanto, dan Salaudin Fauzi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang keterangannya termuat pada Bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda



bukti T-9.KAB.BEKASI.IV.625 sampai dengan T-9.KAB.BRKASI.IV.626, tanpa mengajukan saksi atau ahli;

Pihak Terkait H. Khairan membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat tulisan/tulisan bertanda PT-9.1 sampai dengan PT-9.4, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

Setelah Mahkamah meneliti bukti Pemohon ditemukan fakta hukum bukti Pemohon tidak lengkap karena dari 160 TPS di Kelurahan Bahagia sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon hanya ada sekitar 100 TPS, sehingga ada sekitar 60 TPS yang tidak diajukan oleh Pemohon. Oleh karena jumlah TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak lengkap, meskipun Pemohon mengajukan saksi, yaitu Feri Fadli, Susanto, dan Salaudin Fauzi namun keterangan para saksi tersebut tidak jauh berbeda dengan bukti tulis yang diajukannya, sehingga Mahkamah tidak perlu lagi menilai 100 TPS tersebut sebab seandainya pun ada perbedaan suara Pemohon di TPS-TPS tersebut maka selisih suara H. Kairan sebanyak 176 di 160 TPS yang didalilkan Pemohon tersebut dengan sendirinya tidak akan terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, serta DPRD Kabupaten/Kota Bekasi 4 (perseorangan) tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Eksepsi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan **Cianjur 1** dan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan **Bekasi 5** tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan untuk DPR RI Daerah Pemilihan **Jawa Barat II**, **DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI**, dan **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 4**, tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan **Cianjur 1** dan DPRD Kabupaten **Bekasi 5** tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 22.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat/Kuasanya, Pihak Terkait I Partai Nasional Demokrat/kuasanya, dan Pihak Terkait II H. Khairan/kuasnya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman



ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**